

**STUDI TENTANG PROSES PENETAPAN KELURAHAN
PUDAKPAYUNG SEBAGAI KAMPUNG PANCASILA DI KOTA
SEMARANG**

SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Tugas dan Melengkapi Syarat

Guna Memperoleh Gelar Sarjana Strata S.1

Dalam Program Studi Sosiologi



Disusun Oleh :

RIZKY PERMATASARI

NIM. 1906026064

**PROGRAM STUDI SOSIOLOGI FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN
ILMU POLITIKUNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO
SEMARANG**

2023

NOTA PEMBIMBING

NOTA PEMBIMBING

Lamp : 5 (lima) eksemplar
Hal : Persetujuan Naskah Skripsi

Kepada
Yth. Dekan
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
UIN Walisongo Semarang
Di Semarang

Assalamu'alaikum. Wr. Wb

Setelah membaca, mengadakan koreksi dan perbaikan sebagaimana mestinya, maka kami menyatakan bahwa proposal skripsi saudara/i:

Nama : Rizky Permatasari
NIM : 1906026064
Jurusan : Sosiologi
Judul Skripsi : **STUDI TENTANG PROSES PENETAPAN KELURAHAN
PUDAKPAYUNG SEBAGAI KAMPUNG PANCASILA DI KOTA
SEMARANG**

Dengan ini telah saya setuju dan mohon agar segera diujikan. Demikian atas perhatiannya, diucapkan terimakasih.


Wassalamu'alaikum Wr. Wb.


Semarang, 17 November 2023

Pembimbing

Bidang Substansi Materi

Bidang Metodologi dan Penulisan


Dr. H. Mochammad Parmudi, M.Si
NIP : 199209072019032018


Naili Ni'matul Illiyyun, M.A
NIP : 199101102018012003

PENGESAHAN

PENGESAHAN

STUDI TENTANG PROSES PENETAPAN KELURAHAN PUDAKPAYUNG SEBAGAI KAMPUNG PANCASILA DI KOTA SEMARANG

Disusun Oleh :

Rizky Permatasari

NIM. 1906026064

Telah dipertahankan di depan dewan penguji skripsi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik UTN
Walisongo Semarang pada 14 Desember 2023 dan dinyatakan lulus

Susunan Dewan Penguji

Ketua Sidang

Dr. H. Mochammad Parmudi, M.Si.
NIP. 196904252000031001



Sekretaris Sidang

Dr. Moh. Fauzi, M.A.
NIP.197205171998031003

Penguji Utama

Nur Hasyim, M.A.

NIP. 197303232016012901

Pembimbing I

Dr. H. Mochammad Parmudi, M.Si.
NIP. 196904252000031001

Pembimbing I

Naili Nurmatul Illiyun, M.A.
NIP. 199101102018012003

PERNYATAAN

PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan bahwa skripsi ini adalah hasil karya saya sendiri dan didalamnya tidak terdapat karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar sarjana disuatu universitas atau perguruan tinggi di lembaga pendidikan lainnya. Temuan dan sumber dari hasil publikasi atau tidak dipublikasi dijelaskan dalam tulisan dan daftar pustaka.

Semarang, 4 Januari 2024

Pembuat Pernyataan



Rizky Permatasari

NIM. 1906026064

KATAPENGANTAR

Alhamdulillah segala puji syukur peneliti panjatkan atas kehadiran, nikmat dan karunia Allah SWT, peneliti dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul **“STUDI TENTANG KAMPUNG PANCASILA DI KELURAHAN PUDAHPAYUNG KECAMATAN BANYUMANIK KOTA SEMARANG”**. Shalawat dan salam tidak luput peneliti panjatkan kepada junjungan nabi agung kita yaitu Nabi Muhammad SAW yang sudah memberikan hidayahnya kepada seluruh umatnya.

Skripsi ini disusun untuk memenuhi persyaratan dalam memperoleh gelar Sarjana Strata (S1) di jurusan Sosiologi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik UIN Walisongo Semarang. Selama penyusunan skripsi berlangsung, peneliti banyak memperoleh bimbingan, dukungan, nasehat serta bantuan dari berbagai pihak sehingga skripsi ini dapat terselesaikan. Pada kesempatan ini, dengan ketulusan hati peneliti ingin mengucapkan banyak terimakasih kepada :

1. Bapak Prof. Dr. Nizar, M.Ag selaku Rektor UIN Walisongo Semarang beserta jajarannya.
2. Ibu Dr. Hj. Misbah Zulfa Elizabeth, M.Hum yaitu selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik UIN Walisongo Semarang beserta jajarannya.
3. Ibu Naili Ni'matul Illiyun, M.A, M.Si yaitu selaku Ketua Jurusan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik UIN Walisongo Semarang sekaligus dosen pembimbing II, yang telah bersedia membantu, meluangkan pikiran, tenaga dan waktunya untuk memberikan nasehat, arahan, dan bimbingan bagi peneliti dalam proses penyusunan skripsi.
4. Dr. Mochammad Parmudi, M.Si selaku Dosen pembimbing I, yang telah bersedia membantu, meluangkan pikiran, tenaga dan waktunya untuk memberikan nasehat, arahan, dan bimbingan bagi peneliti dalam proses penyusunan skripsi.
5. Bapak Dr. Moh. Fauzi, M.Ag, selaku dosen wali yang telah membimbing dan membantu peneliti selama proses menempuh pendidikan di UIN Walisongo Semarang.

6. Seluruh dosen dan staff Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik UIN Walisongo Semarang yang sudah mendidik, memberikan arahan dan membantu peneliti dalam proses menempuh pendidikan di UIN Walisongo Semarang.
7. Bapak Alex, Ibu Kristiawan, Bapak Suparno, Bapak Haji Surani, Bapak Trimakno, Bapak Suwartono, Bapak Haji Muhtar, Bapak Issamsudin, Bapak Tomi, Bapak Maryono, Bu Dewi dan Bapak Eko yang bersedia menjadi informan dan telah membantu peneliti dalam mengumpulkan data penelitian skripsi.
8. Kedua orang tua tercinta yaitu Ibu Mimin, Bapak Arpin Suryani dan keluarga yang tak henti-hentinya selalu memberikan doa, dukungan, semangat, kasih sayang dan pengorbanan yang tak terhingga selama ini.
9. Teman-teman seperjuangan SMA yaitu Lima Dara dan teman teman seperjuangan sosiologi angkatan 2019 yang selalu memberi dukungan dan menjadi salah satu teman terbaik sepanjang masa.
10. Seluruh pihak yang telah membantu peneliti secara langsung maupun tidak langsung menyelesaikan skripsi ini, yang tidak dapat disebutkan satu persatu. Peneliti mengucapkan terimakasih.

Sekian ucapan terimakasih yang tak terhingga untuk seluruh pihak yang telah membantu penelitian ini. Teriring doa semoga Allah SWT membalas kebaikan kepada mereka yang telah membantu pengerjaan skripsi ini hingga selesai. Peneliti menyadari bahwa dalam penyusunan skripsi ini masih jauh dari kata sempurna, maka dari itu peneliti memohon kritik dan saran yang mampu menjadi perbaikan yang bermanfaat bagi skripsi yang telah dibuat.

Wassalamualaikum Wr. Wb.

Semarang, November 2023

Rizky Permatasari
Nim : 1906026064

PERSEMBAHAN

Dengan mengucap syukur Alhamdulillah rabbil alamin, penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik. Skripsi ini peneliti persembahkan untuk orang terkasih.

Kepada orang tua tercinta yaitu Ibu Mimin dan Bapak Arpin Suryani yang telah selalu memberikan dukungan dan doa yang tak henti-hentinya mengalir sebagai jembatan kemudahan dalam menyelesaikan pendidikan di UIN Walisongo Semarang. Semoga Ibu dan Bapak diberikan umur panjang, kesehatan, kelancaran rezeki, dan barokah.

Kepada almamater Program Studi Sosiologi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik UIN Walisongo Semarang.

MOTTO

Keberhasilan bukan milik orang yang pintar. Keberhasilan milik mereka yang terus berusaha.

(B.J Habibie)

ABSTRAK

Fenomena pembentukan Kampung Pancasila di Kelurahan Pudakpayung, Kecamatan Banyumanik, Kota Semarang merupakan salah satu fenomena yang menarik untuk dikaji yang berkaitan dengan pemberdayaan masyarakat. Kelurahan Pudakpayung merupakan salah satu kelurahan dari 16 kelurahan yang ada di Kecamatan Banyumanik yang dipilih secara langsung untuk kemudian dibentuk sebagai Kampung Pancasila. Seiring dengan perkembangan zaman Pancasila mulai tersisih, terlupakan dan tidak lagi menjadi hal yang harus dipatuhi. Salah satu fokus mereka adalah pada generasi muda di Kelurahan Pudakpayung yang seiring dengan perkembangan zaman mulai lebih menyukai budaya-budaya luar, sehingga kurangnya kepedulian terhadap budaya sendiri karena kurangnya minat dan kesadaran. Maka melalui program lanjutan dari Kampung Pancasila ini berupaya untuk melakukan pengembangan program Kampung Pancasila dapat membantu meningkatkan kualitas hidup dan kesejahteraan masyarakat Pemberdayaan yang dilakukan di Kampung Pancasila yaitu menyangkut ketentuan penetapan Kampung Pancasila, proses penetapan dan pemberdayaan dalam segi pengembangan nilai-nilai Pancasila kepada masyarakat. Tujuan penelitian ini adalah untuk menjelaskan tentang ketentuan penetapan Kampung Pancasila, proses penetapan dan proses pengembangan program Kampung Pancasila di Kelurahan Pudakpayung tersebut.

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Jenis penelitian adalah penelitian lapangan (*field research*). Adapun sumber data yang diperoleh dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder. Data dalam penelitian ini diperoleh melalui wawancara secara mendalam dan observasi partisipan. Pada proses perolehan data, peneliti melakukan wawancara dengan anggota pemerintah yang menangani program Kampung Pancasila, ketua organisasi, ketua pencanangan, wakil, BABINSA Kelurahan Pudakpayung, tokoh masyarakat, tokoh agama, dan anggota masyarakat. Data yang diperoleh dalam penelitian ini dianalisis dengan model analisis menurut Miles & Huberman yaitu reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa indikator ketentuan penetapan sebuah wilayah menjadi Kampung Pancasila ada empat yaitu (1)masyarakat setempat memahami nilai-nilai Pancasila, (2)masyarakat setempat berperilaku sesuai dengan nilai-nilai Pancasila, (3)sarana dan prasarana setempat menunjang edukasi dan implementasi nilai-nilai Pancasila bagi para warganya dan pengunjung, (4)terdapat kegiatan rutin edukasi dan implementasi nilai-nilai Pancasila. Sementara itu, proses penetapan Kampung Pancasila di Kelurahan Pudakpayung Kota Semarang dilakukan melalui proses *enabling* (membangun iklim yang membuat potensi masyarakat berkembang), *empowering* (memperkuat potensi) , dan *protection* (melindungi masyarakat). Kemudian proses pengembangan program yang dilaksanakan oleh Kampung Pancasila di Kelurahan Pudakpayung yaitu perencanaan dan kebijakan, aksi sosial dan politik, pendidikan dan penyadaran.

Kata Kunci : Proses Penetapan Wilayah, Pemberdayaan, Kampung Pancasila

ABSTRACT

The phenomenon of the formation of Pancasila Village in Pudukpayung Village, Banyumanik District, Semarang City is one of the interesting phenomena to be studied related to community empowerment. Pudukpayung Village is one of the 16 villages in Banyumanik District which was directly selected to be formed as Pancasila Village. Along with the development of the era, Pancasila began to be left out, forgotten and no longer a thing to obey. One of their focuses is on the younger generation in Pudukpayung Village who along with the times began to prefer foreign cultures, resulting in a lack of concern for their own culture due to lack of interest and awareness. So through this advanced program from Pancasila Village, it seeks to develop the Pancasila Village program to help improve the quality of life and welfare of the community. The empowerment carried out in Pancasila Village is related to the provisions for the determination of Pancasila Village, the process of determination and empowerment in terms of developing Pancasila values to the community. The purpose of this study is to explain the provisions for the establishment of Pancasila Village, the process of determining and the process of developing the Pancasila Village program in Pudukpayung Village.

This research uses qualitative research methods with a descriptive approach. The type of research is field research. The data sources obtained in this research are primary data and secondary data. The data in this research was obtained through in-depth interviews and participant observation. In the process of obtaining data, researchers conducted interviews with government members who handle the Kampung Pancasila program, the head of the organization, the head of the declaration, the deputy, BABINSA of Puduk Payung Village, community leaders, religious leaders, and community members. The data obtained in this study were analyzed with the analysis model according to Miles & Huberman, namely data reduction, data presentation and conclusion drawing.

The results of this research show that there are four indicators for determining an area as a Pancasila Village, namely (1) the local community understands the values of Pancasila, (2) the local community behaves in accordance with the values of Pancasila, (3) local facilities and infrastructure support education and application of Pancasila values for citizens and visitors, (4) there are routine educational activities and application of Pancasila values. Meanwhile, the process of establishing a Pancasila Village in Pudukpayung Village, Semarang City, is carried out through a process of empowerment (building a climate that allows the community's potential to develop), empowerment (strengthening the potential), and protection (protecting the community). Then the program development process carried out by Pancasila Village in Pudukpayung Village is planning and policy, social and political action, education and awareness.

Keywords : Regional Determination Process, Empowerment, Pancasila Village

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	1
NOTA PEMBIMBING	2
PENGESAHAN	3
PERNYATAAN	4
KATAPENGANTAR.....	5
PERSEMBAHAN	7
MOTTO	8
ABSTRAK	9
ABSTRACT.....	10
DAFTAR TABEL	13
DAFTAR GAMBAR.....	15
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	5
C. Tujuan Penelitian	5
D. Manfaat Penelitian	5
E. Tinjauan Pustaka.....	6
F. Kerangka Teori	8
G. Metode Penelitian	10
H. Sistematika Penulisan Skripsi	16
BAB VI: Penutup	17
BAB II KAMPUNG PANCASILA DAN TEORI PEMBERDAYAAN JIM IFE	18
A. Asumsi Dasar Pemberdayaan Masyarakat.....	18
1. Pemberdayaan Masyarakat	18
2. Kampung Pancasila.....	24
B. Istilah Kunci Pemberdayaan Masyarakat Jim Ife	26
1. Konsep Pemberdayaan.....	26

2. Asumsi Dasar Pemberdayaan.....	29
3. Strategi Pemberdayaan.....	31
4. Proses Pemberdayaan.....	32
C. Pemberdayaan Masyarakat dalam Perspektif Islam	33
D. Implementasi Teoritis Pemberdayaan Jim Ife	35
BAB III PROFIL KAMPUNG PANCASILA KELURAHAN PUDAKPAYUNG	38
A. Gambaran Umum Kelurahan Pudak Payung	38
1. Kondisi Geografis Kelurahan Pudakpayung.....	38
2. Kondisi Topografis Kelurahan Pudak Payung	41
3. Kondisi Demografis Kelurahan Pudakpayung	43
4. Profil Wilayah Kelurahan Pudak Payung.....	50
B. Profil Kampung Pancasila di Kelurahan Pudakpayung	53
1. Sejarah Kampung Pancasila di Kelurahan Pudakpayung.....	53
2. Visi dan Misi Kampung Pancasila di Kelurahan Pudakpayung	54
3. Bagan dan Struktur Organisasi Kampung Pancasila	56
4. Bagan dan Struktur Panitia Pelaksanaan Pencanaan KampungPancasila	57
BAB IV KRITERIA PENETAPAN KAMPUNG PANCASILA DAN PROSES PENETAPAN KAMPUNG PANCASILA DI KELURAHAN PUDAKPAYUNG	58
A. Kriteria Penetapan Kampung Pancasila.....	58
1. Masyarakat setempat memahami nilai-nilai Pancasila	60
2. Masyarakat setempat berperilaku sesuai nilai-nilai Pancasila	62
3. Sarana dan prasarana setempat menunjang edukasi danimplementasi nilai- nilai Pancasila bagi warganya dan pengunjung	63
4. Terdapat kegiatan rutin edukasi dan implementasi nilai-nilai Pancasila	64
B. Proses penetapan Kampung Pancasila di Kelurahan Pudakpayung.....	65
1. <i>Enabling</i>	66
2. <i>Empowering</i>	71

3. <i>Protecting</i>	79
BAB V PENGEMBANGAN PROGRAM KAMPUNG PANCASILA DI KELURAHAN PUDAKPAYUNG	81
A. Perencanaan dan Kebijakan.....	81
B. Aksi Sosial dan Politik	84
C. Pendidikan dan Penyadaran.....	90
BAB VI PENUTUP	100
A. KESIMPULAN	100
B. SARAN.....	102
DAFTAR PUSTAKA.....	103

DAFTAR TABEL

Tabel 1 Daftar Tabel Informan	13
Tabel 2 Luas Wilayah Tanah Menurut Penggunaan	40
Tabel 3 Tanah Sawah	41
Tabel 4 Tanah Kering.....	41
Tabel 5 Jumlah Persebaran Penduduk Setiap RW di Kelurahan Pudukpayung pada Tahun 2022.....	43
Tabel 6 Jumlah Penduduk Berdasarkan Usia	45
Tabel 7 Tingkat Pendidikan Masyarakat Kelurahan Pudukpayung.....	46
Tabel 8 Jenis Mata Pencaharian Masyarakat Kelurahan Pudukpayung	47
Tabel 9 Komposisi Penduduk Berdasarkan Agama Kelurahan Pudukpayung.....	49
Tabel 10 Jumlah Tempat Ibadah di Kelurahan Pudukpayung	49
Tabel 11 Struktur Organisasi dan Panitia Kampung Pancasila di Kelurahan Pudukpayung.....	73
Tabel 12 Kegiatan Kampung Pancasila di Kelurahan Pudukpayung	83

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1 Peta Wilayah Kecamatan Banyumanik Kota Semarang	39
Gambar 2 Kondisi Kemiringan Lahan di Kelurahan Pudukpayung.....	43
Gambar 3 Posko Kampung Pancasila di Kelurahan Pudukpayung	76
Gambar 4 Kegiatan Pencanangan Kampung Pancasila di Kelurahan Pudukpayung	78
Gambar 5 Kegiatan Pagelaran Seni Wayang Kulit Apitan Dukuh Krajan.....	85
Gambar 6 Kegiatan Pagelaran Seni Wayang Kulit Sedekah Bumi.....	86
Gambar 7 Penghargaan Pelaksana Gotong-royong.....	88
Gambar 8 Potret Kegiatan Musyawarah di Kampung Pancasila	89
Gambar 9 Diskusi Lanjutan Program Penanaman Nilai-Nilai Pancasila di Tempat Ibadah	96
Gambar 10 Kegiatan Pendidikan Pancasila ke Pondok Pesantren.....	96
Gambar 11 Buku Penerapan Butir-Butir Pancasila.....	98

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Kampung Pancasila diperkenalkan kepada masyarakat Indonesia secara masif yaitu pada tahun 2018. Istilah Kampung Pancasila merupakan bagian dari pengembangan serta penataan desa yang termuat dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia No 81 Tahun 2015 mengenai Evaluasi Perkembangan Desa dan Kelurahan. Pada peraturan menteri No 81 Tahun 2015 ini memfokuskan pada peningkatan kualitas hidup dan kesejahteraan desa dengan mengintegrasikan Pancasila sebagai acuan dan fokus pada peningkatan kualitas hidup masyarakat, penerapan nilai-nilai Pancasila, dan pemberdayaan anak-anak muda. Maka Dibentuknya Kampung Pancasila merupakan perluasan dari peraturan No 81 Tahun 2015 untuk membuat program Kampung Pancasila yang berupaya meningkatkan kesejahteraan dan kualitas hidup masyarakat desa dan kelurahan menjaga keutuhan persaudaraan, menjaga ketahanan ideologi, dan mempertahankan nilai-nilai baik yang tumbuh (Rukmana, 2020).

Kampung Pancasila adalah desa yang multikultural, artinya warganya memiliki latar belakang agama, budaya, hingga etnis yang beragam namun dalam praktek sosial dan interaksi sosial yang ada berlangsung secara harmonis, karena di Kampung Pancasila tersebut dibangun dengan menerapkan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari (Hasanah, 2021). Pembentukan Kampung Pancasila kemudian disebar ke seluruh pelosok Indonesia yaitu salah satunya pada tahun 2018 dibentuk Kampung Pancasila di Kelurahan Tebing Tinggi, Jambi yang dinobatkan langsung oleh Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia (Kemendagri). Kampung tersebut mampu memberikan percontohan tentang pengaktualisasian nilai-nilai Pancasila (Rukmana, 2020).

Kajian mengenai Kampung Pancasila telah banyak dilakukan oleh peneliti sebelumnya, salah satunya adalah Sitti Uswatun Hasanah, dkk (2020) yang berjudul “Pembentukan Desa Pancasila Sebagai Identitas Budaya di Desa Pasir Panjang Kecamatan Mempawah Timur Kabupaten Mempawah”. Penelitian tersebut menyebutkan bahwa program Desa Pancasila adalah jalan untuk menghadapi berbagai ancaman baik dari dalam maupun luar dan mendorong kemajuan desa dengan berbasis potensi lokal. Tidak hanya itu, Kampung Pancasila bertujuan untuk mendorong keharmonisan di antara masyarakat yang beragam, menanamkan nilai-

nilai Bhinneka Tunggal Ika, dan mendorong seluruh warga negara untuk menjunjung tinggi prinsip-prinsip Pancasila. Orientasi dari adanya Kampung Pancasila ini yaitu setiap warga diharapkan memiliki karakter Pancasila yang mencirikan sikap menghargai, mengakui, memelihara pluralisme, menjaga persatuan, memanusiaikan sesama manusia, dan mengedepankan sistem musyawarah, serta dapat mewujudkan keadilan. Hal yang juga ingin dicapai yaitu berkembangnya kecerdasan spiritual, emosional, dan intelektual melalui pengembangan budaya, sosial, dan ilmu pengetahuan, serta peningkatan kecerdasan warga negara.

Kelurahan Pudukpayung merupakan salah satu wilayah di Kota Semarang yang dicanangkan sebagai Kampung Pancasila. Pada Juni 2022 Kelurahan Pudukpayung terpilih sebagai Kampung Pancasila terbaik nomor satu se-Kota Semarang. Hal tersebut disebabkan karena, warga Pudukpayung di tengah keberagaman agama yang ada mampu bersinergi dan kompak dalam menumbuhkan nilai-nilai Pancasila. Implementasi atas nilai Pancasila tersebut terlihat nyata dalam suasana keguyuban, kerukunan, dan keharmonisan yang tampak (Humas,2022). Predikat yang diraih merupakan bentuk perwujudan atas kondisi sosial masyarakat Pudukpayung yang mampu mempertahankan nilai-nilai dan melaksanakan kebiasaan-kebiasaan baik berbasis Pancasila.

Menurut pernyataan informan, Kelurahan Puduk Payung terpilih menjadi perwakilan dalam pembentukan Kampung Pancasila dari beberapa kelurahan yang ada di Kecamatan Banyumanik Kota Semarang. Terpilihnya wilayah Pudukpayung karena mempertimbangkan beberapa hal yaitu dari segi kemajemukan agama, tempat ibadah yang berdekatan, toleransi yang terjalin, banyaknya organisasi kemasyarakatan yang berdaya, masyarakat yang masih mengedepankan sistem demokrasi, gotong-royong dan musyawarah yang dijalankan. Kemudian, Kampung Pancasila di Kelurahan Puduk Payung dideklarasikan oleh tokoh masyarakat dan kemudian diapresiasi secara langsung oleh Walikota Semarang yaitu Hendy Prihadi. Hal ini menjadi keuntungan bahwa Kampung Pancasila yang ada di Kelurahan Pudukpayung disorot karena keunggulan yang dimiliki tersebut.

Pembentukan Kampung Pancasila di Kelurahan Pudukpayung bertujuan (1) untuk menegakkan nilai-nilai Pancasila sebagai pedoman rakyat Indonesia dalam berbangsa dan bernegara, (2) sebagai contoh dalam penerapan nilai luhur Pancasila pada kehidupan sehari-hari di masyarakat, (3) sebagai contoh sikap

toleransi antar umat beragama, (4) sebagai contoh hidup damai tanpa konflik walaupun terdapat perbedaan agama, suku, etnis dan ras, dan (5) timbulnya kerukunan dalam masyarakat (Arsip proposal penancangan Kampung Pancasila di Kelurahan Pudukpayung, 2022). Melalui latar belakang tersebut, melihat kondisi masyarakat Kelurahan Pudukpayung yang memiliki kemajemukan agama yaitu tumbuhnya 6 agama dan 1 aliran kepercayaan Sapto Darmo yang dianut oleh masyarakat, namun mereka mampu menunjukkan suasana kerukunan, toleransi, persatuan dan minimnya konflik atau gesekan antar umat beragama. Hal tersebut menjadi potret kebhinekaan dan kebersamaan yang erat terjalin sejak dulu.

Menurut pernyataan Bapak Suparno selaku BABINSA menyatakan bahwa penancangan Kampung Pancasila ini berdasar pada kekhawatiran pada posisi Pancasila yang seiring dengan perkembangan zaman menurutnya mulai tersisih, terlupakan dan tidak lagi menjadi hal yang harus dipatuhi. Salah satu fokus mereka adalah pada generasi muda di Kelurahan Pudukpayung yang seiring dengan perkembangan zaman mulai lebih menyukai budaya-budaya luar, sehingga kurangnya kepedulian terhadap budaya sendiri karena kurangnya minat dan kesadaran. Dengan demikian, melalui program Kampung Pancasila dapat membantu meningkatkan kualitas hidup dan kesejahteraan masyarakat desa dan kelurahan, serta menciptakan generasi muda yang memiliki sikap saling mendukung, bekerja sama, dan menerima perbedaan secara terbuka. Hal ini sejalan dengan nilai-nilai Pancasila yang mendorong persatuan, kerukunan, dan kesetaraan.

Program pemberdayaan dalam pemberian pendidikan inklusif dan pembudayaan nilai-nilai Pancasila bertujuan untuk menciptakan kerja sama, keteladanan, dan sosialisasi yang inklusif, sehingga generasi muda dapat memahami, menghargai, dan merangkul keberagaman dalam masyarakat. Melalui pendidikan Pancasila, diharapkan generasi muda dapat memantapkan solidaritas antar umat beragama dan menyelami kembali nilai-nilai Pancasila sebagai landasan pembangunan karakter bangsa. Ini merupakan upaya nyata dalam merajut karakter bangsa dan membangun generasi penerus yang memiliki jiwa Pancasila serta mampu berperan sebagai agen perubahan yang inklusif dan solidar. Pemberdayaan anak muda melalui program Kampung Pancasila juga dapat membantu mencegah terjadinya radikalisme, intoleransi, dan penyimpangan

lainnya yang tidak sesuai dengan nilai luhur masyarakat.

Pada peraturan pasal 112 UU Desa ayat 3 dan 4 tentang “Pemerintah memberdayakan masyarakat desa dengan menerapkan hasil dari pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, teknologi yang tepat guna dan sebuah temuan baru untuk kemajuan masyarakat desa” dan “ dalam meningkatkan kualitas pemerintah dan masyarakat desa dilakukan melalui pendidikan, pelatihan, penyuluhan, mengakui serta mengfungsikan institusi yang telah ada di masyarakat Desa” (Hasanah, 2021). Berdasarkan latar belakang dibentuknya Kampung Pancasila yaitu untuk menegakkan nilai-nilai Pancasila dan memperkokoh posisi Pancasila sebagai ideologi, tentunya diperlukan sebuah pemberdayaan yang dilakukan. Menurut Yudi Latif upaya yang terbaik dilakukan dalam memperkuat ideologi negara yaitu dengan melakukan pemberdayaan komunitas, dengan menebarkan kembali semangat Pancasila khususnya pada generasi muda.

Kampung Pancasila di Kelurahan Pudak Payung dicanangkan kurang lebih 1 tahun lamanya. Upaya melanjutkan program Kampung Pancasila dalam internalisasi Pancasila dilakukan dalam berbagai cara, melalui pemberdayaan yang dilakukan dengan melibatkan tokoh masyarakat yang ada. Masyarakat Pudak Payung berkomitmen untuk terus berupaya meningkatkan kapasitas yang mereka punya dalam menginternalisasi nilai-nilai Pancasila dan mempraktikkan prinsip-prinsipnya dalam kehidupan sehari-hari. Menurut Jim Ife pemberdayaan berarti memberikan sumber daya, kesempatan, pengetahuan, dan keterampilan kepada masyarakat untuk meningkatkan kapasitas kemampuan dalam merancang atau menentukan masa depannya sendiri dan berpartisipasi dalam dan mempengaruhi kehidupan dari masyarakatnya (Ife, 1995:182).

Kampung Pancasila bukan hanya sebuah kampung yang masyarakatnya heterogen atau memiliki perbedaan agama, suku, etnis, dan lain sebagainya. Bukan pula, hanya tentang masyarakatnya yang toleran. Dalam penetapan Kampung Pancasila tentunya tidak dilakukan dengan asal, terdapat kriteria-kriteria atau ketentuan tertentu yang menjadi prasyarat ditetapkannya sebuah wilayah sebagai Kampung Pancasila. Tidak hanya itu, dalam pembentukan Kampung Pancasila di Kelurahan Pudak Payung terdapat sebuah proses yang dilakukan oleh para tokoh agama, tokoh masyarakat, dan seluruh elemen masyarakat untuk menyukseskan pencanangan dan program lanjutan yang dilakukan dalam proses internalisasi nilai dan memperkokoh posisi Pancasila sebagai ideologi. Maka berdasarkan pemaparan

tersebut penulis ingin mengkaji lebih dalam mengenai ketentuan dalam penetapan Kampung Pancasila, proses penetapan Kampung Pancasila di Kelurahan Puduk Payung dan proses pengembangan program yang dilaksanakan. Maka penulis tertarik mengambil judul *“Studi Tentang Penetapan Kelurahan Pudukpayung sebagai Kampung Pancasila di Kota Semarang”*

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan pada uraian latar belakang di atas, maka dalam penelitian ini dapat dirumuskan masalahnya sebagai berikut :

1. Apa kriteria penetapan sebagai Kampung Pancasila?
2. Bagaimana proses penetapan Kampung Pancasila di Kelurahan Pudukpayung Kota Semarang?
3. Bagaimana proses pengembangan program yang dilaksanakan oleh Kampung Pancasila di Kelurahan Pudukpayung Kota Semarang?

C. Tujuan Penelitian

Secara umum tujuan dari penelitian ini yaitu untuk memperoleh gambaran mengenai proses penetapan Kelurahan Pudukpayung sebagai Kampung Pancasila di Kota Semarang, secara terperinci tujuan penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui ketentuan penetapan di Kampung Pancasila.
2. Untuk mengetahui proses penetapan Kampung Pancasila di Kelurahan Pudukpayung Kota Semarang.
3. Untuk mengetahui proses pengembangan program yang dilaksanakan oleh Kampung Pancasila di Kelurahan Pudukpayung Kota Semarang.

D. Manfaat Penelitian

Dalam penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat yang luas baik secara teoritis maupun secara praktis, yang dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis
 - a. Diharapkan dari penelitian ini dapat dijadikan sebagai salah satu kontribusi pengembangan pada dunia riset dan penelitian di bidang sosiologi. Dengan menggambarkan proses penetapan Kelurahan Pudukpayung sebagai Kampung Pancasila di Kota Semarang.
 - b. Dapat menjadi sumbangan pemikiran untuk penelitian selanjutnya dengan tema yang berkaitan.
2. Manfaat Praktis
 - a. Bagi orang awam dan masyarakat, melalui penelitian ini diharapkan dapat memberikan pengetahuan atau informasi mengenai ketentuan,

proses penetapan dan program pengembangan yang ada pada Kampung Pancasila di Kota Semarang.

- b. Bagi pemerintah, melalui penelitian ini diharapkan dapat dijadikan acuan bagi pemerintah dalam program pencanangan Kampung Pancasila di wilayah-wilayah selanjutnya.
- c. Dapat memberikan wawasan dan pengalaman langsung kepada peneliti terkait dengan proses penetapan Kelurahan Pudukpayung sebagai Kampung Pancasila di Kota Semarang.

E. Tinjauan Pustaka

Telah banyak penelitian yang dilakukan oleh para ahli atau para sarjana mengenai pencanangan Kampung Pancasila. Setelah peneliti melakukan telaah terhadap beberapa jurnal dan penelitian sebelumnya, terdapat beberapa yang memiliki kesamaan atau keterkaitan dengan penelitian yang sedang peneliti lakukan. Maka, sebagai upaya mengembangkan kajian keilmuan peneliti menggunakan penelitian sebelumnya sebagai bahan referensi untuk melakukan penelitian selanjutnya. Terdapat beberapa literatur yang terkait dengan penelitian ini antara lain :

1. Kampung Pancasila

Kajian tentang Kampung Pancasila telah banyak dikaji oleh beberapa peneliti terdahulu antara lain : Manik (2021), Hasanah (2021), Rukmana (2020), Alfariz (2021), dan Wardani (2019). Manik (2021) fokus pada pentingnya peran masyarakat dalam upaya revitalisasi Pancasila. Peran masyarakat dalam revitalisasi Pancasila dilakukan dengan mengaitkannya pada nilai, budaya, dan kearifan lokal masyarakat setempat karena memanfaatkan modal sosial yang ada di desa. Berbeda dengan Hasanah (2021) membahas tentang fungsi dari program pembentukan Desa Pancasila sebagai bentuk identitas budaya kehidupan antar umat beragama. Ditemukan hasil penelitian tersebut yaitu pembentukan Desa Pancasila bertujuan agar masyarakat dapat mengimplementasikan nilai-nilai Pancasila sebagai upaya menghindari radikalisme dan disintegrasi bangsa. Melalui program yang dibuat, dimanfaatkan untuk mendorong kemajuan desa dengan berbasis potensi lokal.

Rukmana (2020) mengkaji tentang pengembangan nilai-nilai Pancasila dengan menerapkan gotong-royong, musyawarah, diskusi, dan kegiatan

sosial lainnya. Melalui kegiatan tersebut terbilang cukup efektif bagi pengembangan desa berbasis Pancasila, terbukti pada implementasi sikap masyarakat dalam kehidupan sehari-hari. Berbeda dengan Alfariz (2021) Kampung Pancasila merupakan cerminan masyarakat yang menjaga kearifan lokal dan toleransi berbasis pada nilai instrumental, nilai sosial, dan komitmen moral yang disepakati oleh masyarakat. Nilai, norma, sistem religi, dan kearifan lokal dijadikan sebagai penguat sikap toleransi, dengan menjadikan Pancasila sebagai ideologi pemersatu dalam kemajemukan yang ada. Wardani (2019) Desa Pancasila adalah miniatur Indonesia, yang didalamnya terdapat berbagai suku dan agama yang menjunjung tinggi nilai toleransi. Dimana adanya proses internalisasi nilai dan sosialisasi budaya yang baik dapat memunculkan sikap saling menghargai. Sikap toleransi tersebut yang menjadi kekuatan persatuan masyarakat, sehingga dapat mencerminkan budaya dan karakter bangsa.

2. Kota Semarang

Pembahasan mengenai Kota Semarang telah banyak dikaji oleh beberapa peneliti terdahulu antara lain : Sundaro (2019), Handayani (2018), Sumastuti (2021), Widiastuti (2019), Yesiana (2020). Sundaro (2019) fokus pada kajian pengembangan wilayah Kota Semarang dan ditemukan bahwa terdapat 11 sektor perekonomian yang merupakan sektor unggulan, sehingga setiap kebijakan yang akan diambil harus memfokuskan pada sektor unggulan tersebut. Berbeda dengan Handayani (2018), berfokus pada pengembangan pertanian di Kota Semarang yang bertujuan untuk memasok produk pertanian yang berkelanjutan, dimana fokus pada ketersediaan pangan sekaligus pengembangan ruang hijau yang semakin berkurang.

Sumastuti (2021) mengenai pengembangan wisata di Kota Semarang yang mana memiliki dampak positif bagi perkembangan ekonomi masyarakat dan daerah. Maka dalam pemberdayaan wilayah diperlukan keterlibatan stakeholder untuk memberikan pembinaan ke arah yang lebih maju. Widiastuti (2019) kajian tentang Kota Semarang yang berinovasi dalam program Kampung Tematik dan setiap program yang dijalankan memberikan dampak positif bagi perkembangan masyarakat. Berbeda dengan Yesiana (2020) yang mengkaji tentang program pengelolaan sampah yang digalakkan oleh pemerintah Kota Semarang yang melibatkan

masyarakat dengan tujuan mencegah terjadinya bencana di masa depan, kemudian masyarakat menjalani pelatihan yang bertujuan untuk memberikan pengetahuan terkait pengolahan sampah yang berkelanjutan.

Berdasarkan tinjauan pustaka diatas, terdapat perbedaan penelitian yang sedang dilakukan dengan penelitian terdahulu. Adapun perbedaannya yaitu peneliti lebih memfokuskan pada terbentuknya Kampung Pancasila di Kota Semarang khususnya di Kelurahan Pudak Payung. Peneliti akan lebih menggali mengenai ketentuan penetapan Kampung Pancasila, proses penetapan Kampung Pancasila, dan proses pengembangan terkait dengan program lanjutan di Kampung Pancasila yang akan ditinjau dengan teori pemberdayaan menurut Jim Ife.

F. Kerangka Teori

1. Definisi Konseptual

a. Kampung Pancasila

Kampung Pancasila dapat disebut sebagai desa yang multikultural, artinya warganya memiliki latar belakang yang berbeda atau heterogen, baik itu perbedaan dalam agama, kebudayaan, dan latar belakang anggota warganya. Kampung Pancasila adalah kampung atau desa yang dibangun dengan menerapkan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan. Tujuan dari hadirnya Kampung Pancasila yaitu masyarakat mampu menanamkan nilai-nilai Pancasila dan memperkuat karakter kaum muda untuk menjadi relawan yang menjadi stakeholder untuk membangun desa (Hasanah, 2021).

b. Kelurahan Pudakpayung

Kelurahan Pudakpayung merupakan adalah salah satu wilayah kelurahan yang masuk dalam Kecamatan Banyumanik Kota Semarang. Lokasi wilayah Kelurahan Pudakpayung berada di sebelah selatan Kota Semarang. Wilayah Kelurahan Pudakpayung sebelah utara berbatasan dengan Kelurahan Banyumanik, sebelah timur berbatasan dengan Kelurahan Gedawang, sebelah selatan berbatasan dengan Kabupaten Semarang, dan sebelah barat berbatasan dengan kecamatan Banyumanik. Luas wilayah Kelurahan Pudakpayung yaitu 392.963 km², yang terdiri dari 16 RW dan terbagi menjadi 144 RT. Total penduduk Kelurahan Pudakpayung yaitu 26.163 jiwa (Statistik, 2021).

2. Teori Pemberdayaan Jim Ife

a. Konsep Pemberdayaan Jim Ife

Konsep pemberdayaan menurut Jim Ife adalah “*empowerment means providing people with the resources, opportunities, knowledge and skills to increase their capacity to determine their own future, and to participate in and affect the life of their community*” (Pemberdayaan berarti memberikan sumber daya, kesempatan, pengetahuan, dan keterampilan kepada masyarakat untuk meningkatkan kapasitas dalam merancang atau menentukan masa depannya sendiri dan berpartisipasi dalam dan mempengaruhi kehidupan dari masyarakatnya (Ife & Tesoriero, 2008))

b. Asumsi Dasar

Teori pemberdayaan komunitas Jim Ife memiliki beberapa asumsi dasar. Dalam bukunya "Human Rights From Below", Ife menunjukkan bahwa hak asasi manusia dan pembangunan adalah dua istilah yang memiliki keterkaitan yang kuat. Hak asasi manusia tidak dapat berjalan dengan baik karena banyak pihak-pihak yang berkuasa “kaum berpunya” sehingga perlu adanya pembangunan. Masyarakat yang tidak memiliki kekuatan bisa saja masyarakat berada dalam kondisi miskin dan keterbelakangan, sehingga dengan kondisi tersebut menyebabkan ketidakberdayaan masyarakat karena tidak memiliki daya (*powerless*). Maka diperlukan adanya pemberdayaan, Ife menyebutkan pemberdayaan dilakukan dengan membangun kapasitas individu melalui penyediaan sumber daya, peluang, pengetahuan, dan keterampilan untuk meningkatkan kemampuan dan memfasilitasi kemajuan masyarakat (Ife & Tesoriero, 2008)

c. Istilah Kunci Teori Pemberdayaan Jim Ife

Gagasan pemberdayaan merupakan pusat bagi sebuah strategi keadilan sosial dan HAM. Tujuan utama pemberdayaan adalah meningkatkan keberdayaan dari mereka yang dirugikan (*disadvantaged*). Jim Ife menyebutkan dua konsep penting yaitu keberdayaan dan yang dirugikan (*disadvantaged*). Yang dirugikan merujuk pada ketidakberdayaan masyarakat karena masyarakat tidak memiliki kekuatan (*powerless*). Melalui ketidakberdayaan tersebut pemberdayaan menyiratkan pemberian kesempatan, sumber daya, pengetahuan, kosakata, dan keterampilan untuk membangun kapasitas

dalam diri sebagai bekal untuk memutuskan keputusan masa depan mereka sendiri. Pemberdayaan menjadi gagasan utama kerja masyarakat (Ife & Tesoriero, 2008).

Pemberdayaan ditekankan pada upaya memberdayakan masyarakat yang lemah yaitu mereka yang tidak memiliki sumber daya, miskin, dan tidak memiliki kemampuan untuk mengelola fasilitas-fasilitas produksi. Mereka yang lemah (*powerless*) namun memiliki keinginan untuk bekerjasama dengan kelompok, berusaha melakukan pemahaman terhadap kebutuhan dan bersedia melakukan kegiatan bersama (Zubaedi, 2013). Maka melalui partisipasi atau kemauan masyarakat untuk berkembang membangun kekuatan, disitulah secara tidak langsung akan membentuk penataan kehidupan sosial-ekonomi kearah yang lebih baik dan menguatkan masyarakat untuk memenuhi kebutuhannya secara lebih mandiri yang berbeda dengan kehidupan yang dialami sebelumnya.

G. Metode Penelitian

Metode penelitian merupakan inti dalam melakukan penelitian guna menentukan langkah-langkah yang akan dilakukan untuk tercapainya tujuan dari sebuah penelitian. Hal ini penting dilakukan dalam sebuah penelitian guna memperoleh hasil yang dapat dipertanggungjawabkan, metode-metode tersebut antara lain :

1. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Dalam pengamatan ini, peneliti menggunakan jenis penelitian lapangan (*field research*), dengan metode penelitian kualitatif dan pendekatan deskriptif. Jenis penelitian yang digunakan adalah lapangan (*field research*). Jenis penelitian lapangan (*field research*) merupakan penelitian atau studi terhadap kehidupan yang ada di masyarakat secara langsung, hal tersebut bertujuan untuk memahami karakteristik masyarakat tertentu secara fokus mendalam sehingga peneliti akan langsung terjun ke lapangan (Nugrahani, 2014).

Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif. Penelitian kualitatif merupakan metode penelitian yang digunakan untuk meneliti dan mempelajari kondisi yang alamiah yaitu kondisi dimana objek berkembang sebagaimana adanya, dan tidak dapat dimanipulasi oleh peneliti. Metode

kualitatif digunakan agar peneliti mendapatkan data yang lebih mendalam, mengeksplorasi serta memahami makna yang bersumber dari sebuah objek dengan apa adanya terhadap masalah-masalah sosial yang ada (Sugiyono, 2019).

Penelitian ini juga menggunakan pendekatan deskriptif bertujuan agar peneliti menekankan tentang catatan data yang telah dikumpulkan yaitu berupa angka, gambar, kata-kata dan bukan angka, sehingga dari data yang terkumpul memungkinkan peneliti mendapat informasi kunci (Khusumastuti, 2019). Dalam penelitian ini metode yang digunakan berdasarkan kondisi yang alamiah. Selain itu, fokus dari penelitian ini adalah gambaran deskriptif tentang proses penetapan Kampung Pancasila di Kelurahan Pudak Payung Kota Semarang. Kemudian peneliti akan menarik kesimpulan dari penelitian yang telah peneliti lakukan sesuai dengan data dan kondisi yang sebenarnya.

2. Sumber dan Jenis Data

Sumber data dalam penelitian adalah sebuah komponen yang sangat penting bagi peneliti, data penelitian pada dasarnya terdiri dari seluruh informasi atau bahan yang tersedia di alam, dicari, dikumpulkan dan dipilih oleh peneliti. Dalam menentukan jenis sumber data haruslah tepat, mendalam, dan layak sehingga permasalahan suatu topik penelitian dapat jabarkan secara rinci dan menyeluruh (Nugrahani, 2014).

a. Data Primer

Data primer merupakan data berupa teks hasil wawancara yang diperoleh dari wawancara dengan pihak informan yang dijadikan sebagai informan dalam penelitian dan melakukan observasi lapangan (Khusumastuti, 2019). Peneliti akan memberikan pertanyaan kepada pihak narasumber yang telah dipilih untuk menggali informasi secara akurat, tepat dan terbuka, guna memperoleh gambaran dan informasi terkait situasi dan kondisi lingkungan penelitian.

Peneliti akan melakukan wawancara dengan tokoh masyarakat, tokoh agama, dan anggota masyarakat Kelurahan Pudak Payung yang secara langsung ikut terlibat dalam proses penetapan Kampung Pancasila tersebut. Terkait dengan observasi yang

dilakukan yaitu peneliti akan melakukan pengamatan secara langsung mengenai kondisi dan kegiatan yang berlangsung di Kampung Pancasila Kelurahan Pudukpayung.

b. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang sudah tersedia dan dapat peneliti peroleh dengan membaca, melihat dan mendengarkan (Khusumastuti, 2019). Sumber data sekunder dapat berupa jurnal ilmiah, sumber dari arsip Kelurahan Pudukpayung, dokumen resmi, dokumen pribadi, rekaman, dan lain sebagainya yang digunakan sebagai penunjang kelengkapan data penelitian.

3. Teknik Pengumpulan Data

Pada penelitian ini, peneliti menggunakan tiga jenis teknik pengumpulan data yaitu sebagai berikut :

a. Wawancara/Interview

Metode wawancara atau interview dilakukan untuk memperoleh informasi dari berbagai informan terkait dengan penelitian yang dilakukan. Wawancara mendalam adalah teknik pengumpulan data yang memungkinkan peneliti memperoleh informasi data sebanyak, selengkap dan sedetail mungkin melalui percakapan dengan informan (Nugrahani, 2014).

Teknik pengambilan sampel yang digunakan dalam penelitian adalah *snowball*. *Snowball* merupakan teknik penentuan informan yang bermula dari jumlah kecil kemudian menggelinding hingga membesar. Pada penentuan informan pertama, peneliti akan memilih satu atau dua orang sebagai informan pertama. Hasil data yang diperoleh dari informan pertama tentunya belum cukup, sehingga melalui informan tersebut peneliti akan diarahkan untuk melakukan penggalian data lanjutan. Begitupun seterusnya, hingga jumlah informan semakin banyak dan dapat memenuhi kebutuhan peneliti dalam menggali informasi (Sugiyono, 2019). Peneliti memiliki satu informan kunci yaitu Bapak Trimakno sebagai wakil ketua pencanangan Kampung Pancasila. Adapun beberapa informan yang direkomendasikan oleh informan kunci dalam penelitian ini sebagai berikut :

Tabel 1
Daftar Informan Penelitian

No	Kriteria Pemilihan Informan	Informan
1.	Informan yang dipilih merupakan anggota pemerintahan yang memahami dan menangani langsung mengenai program Kampung Pancasila di Kota Semarang	a. Sekretaris Badan Kesbangpol Kota Semarang : Bapak Joko Hartono
2.	Informan dipilih berdasarkan keterlibatan dalam pembuatan program pencahangan Kampung Pancasila di Kelurahan Pudukpayung dan paham tentang kriteria Kampung Pancasila.	a. Ketua pencahangan Kampung Pancasila : Bapak Alex b. Ketua organisasi Kampung Pancasila : Ibu Agustinus Kristiawan c. Wakil ketua organisasi Kampung Pancasila : Bapak Marjuki d. Perwakilan Babinsa : Bapak Suparno
3.	Informan dipilih berdasarkan status sebagai tokoh agama yang aktif ikut terlibat saat pencahangan Kampung Pancasila dan dalam melanjutkan program penanaman nilai-nilai	b. Bapak Haji Surani b. Bapak Trimakno

	Pancasila kepada masyarakat Kelurahan Pudukpayung.	
4.	Informan yang dipilih termasuk dalam tokoh masyarakat yang paham akan sejarah dan dinamika masyarakat Kelurahan Pudukpayung. Hal tersebut dilakukan untuk mengetahui sejauh mana dampak yang dirasakan bagi perkembangan desa dan masyarakat.	a. Bapak Issamsudin
5.	Informan yang dipilih merupakan anggota masyarakat Kelurahan Pudukpayung yang ikut mengkoordinir jalannya pencahangan Kampung Pancasila dan terlibat dalam kegiatan kemasyarakatan yang ada. Adapun tujuan yaitu untuk mengetahui bagaimana anggota masyarakat saling bekerjasama dan dampak yang dirasakan bagi masyarakat itu sendiri.	a. Bapak Maryono

b. Observasi atau Pengamatan

Pengumpulan data melalui metode observasi perlu dilakukan agar peneliti dapat melakukan analisis dan pencatatan secara sistematis tentang tingkah laku masyarakat secara langsung, hal ini dilakukan guna mendapatkan gambaran yang luas mengenai masalah yang diteliti (Nugrahani, 2014). Dengan pengamatan yang dilakukan seluruh informasi yang di dapat, dicatat, dan direkam sehingga validitas data tentang visual objek dapat lebih mudah dipenuhi.

Observasi merupakan kegiatan pengumpulan data dasar dengan melakukan pengamatan dapat berupa reaksi seseorang terhadap suatu pertanyaan yang diajukan, tindakan, dan tidak hanya terbatas pada apa yang bisa ditangkap oleh indera (Khusumastuti, 2019). Pada penelitian ini akan dilakukan pengamatan sesuai dengan kondisi yang terjadi di lapangan yaitu proses pengembangan program yang dilaksanakan oleh KampungPancasila di Kelurahan Pudakpayung Kota Semarang.

4. Teknik Analisis Data

Penelitian ini akan menggunakan teknik analisis data metode induktif. Analisis data secara induktif dimulai dengan observasi, mengenai hal-hal yang khusus yaitu fakta konkrit yang terdapat di lapangan. Sehingga tiba pada temuan yang dapat ditarik kesimpulannya berupa teori yang sesuai dengan pola di dalam dunia nyata (Nugrahani, 2014).

Menurut Creswell (2010) analisis data dalam penelitian kualitatif adalah usaha peneliti dalam memaknai data, baik itu hasil data berupa teks maupun gambar yang dilakukan secara menyeluruh. Sehingga peneliti saat melakukan analisis data harus benar-benar menyajikan data dengan matang agar dapat dianalisis dan dipahami (Khusumastuti, 2019). Model analisis data yang akan digunakan peneliti dalam penelitian ini adalah analisis data model interaktif menurut Miles & Huberman (Nugrahani, 2014). Pada model interaktif ini, analisis data terdiri dari tiga komponen yaitu sebagai berikut :

1. Reduksi data

Dalam tahap ini peneliti akan melakukan proses pemilahan atau seleksi, pemusatan objek, penyederhanaan, dan pengabstraksian atas

seluruh jenis informasi yang diperoleh dan mendukung selama penggalian data dilapangan. Saat proses reduksi ini peneliti akan membuat catatan ringkas terkait isi dari data yang didapatkan. Langkah reduksi data ini yaitu mencari data, memusatkan tema, menetapkan batas permasalahan, serta menulis memo sehingga mendapatkan data yang valid sesuai dengan keadaan lapangan. Dalam hal ini peneliti mereduksi data yang berkenaan dengan proses penetapan Kampung Pancasila di Kelurahan Pudukpayung Kecamatan Banyumanik Kota Semarang.

2. Sajian Data

Sajian data adalah kumpulan informasi yang memungkinkan peneliti dalam menarik kesimpulan dan keputusan tindakan. Informasi yang telah didapat dalam bentuk deskripsi, narasi secara lengkap, dan dapat dilengkapi dengan gambar, tabel, skema, dan lain sebagainya kemudian disusun sesuai dengan pokok-pokok temuan yang ada di reduksi data tadi dan disajikan dengan menggunakan bahasa peneliti yang sistematis, logis dan mudah dipahami.

3. Penarikan Kesimpulan

Teknik ini merupakan akhir dari proses dari analisis data, penarikan simpulan dilakukan terhadap hasil dari analisis dan interpretasi data guna menemukan makna peristiwa yang sedang diteliti. Hal ini dilakukan saat peneliti mulai mencari data dan melakukan analisis dalam mengolah data yang telah didapat, dan terakhir adalah menarik kesimpulan dengan mencari makna yang terjadi di lapangan. Data yang telah diolah dan disajikan kemudian ditarik kesimpulan secara akurat sehingga dapat menjawab rumusan masalah secara akurat dan tepat sesuai dengan kondisi lapangan.

H. Sistematika Penulisan Skripsi

Sistematika penulisan memberikan kemudahan dalam pemahaman skripsi ini dan memberikan gambaran terkait penelitian yang diteliti. Dalam penyusunan skripsi, maka peneliti menyusun skripsi ini dalam VI bab, dengan penulisan sebagai berikut :

BAB I : Pendahuluan

Pada bab ini membahas terkait dengan latar belakang masalah yang akan diteliti, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian yang terdiri atas manfaat teoritis dan manfaat praktis, tinjauan pustaka, metode penelitian, kerangka teori, dan sistematika penulisan.

BAB II : Pemberdayaan Kampung Pancasila dan Teori Pemberdayaan Jim Ife

Bab ini akan membahas tentang konsep-konsep pemberdayaan masyarakat terkait dengan Kampung Pancasila dan teori pemberdayaan Jim Ife. Pada bab II ini akan terbagi menjadi dua sub tema yaitu (a) Pemberdayaan masyarakat melalui Kampung Pancasila dan (b) Teori pemberdayaan Jim Ife.

BAB III : Kampung Pancasila Kelurahan Pudukpayung Kecamatan Banyumanik Kota Semarang

Bab ini peneliti akan memaparkan gambaran umum Kelurahan Pudukpayung Kecamatan Banyumanik Kota Semarang yaitu terkait dengan kondisi geografis, kondisi topografis, dan kondisi demografis. Selanjutnya, akan dibahas mengenai profil Kampung Pancasila di Kelurahan Puduk Payung.

BAB IV : Ketentuan Penetapan Kampung Pancasila dan Proses Penetapan Kampung Pancasila di Kelurahan Pudukpayung

Bab ini akan membahas mengenai kriteria-kriteria dalam penetapan sebuah desa atau kampung untuk dapat menjadi Kampung Pancasila sesuai dengan ketentuan pemerintah. Disebutkan juga pada bab ini mengenai proses penetapan Kampung Pancasila di Kelurahan Pudukpayung Kota Semarang.

BAB V : Pengembangan Program Kampung Pancasila di Kelurahan Pudukpayung Kota Semarang

Pada bab ini akan membahas mengenai proses pengembangan Kampung Pancasila terkait dengan program lanjutan yang dilakukan oleh masyarakat di Kelurahan Pudukpayung dalam penanaman nilai-nilai Pancasila.

BAB VI: Penutup

Dalam bab ini berisi tentang kesimpulan dari serangkaian penulisan penelitian yang telah dilakukan sebagai jawaban atas rumusan masalah yang telah dibuat. Bab VI juga akan dituliskan saran bagi penelitian selanjutnya dengan tema terkait.

BAB II

KAMPUNG PANCASILA DAN TEORI PEMBERDAYAAN JIM IFE

A. Asumsi Dasar Pemberdayaan Masyarakat

1. Pemberdayaan Masyarakat

Pemberdayaan berasal dari kata “daya” yang memiliki arti “kemampuan”, dalam bahasa Inggris disebut dengan “*power*”. Pemberdayaan atau empowerment mengandung dua pengertian, yaitu *to give ability or enable to* (memberikan kemampuan, kecakapan, atau memungkinkan melakukan sesuatu) dan *to give power of authority to* (memberikan kekuasaan dengan tujuan masyarakat memiliki kemandirian untuk mengambil setiap keputusan). Maka pemberdayaan memiliki makna sebagai sebuah perencanaan, proses dan upaya mengokohkan atau menguatkan yang lemah dengan memberikan kemampuan ataupun kekuasaan. Pemberdayaan merupakan konsep yang hadir dari kebudayaan masyarakat Eropa sejak dekade 70-an dan terus berkembang hingga saat ini. Munculnya pemberdayaan pertama kali bersamaan dengan lahirnya banyak aliran-aliran yang berkembang pada saat itu seperti strukturalisme, neo marxis, dan aliran lainnya. Kemudian, mulai muncul di Indonesia terminologi pemberdayaan masyarakat pada tahun 1980-an yang dikenal sebagai program-program pemberdayaan yang diselenggarakan oleh Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) atau lembaga non pemerintah lainnya dengan tujuan mengurangi tingkat kemiskinan (Yunus, 2017).

Pemberdayaan merujuk pada paradigma pembangunan manusia, yaitu pembangunan yang berfokus pada individu atau rakyat sebagai proses pembangunan yang mendorong prakarsa masyarakat berakar dari bawah. Sasaran pemberdayaan yaitu memberikan kekuatan kepada kelompok yang lemah dimana individu tersebut tidak memiliki daya untuk hidup mandiri. Biasanya ketidakberdayaan individu atau kelompok yaitu dapat disebabkan karena kondisi internal (persepsi mereka sendiri) atau kondisi eksternal (ditindas oleh struktur sosial yang tidak berkeadilan). Menurut Mardiko dan

Soebiato, pemberdayaan merupakan sebuah proses berupa serangkaian kegiatan yang dirancang untuk memperkuat kemampuan dan keunggulan bersaing sebagai upaya mengoptimalkan keberdayaan kelompok yang lemah dalam masyarakat. Sebagai sebuah proses, merujuk pada kemampuan individu atau kelompok untuk berpartisipasi, mendapatkan kesempatan untuk mengakses sumber daya dan layanan yang dibutuhkan dengan tujuan memperbaiki kualitas hidup. Maka pemberdayaan dapat didefinisikan sebagai sebuah proses yang terstruktur atau terencana untuk meningkatkan skala daya guna dari objek yang diberdayakan (Hamid, 2018).

Pengertian pemberdayaan juga dikemukakan oleh World Bank (2001) yang menyatakan bahwa pemberdayaan sebagai upaya untuk memberikan kemampuan dan kesempatan pada kelompok lemah agar mampu dan berani untuk menyuarakan pendapat, gagasan, ide, kemampuan, dan keberanian untuk memilih sesuatu (metode, cara, konsep, tindakan yang akan diambil, dan lain sebagainya) yang terbaik bagi individu itu sendiri. Jadi pemberdayaan adalah proses meningkatkan kemampuan dan sikap kemandirian masyarakat (Handini, 2019).

Dalam buku Ulum dan Anggaini 2020 menyebutkan bahwa pemberdayaan sebagai sebuah proses memiliki dua kecenderungan yaitu :

- Pertama, kecenderungan utama, pemberdayaan menekankan pada sebuah proses memberikan atau mengalihkan sebagian kekuatan, kemampuan atau kekuasaan kepada masyarakat agar lebih mandiri dan berdaya
- Kedua, kecenderungan sekunder, pemberdayaan sebagai proses menstimulasi, memotivasi, dan mendorong individu agar memiliki kemampuan atau keberdayaan untuk menentukan sesuatu yang menjadi pilihan hidup melalui proses dialog.

Pemberdayaan masyarakat merupakan strategi dalam melakukan pembangunan yang berlandaskan pada asas kerakyatan. Upaya pemberdayaan akan diarahkan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat.

Maka dari itu, pemberdayaan diaktualisasikan melalui partisipasi masyarakat yang kemudian didampingi oleh lembaga tertentu atau pemerintah untuk mentransfer ilmu kepada kelompok masyarakat yang terorganisir (Yunus, 2017). Dapat disimpulkan bahwa pemberdayaan adalah upaya yang dilakukan untuk memberikan kekuatan atau daya kepada individu atau kelompok yang lemah dengan serangkaian kegiatan yang sistematis, dengan dibantu oleh lembaga pemerintah atau kelompok tertentu yang lebih mumpuni. Tujuannya agar individu atau kelompok ini memiliki kekuatan berupa sumber daya, pengetahuan, dan kesempatan untuk mengembangkan kehidupannya kearah yang lebih baik.

Istilah mengenai pemberdayaan masyarakat menjadi pusat perhatian dalam pembangunan yang dimulai pada tahun 1990-an. Hal tersebut disebabkan karena kegagalan konsep pembangunan berbasis pertumbuhan ekonomi yang menekankan pada aspek mikro. Tjokroaminoto (1996) menyebutkan bahwa keberhasilan paradigma pembangunan telah mencapai pertumbuhan ekonomi tinggi namun membawa berbagai macam akibat yang negatif. Model pembangunan berbasis pertumbuhan ini lebih bersifat linier yang artinya hanya mengutamakan kemajuan ekonomi saja, terdapat beberapa hal yang diabaikan sehingga pola pembangunan ini memiliki kelemahan pokok yaitu kegagalan institusi, kegagalan pasar, dan kegagalan kebijakan. Pembangunan ini hanya mengedepankan pembangunan ekonomi jangka pendek, sedangkan pembangunan sosial dan lingkungan yang berjangka panjang diabaikan. Disinilah menjadi perhatian bahwa pembangunan berbasis pertumbuhan mengabaikan upaya pembinaan kelembagaan dan kapasitas, kegagalan tersebut menjadikan konsep pembangunan pemberdayaan masyarakat menjadi sebuah alternatif ampuh untuk menuntaskan masalah-masalah terkait pembangunan (Suprpto, 2019).

Pemberdayaan masyarakat menurut perspektif pembangunan yaitu sebuah upaya dari proses pembangunan itu sendiri untuk mengubah individu atau masyarakat dari yang lemah menjadi individu atau

masyarakat yang lebih berdaya karena memiliki kekuatan berupa kemampuan (*empowerment*). Kemampuan (*empowerment*) yang dimiliki secara otomatis akan membentuk individu atau masyarakat yang memiliki jiwa kemandirian untuk bangkit dari kondisi yang sebelumnya kearah yang lebih baik. Maka dari itu, kegiatan pemberdayaan masyarakat merupakan kegiatan pembangunan manusia yang terencana dengan tujuan mengubah sikap, perbuatan atau perilaku melalui proses belajar secara berkelanjutan untuk mendapatkan keterampilan yang mumpuni. Proses belajar yang dilakukan tersebut pastinya terdapat *knowledge transferring* yang terjadi, pemindahan dapat berupa pengetahuan maupun keterampilan dari agent pemberdayaan kepada pihak yang lemah (*powerness*) baik individu maupun masyarakat (Suprpto, 2019).

Prinsip pemberdayaan masyarakat merupakan sebuah kebijakan atau pernyataan yang dibuat untuk dijadikan sebagai pedoman atau landasan pokok pada setiap kegiatan yang dilakukan atau pengambilan keputusan. Menurut Dahana dan Bhatnagar (1980) prinsip-prinsip pemberdayaan masyarakat yaitu mencakup (Handini, 2019) :

- a. **Minat dan kebutuhan**, yaitu pemberdayaan dilakukan dengan mengacu pada minat dan kebutuhan masyarakat. Sebelum dimulainya kegiatan pemberdayaan, hendaknya melakukan pengkajian secara mendalam terhadap minat dan kebutuhan individu atau masyarakat. Memfokuskan kebutuhan apa yang harus dipenuhi harus sesuai dengan ketersediaan sumber daya, minat dan kebutuhan prioritas dengan tujuan pemberdayaan berjalan secara efektif.
- b. **Organisasi masyarakat bawah**, yaitu pemberdayaan berjalan efektif apabila dalam pemberdayaan melibatkan organisasi masyarakat bawah, sejak dari keluarga atau kekerabatan.
- c. **Keragaman budaya**, yaitu pemberdayaan yang dilakukan harus disesuaikan dengan budaya lokal yang beragam. Hal tersebut bertujuan agar perencanaan pemberdayaan yang telah dibentuk

tidak menemui hambatan yang bersumber dari pihak internal. Tidak dapat dipungkiri bahwa setiap wilayah pastinya memiliki keragaman budaya, apabila perencanaan pemberdayaan dilakukan secara seragam rentan terjadi gesekan.

- d. **Perubahan budaya**, yaitu pada setiap kegiatan pemberdayaan akan berdampak pada perubahan budaya. Maka dari itu, setiap kegiatan pemberdayaan yang dilakukan harus hati-hati dan lebih bijak agar tidak menimbulkan kejutan budaya. Alangkah lebih baik apabila pemberdayaan dilakukan dengan memperhatikan nilai-nilai budaya lokal.
- e. **Kerjasama dan partisipasi**, yaitu pemberdayaan akan efektif apabila dapat menggerakkan partisipasi masyarakat agar selalu bekerjasama dalam melakukan program-program yang telah dirancang. Salah satu komponen penting dalam pemberdayaan yaitu bagaimana individu atau masyarakat tersebut secara konsisten menjalankan setiap program hingga tujuan tercapai.
- f. **Demokrasi dalam penerapan ilmu**, yaitu pemberdayaan yang dilakukan harus selalu memberikan kesempatan pada masyarakat untuk merelasikan setiap ilmu yang dimiliki, namun tetap sesuai dengan pedoman dalam penggunaan metode pemberdayaan. Kemudian setiap proses pengambilan keputusan tetap dilakukan secara bersama.
- g. **Belajar sambil bekerja**, yaitu pada setiap kegiatan pemberdayaan yang berlangsung masyarakat diupayakan dapat “bekerja sambil belajar” artinya mereka belajar dari setiap pengalaman yang telah dikerjakan. Maka pemberdayaan tidak sekedar penyampaian teori saja, tetapi harus memberikan kesempatan masyarakat untuk mencoba mempraktekkan secara nyata.
- h. **Penggunaan metode yang sesuai**, yaitu pemberdayaan dilakukan dengan metode yang disesuaikan dengan kondisi

wilayahnya seperti memperhatikan lingkungan fisik, ekonomi dan nilai sosial budaya. Dengan kata lain, tidak semua metode pemberdayaan cocok dengan kondisi sasaran.

- i. **Kepemimpinan**, yaitu setiap kegiatan pemberdayaan juga bertujuan untuk mengembangkan kepemimpinan dengan memanfaatkan pemimpin lokal untuk membantu proses pemberdayaan yang berlangsung agar berjalan efektif.
- j. **Spesialis yang terlatih**, yaitu pemberdayaan dilakukan dengan melibatkan penyuluh yang profesional dan mampu menangani setiap kegiatan-kegiatan khusus.
- k. **Segenap keluarga**, yaitu dengan menganggap bahwa keluarga sebagai kesatuan dari unit sosial akan berdampak pada kelancaran proses pemberdayaan dalam hal pengembangan, mendorong keseimbangan, pengelolaan, dan lain sebagainya.
- l. **Kepuasan**, yaitu pemberdayaan yang dilakukan harus tercipta sebuah kepuasan karena setiap tujuan tercapai dan dapat terwujud. Hal tersebut juga berpengaruh pada keikutsertaan masyarakat terhadap program pemberdayaan selanjutnya.

Kegiatan pemberdayaan harus terencana karena pemberdayaan merupakan sebuah upaya untuk memperbaiki kehidupan individu atau masyarakat. Maka dari itu, untuk mencapai hasil yang maksimal setiap kegiatan pemberdayaan harus terprogram dan terencana dengan baik, karena pemberdayaan dilakukan dengan sengaja oleh pihak-pihak tertentu untuk mengubah sikap dan perilaku individu atau masyarakat. Adapun tujuan dari pemberdayaan masyarakat yaitu (Suprpto, 2019) :

- a. Pemberdayaan bertujuan untuk membentuk individu atau masyarakat yang lebih mandiri baik dalam berpikir, bertindak dan mengendalikan setiap apa yang dilakukan.
- b. Pemberdayaan dilakukan dengan mencakup segala aspek kehidupan dengan tujuan untuk membebaskan kelompok

masyarakat dari adanya dominasi kekuasaan baik dalam bidang politik, ekonomi, maupun sosial budaya.

2. Kampung Pancasila

Kampung Pancasila dapat disebut sebagai desa yang multikultural, artinya warganya memiliki latar belakang yang berbeda atau heterogen, baik itu perbedaan dalam agama, kebudayaan, dan latar belakang anggota warganya. Kampung Pancasila adalah kampung atau desa yang dibangun dengan menerapkan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan. Tujuan dari hadirnya Kampung Pancasila yaitu masyarakat mampu menanamkan nilai-nilai Pancasila dan memperkuat karakter kaum muda untuk menjadi relawan yang menjadi stakeholder untuk membangun desa (Hasanah, 2021).

Istilah tentang Kampung Pancasila bukan suatu istilah yang baru di Indonesia. Istilah mengenai Kampung Pancasila merupakan bagian dari program pengembangan dan penataan dari desa yang tercantum pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia nomor 81 Tahun 2015 mengenai evaluasi perkembangan desa dan Kelurahan. Peraturan yang dibuat inilah menjadikan keberadaan Kampung Pancasila semakin kenal oleh masyarakat luas. Pembentukan Kampung Pancasila juga sebagai upaya nyata dalam upaya merevitalisasi nilai-nilai Pancasila sebagai ideologi negara, untuk kemudian diterapkan di setiap sisi masyarakat. Hadirnya Kampung Pancasila mulai famous pada tahun 2018. Kemendagri menetapkan bahwa Kampung Pancasila dijadikan sebagai kampung percontohan yang berkaitan dengan pengaktualisasian nilai-nilai Pancasila dalam lingkungan masyarakat (Rukmana, 2020)

Fungsi dari pembentukan Kampung Pancasila yaitu untuk mewujudkan masyarakat yang membumikan dan mencintai Pancasila. Kampung Pancasila dijadikan sebagai sarana untuk memupuk atau *refresh* kembali nilai-nilai religius, gotong-royong, nasionalisme, musyawarah, dan kemandirian dengan menjadikan Pancasila sebagai sumber rujukan. Seperti yang diketahui bahwa Pancasila merupakan

sumber dari nilai moral dasar, dasar hukum dan karakter bangsa yang mempunyai sifat fundamental yaitu memiliki kedudukan paling penting dan tinggi. Pancasila dijadikan sebagai tata urutan peraturan yang utama atau pusat dan menjadi dasar untuk peraturan yang dibawahnya. Nilai fundamental yang terkandung dalam Pancasila seperti nilai ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan dan keadilan. Nilai dasar tersebut adalah esensi dari sila-sila Pancasila yang memiliki sifat universal, sehingga dalam nilai dasar itu terkandung tujuan, cita-cita, dan nilai-nilai yang dianggap baik dan benar (Rukmana, 2020).

Istilah tentang Kampung Pancasila memiliki makna konsep Pancasila. Menurut John Rawls yang merupakan tokoh liberalis menyebutkan, Pancasila merupakan kerangka dasar sistem tata kelola masyarakat yang multikultural. Sistem tata kelola tersebut adalah sistem yang lestari dan berkelanjutan. Setiap sila pada Pancasila adalah kesepakatan komprehensif dari penerapan agama yang majemuk.

Berikut penjelasan mengenai makna sila Pancasila (Hasanah, 2021) :

1. Sila pertama mengandung makna dasar moral dan perilaku warga.
2. Sila kedua tentang dasar pergaulan kelompok yang majemuk dengan tujuan tercipta keadilan.
3. Sila ketiga adalah dasar kekeluargaan dan sistem gotong-royong untuk tujuan mengikat persatuan.
4. Sila keempat adalah dasar kepemimpinan dalam upaya meminimalisir terjadinya perbedaan pendapat.
5. Sila kelima memiliki tujuan berbangsa, bermasyarakat, dan bernegara yang berupaya menciptakan masyarakat berkeadilan untuk mencapai pembangunan dan kemajuan bangsa Indonesia.

B. Istilah Kunci Pemberdayaan Masyarakat Jim Ife

1. Konsep Pemberdayaan

Konsep pemberdayaan menurut Jim Ife adalah *“empowerment means providing people with the resources, opportunities, knowledge and skills to increase their capacity to determine their own future, and to participate in and affect the life of their community”* (Pemberdayaan berarti memberikan sumber daya, kesempatan, pengetahuan, dan keterampilan kepada masyarakat untuk meningkatkan kapasitas dalam merancang atau menentukan masa depannya sendiri dan berpartisipasi dalam dan mempengaruhi kehidupan dari masyarakatnya). Pemberdayaan menyiratkan tentang pemberian kesempatan, sumber daya, keterampilan, pengetahuan, dan kosa kata dengan tujuan untuk meningkatkan kapasitas mereka untuk dapat secara mandiri memutuskan masa depan sendiri. Melalui peningkatan kapasitas tersebut individu atau masyarakat dapat mengambil minat dan berdampak pada keberadaan masyarakat. Pemberdayaan adalah pusat dari gagasan-gagasan kerja masyarakat yang memperlihatkan peranan mereka dalam proses pemberdayaan (Ife & Tesoriero, 2008).

Pemberdayaan menurut Ife berkaitan dengan upaya meningkatkan kekuasaan kaum yang dirugikan, untuk melihat penyebab dari ketidakberdayaan masyarakat jangan hanya ditinjau dari apa yang membentuk kekuasaan, tetapi juga melihat sifat dari keadaan yang merugikan tersebut. Berikut ketimpangan yang sering terjadi di masyarakat yang menyebabkan ketidakberdayaan masyarakat (Ife & Tesoriero, 2008) :

m. Struktur yang Merugikan Primer

Tiga bentuk prinsip dari struktur yang merugikan pada masyarakat barat adalah kelas, gender dan ras/etnisitas. Ketiga struktur yang disebutkan kemudian merembet menyebabkan ketimpangan lainnya muncul, dapat diidentifikasi melalui isu sosial, masalah sosial, dan ketidaksetaraan yang hadir.

Ketimpangan tersebut seperti perbedaan kelas yang menyebabkan adanya penindasan, ketidaksetaraan gender, perbedaan ras dan etnis yang tergambar antara perbedaan masyarakat mayoritas terhadap minoritas, dan lain sebagainya.

n. Kelompok yang Dirugikan Lainnya

Terdapat kelompok lain yang dapat dikategorikan sebagai kaum yang dirugikan dan tidak termasuk dalam bagian dari korban struktur yang merugikan. Kelompok tersebut yaitu mencakup kelompok usia lanjut (manula), penyandang cacat (baik fisik maupun mental), kelompok yang terisolasi, kaum gay, dan kelompok yang hidup di daerah terpencil. Penyebab dari keadaan yang merugikan ini bukan disebabkan karena adanya penindasan atau sebagainya, tetapi disebabkan karena kondisi mereka yang telah lama berada di kondisi tersebut. Biasanya pada kelompok ini hampir tak terelakkan merugi berkelanjutan jika mereka berada pada kondisi miskin, perempuan atau pribumi.

o. Hal Pribadi yang Dirugikan

Pada faktor mengartikan bahwa manusia dapat juga dirugikan yang disebabkan oleh hal-hal yang bersifat pribadi. Contohnya yaitu karena faktor kematian, dukacita, persoalan pribadi dan keluarga (kesepian, perasaan malu, seksual, dan lain sebagainya).

Upaya pemberdayaan masyarakat didasari pada pemahaman tentang munculnya ketidakberdayaan masyarakat yang disebabkan masyarakat tersebut tidak mempunyai kekuatan (*powerless*). Berdasarkan hasil identifikasi Jim Ife, ia menyebutkan jenis-jenis kekuatan yang dimiliki oleh masyarakat yang dapat digunakan untuk memberdayakan mereka, sebagai berikut :

- a. Kekuatan atas pilihan pribadi, yaitu pemberdayaan dilakukan dengan memberikan kesempatan kepada diri sendiri atau

masyarakat untuk membuat keputusan dalam menentukan pilihan sendiri atau memilih kesempatan untuk mencapai hidup lebih baik.

- b. Kekuatan untuk menentukan kebutuhannya sendiri, yaitu pemberdayaan dilakukan dengan cara mendampingi masyarakat dalam merumuskan kebutuhannya sendiri. Hal tersebut mengisyaratkan bahwa masyarakat mempunyai akses untuk menjangkau kebutuhannya seperti pendidikan dan informasi.
- c. Kekuatan untuk bebas berekspresi, yaitu sejalan dengan gagasan pemberdayaan dalam perspektif post struktural. Pemberdayaan yang dilakukan dengan meningkatkan kapasitas masyarakat untuk bebas berekspresi di ruang publik.
- d. Kekuatan kelembagaan, yaitu jenis kekuatan yang digunakan dalam pemberdayaan dengan meningkatkan aksesibilitas masyarakat terhadap pendidikan, keagamaan, sistem kesejahteraan, media, dan lain sebagainya.
- e. Kekuatan atas sumberdaya, yaitu pemberdayaan dilakukan dengan tujuan meningkatkan sumber daya ekonomi atau sumberdaya non ekonomi (pendidikan, kesempatan pribadi, pekerjaan, pengalaman budaya, dan lain sebagainya).
- f. Kekuatan atas kebebasan reproduksi, pada kategori ini berhubungan erat dengan kekuatan atas pilihan pribadi dan kekuatan untuk bebas berekspresi. Pemberdayaan dilakukan dengan memberikan kebebasan untuk masyarakat menentukan proses reproduksinya sendiri.

Pemberdayaan berfokus pada kekuasaan atau kekuatan dan keadaan yang merugikan, masing-masing gagasan tersebut merupakan sentral. Begitupun dengan pemberdayaan, agar pemberdayaan tepat sasaran maka diperlukan strategi dalam pelaksanaannya. Pemberdayaan tidak semata hanya tentang memberi, tetapi juga menyangkut bagaimana menjadikan masyarakat termotivasi untuk berkembang. Banyak strategi

yang telah dikembangkan dan dijalankan untuk mencapai pemberdayaan masyarakat yang berhasil oleh para tokoh. Jim Ife menyebutkan dalam rangka mencapai pemberdayaan kelompok lemah dapat dilakukan dengan menggunakan tiga strategi yaitu perencanaan dan kebijakan, aksi sosial, dan peningkatan kesadaran dan pendidikan (Ife & Tesoriero, 2008).

2. Asumsi Dasar Pemberdayaan

Teori pemberdayaan komunitas Jim Ife memiliki beberapa asumsi dasar. Dalam bukunya "Human Rights From Below", Ife menunjukkan bahwa hak asasi manusia dan pembangunan adalah dua istilah yang memiliki keterkaitan yang kuat. Hak asasi manusia tidak dapat berjalan dengan baik karena banyak pihak-pihak yang berkuasa "kaum berpunya" sehingga perlu adanya pembangunan. Masyarakat yang tidak memiliki kekuatan bisa saja masyarakat berada dalam kondisi miskin dan keterbelakangan, sehingga dengan kondisi tersebut menyebabkan ketidakberdayaan masyarakat karena tidak memiliki daya (*powerless*). Maka diperlukan adanya pemberdayaan, Ife menyebutkan pemberdayaan dilakukan dengan membangun kapasitas individu melalui penyediaan sumber daya, peluang, pengetahuan, dan keterampilan untuk meningkatkan kemampuan dan memfasilitasi kemajuan masyarakat (Ife & Tesoriero, 2008).

Jim Ife membagi pandangannya mengenai pemberdayaan kedalam beberapa perspektif yaitu *pluralis*, *elitis*, *strukturalis*, dan *post strukturalis*. Pada setiap kategori memiliki perspektif yang berbeda dalam memandang pemberdayaan. Berikut penjelasan rinci mengenai keempat perspektif tersebut (Ife & Tesoriero, 2008) :

a. Perspektif Pluralis

Pada perspektif ini memandang pemberdayaan adalah suatu proses menolong individu atau kelompok yang dirugikan dan kurang beruntung untuk kemudian bersaing secara lebih efektif dengan kepentingan-kepentingan lain. Upaya tersebut dilakukan dengan

memberikan pembelajaran, menggunakan kemampuan dalam melobi, menggunakan media, memberikan pemahaman mengenai pemanfaatan sistem, melakukan aksi politik, dan lain sebagainya. Perspektif pluralis juga menekankan tentang tentang individu atau kelompok yang saling berkompetisi untuk merebut kekuasaan yang dapat berpengaruh. Kekuasaan muncul dari kapasitas seseorang yang mau terlibat dalam sistem yang kompetitif, memahami standar permainan dan mampu memanfaatkan tekanan dan pengaruh.

Perspektif pluralis memiliki keterkaitan dengan demokrasi, yang mana setiap individu diberikan kebebasan untuk menyatakan pendapatnya, memiliki kesempatan untuk ikut berpartisipasi, dan kekuasaan tidak berpusat pada satu individu saja tetapi dibagi rata kepada kelompok yang berkompetisi. Kesimpulan mengenai perspektif pluralis dalam memandang pemberdayaan yaitu upaya dalam mengajarkan individu atau kelompok tentang bagaimana bersaing dalam peraturan, melalui peningkatan kapasitas yang ada.

b. Perspektif Elite

Pada perspektif ini memandang bahwa pemberdayaan membutuhkan lebih dari memiliki kemampuan berkompetisi untuk kekuasaan politik, karena itu cenderung akan lebih menguntungkan mereka. Lebih dari itu pemberdayaan dilakukan dengan bergabung dengan kalangan elite dan berusaha untuk mempengaruhinya (contohnya seperti aktivis). Upaya yang dilakukan setelah bergabung yaitu membentuk aliansi dengan kaum elit, melakukan konfrontasi dan berupaya melakukan perubahan pada kalangan elite dengan tujuan membatasi kekuasaan kaum elite dalam memonopoli. Hal tersebut dilakukan karena mengingat masyarakat menjadi tidak berdaya dikarenakan adanya power dan kontrol dari kalangan elite tersebut.

c. Perspektif struktural

Pandangan struktural dalam melihat pemberdayaan yaitu tentang agenda yang jauh lebih menantang, apabila bentuk-bentuk ketimpangan atau struktur yang merugikan tersebut ditantang dan diatasi maka pemberdayaan dapat dilakukan secara lebih efektif. Tujuan dari pemberdayaan adalah dapat mencapai perubahan sosial lebih baik, hal tersebut dapat tercapai dengan melucuti struktur sosial yang mendominasi yang menyebabkan masyarakat tidak berdaya. Maka pemberdayaan dalam perspektif pluralis adalah suatu proses proses pembebasan, melakukan perubahan struktural secara fundamental dan berupaya untuk menghilangkan penindasan.

d. Perspektif post struktural

Pada perspektif ini memandang pemberdayaan masyarakat sebagai upaya menghargai adanya suatu subyektivitas dalam pemahaman realitas sosial, yang artinya bahwa berfokus pada cara kekuasaan yang dipahami, penggunaan bahasa, menguatkan relasi dan dominasi, definisi, akumulasi, bagaimana dikonstruksinya, dan pengalaman secara subjektif dari kekuasaan. Jadi, dapat dipahami bahwa titik tekan dari pemberdayaan menurut perspektif post struktural ada pada aspek pendidikan bukan pada suatu aksi. Pemberdayaan masyarakat dilakukan sebagai upaya mengembangkan pemahaman tentang perkembangan pemikiran baru dan analitis.

3. Strategi Pemberdayaan

Pertama, pemberdayaan melalui kebijakan dan perencanaan yang dilakukan dengan mengembangkan atau mengubah struktur dan lembaga yang dapat memberikan akses yang lebih adil atau sepadan terhadap sumberdaya dengan tujuan agar masyarakat dapat memanfaatkannya sebagai upaya meningkatkan taraf kehidupan ke arah yang lebih baik. Indikator lainnya yaitu berbagai layanan dan kesempatan untuk dapat berpartisipasi kehidupan masyarakat, menjadikan pemberdayaan lebih mudah dilakukan *Kedua*, pemberdayaan melalui

aksi sosial dan politik yaitu menekankan pada pentingnya perjuangan dan perubahan politik untuk meningkatkan kekuasaan yang lebih efektif. Aksi sosial dan politik diupayakan agar terbukanya akses politik, sehingga dengan terbukanya akses politik memungkinkan masyarakat untuk dapat berpartisipasi. Pada strategi ini menekankan pada pendekatan aktivis, dan berupaya untuk masyarakat dapat meningkatkan kekuasaan dengan melakukan aksi langsung. *Ketiga*, pemberdayaan dilakukan melalui pendidikan dan penyadaran. Fokus pada strategi ini yaitu pada pentingnya suatu proses edukatif sebagai upaya melengkapi masyarakat untuk meningkatkan keberdayaan mereka. Memberikan modal ilmu pengetahuan atau kemampuan yang terampil. Upaya meningkatkan kesadaran bertujuan untuk membantu masyarakat memahami struktur operasi, dan memberikan pendidikan atau proses edukatif bertujuan untuk bekal menuju perubahan yang efektif.

4. Proses Pemberdayaan

Pemberdayaan perlunya kegiatan merancang program yang disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat itu sendiri dan menginvestigasi akar dari permasalahan yang sedang dialami. Kemudian, dilakukan pelaksanaan dan evaluasi program pemberdayaan masyarakat apakah telah berjalan dengan efektif. Jim Ife (1997) menyebutkan upaya pemberdayaan harus dilakukan dengan tiga langkah yaitu *enabling*, *empowering*, dan *protecting* (Ife & Tesoriero, 2008).

Pemberdayaan dapat dilakukan melalui tiga arah upaya proses pemberdayaan masyarakat. *Pertama*, *enabling* yaitu pemberdayaan dilakukan dengan membangun terciptanya suasana iklim yang membuat potensi masyarakat tersebut berkembang. Jadi, setiap individu maupun masyarakat pastinya telah memiliki potensi maka perlunya membangkitkan kesadaran tersebut. Potensi-potensi yang ada pada masyarakat itu kemudian dimanfaatkan untuk melaksanakan pemberdayaan yang telah dirancang sebagai pendukung. *Kedua*,

empowering yaitu pemberdayaan dilakukan dengan memperkuat potensi atau daya yang dimiliki oleh masyarakat melalui aksi-aksi nyata yaitu pemberian pendidikan, pelatihan, sarana prasarana dan lain sebagainya. *Ketiga, protection* yaitu pemberdayaan berarti upaya melindungi masyarakat dari hal-hal yang dapat menyebabkan persaingan dan konflik. Maka perlu adanya aturan atau kesepakatan yang dibuat dengan jelas untuk mencegah terjadinya perpecahan.

C. Pemberdayaan Masyarakat dalam Perspektif Islam

Pemberdayaan merupakan bagian dari wilayah ketuhanan dan kemanusiaan. Dalam islam pemberdayaan merupakan sebuah perintah yang jelas untuk membangun kepedulian terhadap sesama, terutama pada masyarakat yang belum berdaya. Pemberdayaan adalah gerakan yang dilakukan tanpa henti sebagai upaya mencapai perubahan yang mengarah pada kehidupan yang lebih baik. Prinsip perubahan tertera dalam QS. Ar-Rad ayat 11 (Qur'an):

لَهُ مُعَقِّبَاتٌ مِّنْ بَيْنِ يَدَيْهِ وَمِنْ خَلْفِهِ يَحْفَظُونَهُ مِنْ أَمْرِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ لَا يُغَيِّرُ
مَا بِقَوْمٍ حَتَّىٰ يُغَيِّرُوا مَا بِأَنفُسِهِمْ وَإِذَا أَرَادَ اللَّهُ بِقَوْمٍ سُوءًا فَلَا مَرَدَّ لَهُ
وَمَا لَهُمْ مِّنْ دُونِهِ مَتَوِّ

Artinya : “Baginya (manusia) ada malaikat-malaikat yang selalu menjaganya bergiliran, dari depan dan belakangnya. Mereka menjaganya atas perintah Allah. Sesungguhnya Allah tidak akan mengubah keadaan suatu kaum sebelum mereka mengubah keadaan diri mereka sendiri. Dan apabila Allah menghendaki keburukan terhadap suatu kaum, maka tak ada yang dapat menolaknya dan tidak ada pelindung bagi mereka selain Dia”

Menurut Quraish Shihab pada ayat di atas memiliki arti bahwa manusia diminta agar selalu berusaha untuk meningkatkan kompetensi dan bekerja keras, guna mencapai kemandirian. Pada setiap perubahan yang akan dilakukan perlunya kesiapan mental untuk berubah. Maka mental yang kuat dan keinginan yang gigih

merupakan bekal bagi manusia untuk meraih perubahan ke arah yang lebih baik (Fatkhullah, 2023). Jadi pemberdayaan penting dilakukan untuk menciptakan kondisi dimana masyarakat mampu secara mandiri mengembangkan potensi yang ada untuk mencapai kesejahteraan, berdasar atas kemauan untuk melakukan perubahan yang bersifat positif baik dalam bentuk sikap, perilaku maupun kondisi kehidupan sosial.

Menurut Sany (2019) konsep pemberdayaan sangatlah sejalan dengan ajaran islam, dimana selain mengajarkan mengenai kepatuhan kepada Tuhan, pemberdayaan yang diajarkan yaitu agar setiap manusia memiliki perhatian kepada sesama. Berdasar pada dorongan mengubah diri menjadi lebih mandiri, dibutuhkan bantuan orang lain yang lebih memiliki daya, kemampuan, ataupun kekuasaan yang mumpuni untuk kemudian disalurkan kepada individu atau masyarakat yang lemah. Islam sangat mendukung dan menganjurkan bagi umatnya untuk saling tolong-menolong. Sejalan dengan semangat islam dalam program pemberdayaan masyarakat untuk menjadikan agama islam sebagai agama yang rahmatan lil'alamin, islam memiliki visi agar umatnya menjadi penyebar rahmat Allah.

Islam mendukung pelaksanaan pemberdayaan masyarakat dengan berpegang pada tiga prinsip utama, adapun tiga prinsip tersebut yaitu prinsip ukhuwah, ta'awun, dan persamaan derajat sebagai berikut (Sany,2019) :

a. Prinsip *Ukhuwah*

Ukhuwah dalam bahasa arab memiliki arti persaudaraan, yang mana pada prinsip ini lebih menekankan bahwa setiap mukmin merupakan saudara, meskipun tidak memiliki ikatan darah diantara mereka. Rasa persaudaraan yang dibangun akan menumbuhkan rasa empati dan merekatkan silaturahmi dalam masyarakat.

b. Prinsip *Ta'awun*

Prinsip *ta'awun* merupakan prinsip utama yang penting diterapkan dalam pemberdayaan masyarakat. Hal ini sejalan

dengan konsep pemberdayaan masyarakat dimana terdapat upaya untuk memberdayakan orang lain. Upaya pemberdayaan tersebut dimulai dari menumbuhkan rasa kepedulian dan niat menolong individu atau masyarakat yang membutuhkan.

c. Prinsip Persamaan Derajat Antar Manusia

Islam tidak pernah mengajarkan tentang adanya perbedaan kasta atau derajat. Islam tidak membeda-bedakan derajat suatu kaum hanya dari perbedaan ekonomi, jabatan, kekuasaan, dan lain sebagainya. Maka pada prinsip ini Allah menyerukan tentang persamaan derajat.

D. Implementasi Teoritis Pemberdayaan Jim Ife

Jim Ife memberikan pemahaman bahwa pemberdayaan dilakukan dengan memberi kemampuan individu atau masyarakat untuk membuat keputusan sendiri, berpartisipasi aktif, dan memberikan dampak pada aspek kehidupan. pemberdayaan dilakukan dengan pemberian kekuatan berupa sumber daya, kekuatan, pengetahuan dan kesempatan kepada individu atau masyarakat untuk menentukan masa depannya. Pandangan Jim Ife mengenai konsep pemberdayaan yang ditinjau dalam berbagai perspektif yaitu pluralis, elite, struktural, dan post struktural sendiri (Ife & Tesoriero, 2008). Proses pemberdayaan yang dilakukan di Kampung Pancasila Kelurahan Pudakpayung sesuai dengan pengertian perspektif tersebut.

1. pemberdayaan masyarakat ditinjau dari perspektif pluralis yaitu menekankan pada kebebasan untuk menyampaikan pendapat, memiliki kesempatan untuk berpartisipasi aktif, kekuasaan yang ada tidak berfokus pada kelompok tertentu. Sejalan dengan Kampung Pancasila implementasi nilai-nilai Pancasila secara nyata diwujudkan dalam perpektif pluralis ini yaitu pada sila pertama ada pada keberagaman agama seperti 6 agama dan 1 aliran kepercayaan yang dianut oleh masyarakat Kelurahan Pudakpayung, sila ke dua menunjukkan sikap toleransi yang ada di Kelurahan Pudakpayung terbukti pada kondisi masyarakat Pudakpayung yang saling berdampingan dan harmonis, sila ke 3

yaitu diwujudkan menghormati hak setiap hak untuk berpartisipasi dan terhindar dari diskriminasi sesuai dengan kondisi Kampung Pancasila di Kelurahan Pudukpayung seluruh masyarakat dituntut untuk ikut berpartisipasi dalam setiap kegiatan yang dilakukan, seperti pembentukan struktur organisasi Kampung Pancasila dan program lanjutan Kampung Pancasila, sila ke 4 yaitu kegiatan musyawarah dilakukan dalam setiap Keputusan yang akan diambil seperti yang telah dilakukan yaitu diskusi lanjutan program Kampung Pancasila yang telah dilaksanakan, sila ke 5 yaitu berfokus pada kesetaraan antar masyarakat dimana menurut data yang ada dengan keberagaman agama, suku, etnis yang ada dapat memperlihatkan kerjasama yang baik dan partisipasi yang aktif. Terbukti pada ada struktur organisasi yang dibentuk tidak hanya fokus pada kekuasaan atau golongan tertentu, tetapi merekrut masyarakat yang memiliki kemampuan lebih dalam memimpin dan mengembangkan program kegiatan tanpa memandang latar belakang.

2. Pemberdayaan masyarakat ditinjau dari perspektif elitis yaitu pemberdayaan dilakukan dengan menggabungkan kekuatan kaum elite untuk bekerjasama dalam mencapai perubahan. Contoh implementasi pemberdayaan masyarakat dari perspektif elitis dilakukan melalui program-program yang melibatkan para elitis dan memberikan akses kepada masyarakat untuk memperoleh manfaat dari program tersebut. Hal tersebut sesuai dengan kondisi pemberdayaan Kampung Pancasila di Kelurahan Pudukpayung yang bekerjasama dengan Kodim 0733 Semarang, BABINSA, Kecamatan Banyumanik, dan pihak-pihak yang berwenang di Kelurahan Pudukpayung yang memiliki wewenang serta kemampuan lebih untuk ikut bekerjasama dalam upaya memberdayakan Kampung Pancasila tersebut. Misalnya pihak kodim 0733 yang melakukan kegiatan sosialisasi ke pesantren untuk memberikan pendidikan mengenai implementasi nilai-nilai Pancasila kepada kaum remaja.
3. Pemberdayaan masyarakat ditinjau dari perspektif struktural yaitu proses pembebasan dengan melakukan perubahan struktural dan

berupaya menghilangkan penindasan. Kaitannya dengan penelitian ini yaitu pembentukan Kampung Pancasila dilakukan sesuai atas arahan dari Kodim 0733 Kota Semarang yang dibantu oleh BABINSA, sehingga mereka melindungi secara penuh proses pengembangan Masyarakat melalui pendidikan, pembagian buku, diskusi, kegiatan pagelaran yang telah berlangsung dan menghindari adanya ketidakadilan yang mungkin terjadi di wilayah Kelurahan Pudukpayung.

4. Pemberdayaan masyarakat ditinjau dari perspektif post- strukturalis yaitu proses pemberdayaan dilakukan dengan menekankan pada intelektualitas dari pada tindakan, aktivitas, atau praksis sehingga akan menciptakan transformasi ide, gagasan dan cara berfikir. Kaitan penelitian ini dengan Kampung Pancasila adalah peran organisasi dalam memberikan pemahaman dalam penanaman nilai-nilai Pancasila melalui sosialisasi, kegiatan pagelaran, diskusi, kegiatan gotong-royong dan pembagian buku penerapan nilai-nilai Pancasila. Pemberian pendidikan ini tidak hanya sekedar memahami secara teori saja, tetapi harus ada pengakaran di masyarakat. Maka *ouput* yang dihasilkan yaitu lebih memaknai, memahami, dan kemudian menerapkan.

Teori pemberdayaan Jim Ife merupakan teori yang relevan dalam menganalisis pembentukan Kampung Pancasila di Kelurahan Pudukpayung, tentang bagaimana proses penetapan Kampung Pancasila dan proses pengembangan program lanjutan yang dilakukan di Kampung Pancasila Kelurahan Pudukpayung. Berdasarkan teori pemberdayaan Jim Ife, peneliti dapat mengetahui sejauh mana proses penanaman nilai Pancasila dan upaya yang dilakukan untuk mencapai tujuan dengan menjadikan masyarakat Kampung Pancasila memiliki pemahaman mengenai Pancasila dan dapat menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari.

BAB III

PROFIL KAMPUNG PANCASILA KELURAHAN PUDAKPAYUNG

A. Gambaran Umum Kelurahan Puduk Payung

Pada bab ini peneliti akan menguraikan terkait dengan kondisi wilayah penelitian seperti kondisi geografis, topografi, demografi dan lain sebagainya. Hal tersebut dilakukan agar dapat memberikan gambaran terkait dengan lokasi penelitian yang sedang diteliti.

1. Kondisi Geografis Kelurahan Pudukpayung

Pada kondisi geografis ini peneliti akan menguraikan mengenai letak geografis dan luas wilayah.

a. Letak Geografis

Kelurahan Puduk Payung merupakan salah satu dari 11 (sebelas) kelurahan yang termasuk kedalam wilayah Kecamatan Banyumanik Kota Semarang. Lokasi Kelurahan Puduk Payung berada di sebelah selatan Kota Semarang dengan luas wilayah 392.963 km² dan merupakan salah satu wilayah kelurahan yang paling luas wilayahnya di Kecamatan Banyumanik tersebut dengan prosentase 15,34% dari luas kecamatan. Jarak Kelurahan Puduk Payung menuju Ibu Kota Semarang yaitu berjarak 7 km. Pada Kelurahan Puduk Payung terdiri dari 16 RW (Rukun Warga) dengan jumlah 144 RT (Rukun Tetangga) dengan total penduduk sebanyak 26.163 jiwa. Kelurahan Puduk Payung memiliki batas wilayah administrasi sebagai berikut :

1. Sebelah Utara : Berbatasan dengan Kelurahan Banyumanik
2. Sebelah Timur : Berbatasan dengan Kelurahan Gedawang
3. Sebelah Selatan : Berbatasan dengan Kabupaten Semarang
4. Sebelah Barat : Berbatasan dengan Kecamatan Gunungpati

Secara visual Kelurahan Puduk Payung dapat dilihat wilayah administrasi dalam peta sebagaimana gambar berikut ini :

Gambar 1
Peta Wilayah Kecamatan Banyumanik Kota Semarang

PETA ADMINISTRASI KECAMATAN BANYUMANIK



Sumber :

<https://pudakpayung.semarangkota.go.id/en/geografisdanpenduduk>

Lokasi Kelurahan Pudukpayung merupakan wilayah yang strategis, hal tersebut dikarenakan wilayah Pudukpayung kemudahan akses kendaraan karena lokasi yang dekat dengan jalan utama. Tidak hanya itu, jarak wilayah Kelurahan Pudukpayung dengan pusat pemerintahan juga terbilang cukup dekat, sehingga memudahkan masyarakat untuk melakukan mobilisasi apabila terdapat keperluan yang mengharuskan masyarakat untuk mendatangi pusat pemerintahan. Berikut jarak Kelurahan Pudukpayung dari pusat pemerintahan :

1. Jarak dari Kecamatan Banyumanik : 4,70 km
2. Jarak dari Pemerintahan Kota Semarang : 18,00 km
3. Jarak dari Ibu Kota Kabupaten Semarang : 18 km
4. Jarak dari Ibu Kota Provinsi Jawa Tengah : 18 km

b. Luas Wilayah Menurut Penggunaan

Dengan luas wilayah di Kelurahan Pudak Payung yaitu 392.963 km² yang dibagi berdasarkan pada jenis tanah yaitu tanah sawah dan tanah kering. Berikut rincian penggunaan penggunaan secara lebih jelas pada tabel di bawah ini :

Tabel 2
Luas Wilayah Tanah Menurut Penggunaan

No	Jenis Tanah	Luas/Ha
1	Luas Tanah Sawah	1,00
2	Luas Tanah Kering	392,43
Total		393,43

Sumber : Data Badan Statistik Pusat Statistik Kota Semarang Tahun 2018

Berdasarkan tabel diatas menunjukkan bahwa, mayoritas penggunaan tanah di Kelurahan Pudak Payung adalah tanah kering. Yang mana jumlah tersebut sangat jauh berbeda dengan jumlah luas tanah sawah. Dari data di atas dapat dipaparkan mengenai penggunaan tanah secara lebih rinci, yaitu sebagai berikut :

Tabel 3
Tanah Sawah

No	Penggunaan	Luas/Ha
1	Irigasi	0,00
2	Irigasi Setengah Teknis	0,00
3	Tadah Hujan	0,50
4	Tanah Sawah Lainnya	0,00
5	Tanah Sawah Tidak Diusahakan	0,00

Sumber : Data Badan Statistik Pusat Statistik Kota Semarang Tahun 2018

Tabel 4
Tanah Kering

No	Penggunaan	Luas/Ha
1	Pekarangan/Bangunan	316,30
2	Tegal/Kebun	64,50
3	Tanah Gembala/Padang Rumput	0,00
4	Hutan	0,00
5	Lainnya	12,00

Sumber : Data Badan Statistik Pusat Statistik Kota Semarang
Tahun 2018

Melalui tabel tersebut dapat diketahui bahwa wilayah Kelurahan Pudakpayung dominan dalam penggunaan tanah kering yang digunakan sebagai pekarangan atau bangunan dengan luas 316,50 Ha. Berbanding jauh dengan penggunaan tanah sawah yang digunakan sebagai tadah hujan hanya seluas 0,50 Ha. Hal tersebut menunjukkan bahwa wilayah Kelurahan Pudakpayung didominasi oleh pekarangan atau bangunan.

Menurut penelitian yang dilakukan oleh Fajeri, dkk tahun 2017 tentang perkembangan permukiman dan perubahan nilai tanah di Kecamatan Banyumanik menunjukkan bahwa perkembangan pemukiman dengan tingkat pertumbuhan tertinggi ada di wilayah Kelurahan Pudak Payung. Hasil dari data yang diperoleh menunjukkan pada tahun 2011 hingga 2013 penggunaan lahan meningkat sebesar 46,721 ha, dan di tahun 2013 hingga 2016 penggunaan lahan meningkat sebesar 69,944 ha (Fajeri, 2017). Maka dapat disimpulkan bahwa penggunaan tanah kering di Kelurahan Pudakpayung didominasi oleh pekarangan/pemukiman.

2. Kondisi Topografis Kelurahan Pudak Payung

Kota Semarang memiliki dua bagian kawasan yaitu kawasan Semarang Bawah dan Kawasan Semarang Atas, yang mana dari kedua

bagian tersebut tentunya memiliki fungsi yang berbeda. Kelurahan Pudak Payung merupakan wilayah yang termasuk bagian kawasan Semarang Atas, jika digeneralkan kawasan Semarang Atas memiliki fungsi sebagai penyangga Semarang Bawah karena di daerah tersebut masih terdapat banyak lahan hijau sebagai pelindung guna mengantisipasi agar Semarang Bawah tidak terjadi bencana banjir.

Ketinggian wilayah Kelurahan Pudak Payung yaitu 300 meter di atas permukaan laut, yang terdiri dari dataran tinggi yang berbukit-bukit. Adapun temperatur udara pada wilayah Kelurahan Pudak Payung yaitu ada pada angka rata-rata 20-30 derajat, sehingga dapat dikatakan dengan suhu tersebut terbilang relatif sejuk. Hal tersebut juga didukung dengan letak wilayah Kelurahan Pudak Payung yang dekat dengan Gunung Ungaran Kabupaten Semarang.

Tingkat kemiringan tanah rata-rata di wilayah Kelurahan Pudak Payung berdasarkan pemetaan google earth, terlihat bahwa kemiringan lahan berkisar antara 12-20%. Menurut hasil standar perhitungan dengan angka tersebut tergolong ke dalam agak curam, hasil nilai adalah 60. Adapun perhitungan dari aspek curah hujan dengan nilai 30, yang mana perhitungan tersebut dilihat melalui data 30 tahun ke belakang dengan rata-rata sebesar 26 mm/hari. Untuk perhitungan tingkat erosivitas yang ada di wilayah Pudak Payung, tergolong ke dalam kurang peka dengan perolehan nilai 30. Kemudian apabila di total seluruh nilai untuk penetapan fungsi kawasan mencapai angka 120, sehingga dapat disimpulkan bahwa Kelurahan Pudak Payung termasuk kedalam wilayah yang memiliki kondisi kemiringan lahan agak curam yang mana kondisi tersebut menyebabkan wilayah tersebut rawan terjadi longsor (Khadiyanto & Winarendri, 2018). Berikut gambaran kondisi kemiringan lahan rata-rata di Kelurahan Pudakpayung :

Gambar 2
Kondisi Kemiringan Lahan di Kelurahan Pudak Payung



Sumber : (Khadiyanto & Winarendri, 2018)

3. Kondisi Demografis Kelurahan Pudakpayung

a. Jumlah Penduduk

Kecamatan Banyumanik Kota Semarang terbagi menjadi 11 Kelurahan dengan Kelurahan Pudakpayung sebagai kelurahan terluas yaitu 392,93 Ha atau 15,34% dari luas kecamatan. Berdasarkan hasil rekapitulasi data pada tahun 2022 tercatat sebanyak 26.163 jiwa, dengan rincian jumlah penduduk laki-laki sebanyak 13.156 jiwa dan jumlah penduduk perempuan adalah 13.007 jiwa. Berikut rekapitulasi penduduk di Kelurahan Pudakpayung Kecamatan Banyumanik Kota Semarang :

Tabel 5
Jumlah Persebaran Penduduk Setiap RW di Kelurahan Pudakpayung Tahun 2022

No	RW	Jumlah RT	Jumlah Penduduk
1.	RW 01	17	2.992
2.	RW 02	12	2.240
3.	RW 03	6	1.710
4.	RW 04	10	2.225

5.	RW 05	9	1.791
6.	RW 06	19	3.632
7.	RW 07	8	1.654
8.	RW 08	12	1.024
9.	RW 09	8	1.505
10.	RW 10	9	1.636
11.	RW 11	13	1.969
12.	RW 12	9	995
13.	RW 13	10	630
14.	RW 14	6	697
15.	RW 15	5	961
16.	RW 16	8	502
Jumlah Keseluruhan Penduduk			26.163

Sumber : Dokumen Kelurahan Pudakpayung tahun 2023

Berdasarkan tabel jumlah persebaran penduduk di Kelurahan Pudakpayung pada setiap RW, diketahui bahwa jumlah penduduk terbanyak ada pada RW 06 dengan jumlah 3.632 jiwa yang tersebar ke dalam 19 RT. Selanjutnya adalah RW 01 dengan jumlah penduduk yaitu 2.992 jiwa dan penduduk terbanyak ke 3 yaitu ada di RW 02 dengan jumlah penduduk 2.240 jiwa.

b. Jumlah Usia Penduduk Kelurahan Pudak Payung

Menurut data yang telah diperoleh menunjukkan bahwa jumlah penduduk laki-laki lebih dominan atau lebih banyak dibandingkan jumlah penduduk berjenis kelamin perempuan. Data berikut akan menunjukkan urutan usia jumlah penduduk dari 0-75 tahun keatas :

Tabel 6
Jumlah Penduduk Berdasarkan Usia

No.	Usia/Tahun	Jumlah	Persentase
1.	0-4 tahun	1.145	4,0%
2.	5-9	1.862	7,1%
3.	10-14	1.990	7,6%
4.	15-19	2.078	7,9%
5.	20-24	2.066	7,9%
6.	25-29	1.924	7,4%
7.	30-34	1.806	6,9%
8.	35-39	1.913	7,3%
9.	40-44	2.415	9,2%
10.	45-49	2.303	8,8%
11.	50-54	2.116	8,1%
12.	55-59	1.623	6,2%
13.	60-64	1.147	4,4%
14.	65-69	820	3,1%
15.	70-74	451	1,7%
16.	>75	504	1,9%
Jumlah		26.163	100%

Sumber : Dokumen Kelurahan Pudukpayung tahun 2023

Berdasarkan data di atas dapat diketahui bahwa jumlah penduduk di Kelurahan Pudukpayung didominasi oleh usia 40-44 tahun dengan persentase 9,2%, kemudian untuk jumlah penduduk terbanyak kedua yaitu ada di umur 45-49 tahun dengan persentase 8,8%. Pada wilayah Kelurahan Pudukpayung jumlah penduduk paling sedikit yaitu ada di usia 70-74 dengan persentase 1,7%.

Menurut data diatas dapat diketahui bahwa mayoritas masyarakat Kelurahan Pudakpayung berusia produktif yaitu dalam rentan usia 15-65 tahun.

c. Tingkat Pendidikan Kelurahan Pudak Payung

Pendidikan adalah salah satu sarana dalam upaya mencerdaskan kehidupan bangsa serta mengatasi keterbelakangan masyarakat dalam segala aspek kehidupan. Adanya pendidikan diharapkan dapat mencapai kemajuan pada bidang peningkatan kesejahteraan masyarakat di Kelurahan Pudak Payung, karena pada dasarnya pendidikan merupakan salah satu modal utama dalam membawa sebuah perubahan karena dijadikan sebagai sumber daya itu sendiri. Berikut data tingkat pendidikan masyarakat Kelurahan Pudak Payung :

Tabel 7
Tingkat Pendidikan Masyarakat Kelurahan Pudak Payung

No.	Tingkat Pendidikan	Jumlah	Persentase
1.	Tidak/Belum Sekolah	5.592	21,85%
2.	Belum Tamat SD/Sederajat	4.180	16,33%
3.	Tamat SD/Sederajat	903	3,53%
4.	SLTP/Sederajat	2.795	10,92%
5.	SLTA/Sederajat	7.691	30,05%
6.	Diploma III	82	0,32%
7.	Akademis/Diploma	1.166	4,58%
8.	Diploma IV/Strata I	2.905	11,35%
9.	Strata II	268	1,05%
10.	Strata III	14	0,05%

Sumber : Dokumen Kelurahan Pudakpayung tahun 2023

Tabel diatas menunjukkan bahwa tingkat pendidikan masyarakat di Kelurahan Pudak Payung sudah maju, meskipun

terdapat beberapa warga yang hanya tamat lulusan SD dengan jumlah 903 jiwa. Namun melihat tingkat pendidikan dengan lulusan SMA atau SLTA cukup tinggi dengan jumlah 7.691 jiwa, sesuai dengan anjuran pemerintah bahwa pendidikan yang ditempuh minimal 12 tahun. Tidak hanya itu, melihat jenjang yang lebih tinggi yaitu Diploma III hingga Strata III juga mencapai jumlah yang signifikan. Maka dapat disimpulkan bahwa di Kelurahan Pudak Payung sudah melek akan pendidikan dan menganggap bahwa pendidikan sebagai komponen penting dalam upaya peningkatan kualitas dan sumber daya manusia.

d. Jenis Mata Pencaharian Kelurahan Pudak Payung

Mata pencaharian atau pekerjaan adalah suatu aktivitas yang dilakukan oleh seseorang atau masyarakat dengan memanfaatkan sumber daya yang dimiliki dengan tujuan mendapatkan penghasilan untuk memenuhi kebutuhan hidup. Masyarakat Kelurahan Pudak Payung merupakan masyarakat yang majemuk, hal tersebut ditandai dengan beragamnya jenis pekerjaan yang dimiliki. Di bawah ini terdapat data yang menunjukkan jenis mata pencaharian atau pekerjaan masyarakat Kelurahan Pudak Payung, sebagai berikut :

Tabel 8
Jenis Mata Pencaharian Masyarakat Kelurahan Pudakpayung

No.	Jenis Pekerjaan	Jumlah
1.	Pensiunan	233
2.	Kepolisian	126
3.	Buruh Harian Lepas	166
4.	Pedagang	82
5.	Pegawai Negeri Sipil	943
6.	Karyawan Swasta	6.414
7.	Buruh Tani/Perkebunan	700

8.	Wiraswasta	1.260
9.	Pelajar/Mahasiswa	5.027
10.	TNI	815
11.	Karyawan BUMN	173
12.	Guru	206
13.	Belum/Tidak Bekerja	6.340
14.	Akumulasi Pekerjaan Lainnya	410
15.	Mengurus Rumah Tangga	3.187
16.	Lainnya	410
Jumlah		26.163

Sumber : Dokumen Kelurahan Pudakpayung tahun 2023

Pada masyarakat Kelurahan Pudak Payung merupakan masyarakat yang heterogen, terlihat pada masyarakatnya yang beragam dan memiliki latar belakang yang berbeda. Apabila dilihat melalui jenis pekerjaan pada tabel di atas, terdapat 16 pekerjaan yang berbeda.

e. Komposisi Penduduk Berdasarkan Agama Kelurahan Pudak Payung

Agama atau aliran kepercayaan adalah sebuah keyakinan kepada Tuhan Yang Maha Esa yang dianut atau dimiliki oleh setiap orang. Indonesia mengakui 6 agama yang disahkan, namun di Indonesia pula banyak aliran kepercayaan yang tumbuh karena pengaruh budaya yang ada sebagai warisan meskipun tidak tercatat dan diakui secara resmi. Berdasarkan data yang diperoleh pada tahun 2022 terdapat 6 agama dan 1 aliran kepercayaan yang dianut oleh masyarakat Kelurahan Pudak Payung dengan total jumlah penganut agama adalah 26.163, dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 9
Komposisi Penduduk Berdasarkan Agama di Kelurahan Pudak Payung

No.	Agama	Jumlah (Jiwa)	Persentase (%)
1.	Islam	22.461	85,9%
2.	Kristen	1.903	7,3%
3.	Katolik	1.717	6,6%
4.	Hindu	33	0,1%
5.	Budha	31	0,1%
6.	Konghucu	3	0,01%
7.	Aliran Kepercayaan	15	0,06%
Jumlah		26.163	100%

Sumber : Dokumen Kelurahan Pudakpayung tahun 2023

Dari data tersebut, menunjukkan bahwa agama atau aliran kepercayaan yang dianut oleh masyarakat Kelurahan Pudak Payung paling banyak adalah agama Islam dengan jumlah total 22.461. Kemudian yang menjadi keunikan adalah masih adanya aliran kepercayaan yang tumbuh pada masyarakat di Kelurahan Pudak Payung yaitu Sapto Darma dengan jumlah penganut adalah 15 jiwa. Keberagaman agama di Kelurahan Pudakpayung juga ditunjukkan oleh keberadaan tempat ibadah yang berbeda-beda sesuai dengan agama yang dianut oleh masyarakat sekitar. Berikut jumlah data tempat ibadah yang ada di Kelurahan Pudakpayung :

Tabel 10
Jumlah Tempat Ibadah di Kelurahan Pudakpayung

No	Tempat Ibadah	Jumlah
1.	Masjid	27

2.	Musholla	12
3.	Gereja	9
4.	Pura	-
5.	Vihara	1
6.	Klenteng	-
7.	Sanggar	2

Sumber : Dokumen Kelurahan Pudukpayung tahun 2023

Berdasarkan tabel di atas menunjukkan bahwa tempat ibadah terbanyak yaitu masjid dan musholla yang digunakan untuk beribadah umat islam, hal tersebut sejalan dengan jumlah mayoritas penduduk di Kelurahan Pudukpayung yang beragama islam. Tempat ibadah agama Kristen dan Katolik dilakukan di gereja, vihara digunakan untuk tempat ibadah agama Budha, dan untuk sanggar digunakan sebagai tempat beribadah yang menganut aliran kepercayaan.

4. Profil Wilayah Kelurahan Puduk Payung

Pada bagian ini peneliti akan memberikan gambaran tentang profil wilayah Kelurahan Puduk Payung, hal yang akan dipaparkan adalah tentang sejarah terbentuknya nama wilayah Puduk Payung dan struktur pemerintahan Kelurahan Pudukpayung.

a. Sejarah terbentuknya nama wilayah Kelurahan Puduk Payung

Menurut pernyataan informan, nama Pudukpayung merupakan mitos dari cerita lampau pada masa pengalihan kekuasaan, yaitu setelah Senopati Sabuk Alu memberi nama-nama pedukuhan di tempat tersebut. Senopati Sabuk Alu melimpahkan kekuasaannya kepada Kyai Tayem dan Nyai Tayem yang bertempat tinggal di Dukuh Pucung, setelah melimpahkan kekuasaannya kepada Ki dan Ni Tayem tersebut Senopati melanjutkan perjalanannya untuk mengembara.

Suatu hari Ki dan Ni Tayem membuat sebuah sendang atau tempat mandi di Dukuh Pucung yang diberi nama Sendang Gede. Sendang tersebut digunakan untuk melakukan aktivitas seperti mencuci, mandi, ambil air, dan segala bentuk aktivitas lainnya. Anggota keluarga Ki dan Ni Tayem berjumlah 3 orang yaitu putri dari Ki dan Ni Tayem yang bernama Nyai Kopek, kemudian menantunya Ki Ronggo, dan cucunya. Suatu hari Kyai Tayem memberikan hadiah kepada cucunya yaitu seekor ikan sebagai wujud kasih sayang, dan ikan mas tersebut dipelihara oleh cucunya di Sendang Gede yang telah dibuat. Setiap melakukan aktivitas mencuci, mandi, dan lain sebagainya, ikan tersebut selalu nampak dan terlihat sangat cantik.

Pada suatu hari wilayah kekuasaan Kyai Tayem diberikan kepada menantunya yaitu Ki Ronggo untuk melanjutkan kepemimpinannya. Namun, pemerintahan tersebut tidak berlangsung lama dikarenakan setelah itu Ki Ronggo meninggal dunia. Akibat meninggalnya Ki Ronggo tersebut, terjadilah kekosongan kepemimpinan pada wilayah Dukuh Pucung dan sekitarnya. Kepemimpinan kemudian diambil alih oleh istrinya yaitu Nyai Kopek. Nyai Kopek dan anaknya setiap hari melakukan perjalanan mengelilingi dukuh-dukuh tersebut. Hal tersebut dilakukan untuk mengawasi pemerintahannya dengan mengenal wilayah-wilayah dan rakyatnya.

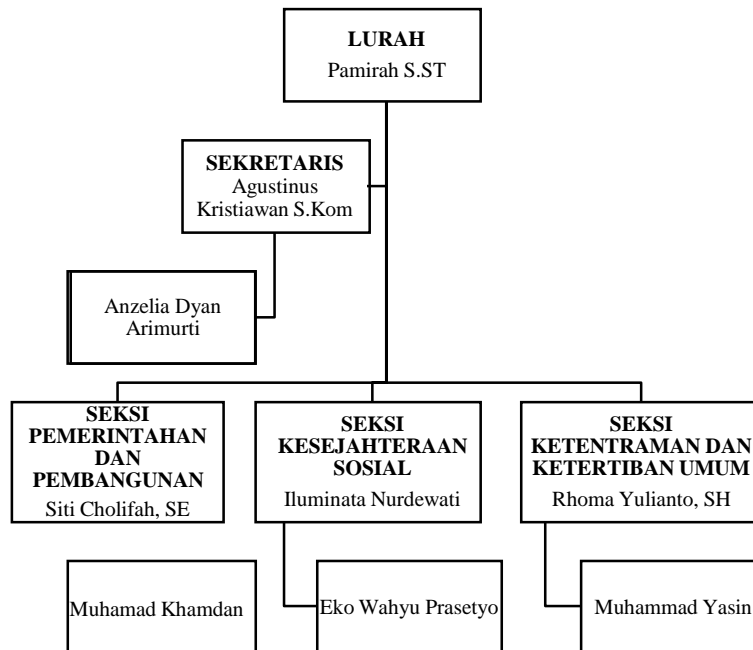
Waktu demi waktu berlalu, singkat cerita di suatu pagi putri Nyai Kopek pergi ke Sendang Gede dengan tujuan melihat ikan mas peliharaannya. Alangkah terkejutnya, putri Nyai Kopek tidak menemukan ikan mas tersebut, ia kemudian mencari di sekitar tempat itu, dan ia menemukan di sekitar Sendang Gede terdapat duri ikan yang habis dibakar oleh seseorang. Putri Nyai Kopek merasa terpukul menemukan ikan mas kesayangannya tidak lagi bernyawa, kemudian duri dari ikan tersebut dikubur di Makam Krawu Jantung

dan makam ikan mas tersebut diberi tanda sebuah tumbuhan pandan wangi. Setelah beberapa bulan berlalu, tumbuhan pandan wangi mulai berbunga, dan bunga tersebut disebut sebagai pudak. Bentuk dari bunga pandan wangi itu seperti payung, dan hal tersebut menjadi fenomena yang langka karena bentuknya yang unik.

Putri Nyai Kopek terkagum melihat fenomena tumbuhnya bunga pandan wangi di makam ikan kesayangannya tersebut, dan bentuk dari bunga itu unik seperti payung. Atas kedua peristiwa tersebut oleh putri Nyai Kopek tempat makam tersebut diberi nama Pudakpayung. Daerah makam Krawu Jantung merupakan pusat dari pedukuhan yang ada, dimana memiliki posisi tanah tertinggi dan berada di tengah. Tak heran daerah tersebut menjadi pusat dari beberapa wilayah pedukuhan lainnya. Untuk menghormati sekaligus mengenang peristiwa tersebut, masyarakat setiap satu tahun sekali melakukan ritual bersih sendang dan dilakukan hingga saat ini.

b. Bagan dan Struktur Pemerintah Kelurahan Pudak Payung

Bagan 1
Bagan Struktur Pemerintahan Kelurahan Pudakpayung



Sumber : Dokumen Kelurahan Pudakpayung tahun2023

c. Visi dan Misi Kelurahan Pudakpayung

1. Visi

“Terwujudnya kelurahan yang mandiri, berkualitas, serta mampu meningkatkan kesejahteraan dan pelayanan kepada masyarakat.”

2. Misi

Adapun misi dari Kelurahan Pudakpayung yang dijabarkan sebagai berikut :

1. Meningkatkan sumber daya aparatur
2. Meningkatkan tertib administrasi
3. Meningkatkan efisiensi dan efektivitas kerja
4. Meningkatkan kerjasama lembaga
5. Menggali dan mengembangkan potensi masyarakat
6. Meningkatkan pemberdayaan dan partisipasi masyarakat
7. Meningkatkan pelayanan prima kepada masyarakat

B. Profil Kampung Pancasila di Kelurahan Pudakpayung

1. Sejarah Kampung Pancasila di Kelurahan Pudakpayung

Kampung Pancasila bukan suatu hal yang baru di Indonesia. Kampung Pancasila merupakan program pengembangan dan penataan desa yang tertuang dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia No 81 Tahun 2015, peraturan tersebut berisikan tentang evaluasi perkembangan desa dan kelurahan. Melalui peraturan kehadiran Kampung Pancasila mulai dikenal oleh masyarakat luas, dan semakin marak pada tahun 2018 (Rukmana, 2020). Jadi dapat disimpulkan bahwa Kampung Pancasila mulai dikembangkan di Indonesia dengan tujuan untuk mengaktualisasikan nilai-nilai Pancasila kepada seluruh masyarakat agar diterapkan dalam kehidupan sehari-hari dan menjadi salah satu upaya pengembangan desa menjadi masyarakat yang berdaya.

Kampung Pancasila di Kelurahan Pudakpayung dibentuk dan disahkan pada 25 Juni 2022. Menurut pernyataan informan, program

pembentukan Kampung Pancasila di setiap kecamatan merupakan salah satu program yang digalakkan oleh pemerintah Kota Semarang, dan diperintahkan langsung oleh Bapak Kasat melalui kodim 0733 Kota Semarang. Adanya program tersebut, Babinsa meneruskan kepada pihak kecamatan dan kelurahan setempat untuk kemudian dirundingkan tempat mana saja yang cocok dan sesuai untuk dibentuk sebagai Kampung Pancasila. Wilayah Kecamatan Banyumanik terdiri dari 11 kelurahan, melalui perundingan dan beberapa pertimbangan Kelurahan Pudukpayung terpilih untuk dicanangkan sebagai Kampung Pancasila pada tahun 2022. penganangan Kampung Pancasila di Kelurahan Pudukpayung dihadiri dan diresmikan langsung oleh walikota Semarang yaitu Bapak Hendy Prihadi. Indikator sebagai bahan pertimbangan pemilihan wilayah Pudukpayung adalah dikarenakan keberagaman agama yang ada, tempat ibadah yang lengkap dan saling berdekatan, sistem gotong royong yang masih aktif, dan kebudayaan yang masih aktif.

Masyarakat Pudukpayung sangat antusias dalam membentuk wilayahnya sebagai kampung percontohan pengamalan Pancasila, terbukti keikutsertaan masyarakat dalam mengikuti setiap kegiatan yang dibuat. Dibentuknya Kampung Pancasila di Kelurahan Pudukpayung juga diikuti dengan dibuatnya struktur organisasi Kampung Pancasila, hal tersebut bertujuan untuk menyusun dan mengkoordinir program-program yang akan dibuat selanjutnya.

2. Visi dan Misi Kampung Pancasila di Kelurahan Pudukpayung

a. Visi

“Menjadi sebuah kampung dengan masyarakat yang rukun, harmonis, saling menghormati perbedaan, saling mendukung, dan sejahtera dimana setiap anggota masyarakat paham serta menerapkan nilai-nilai Pancasila.”

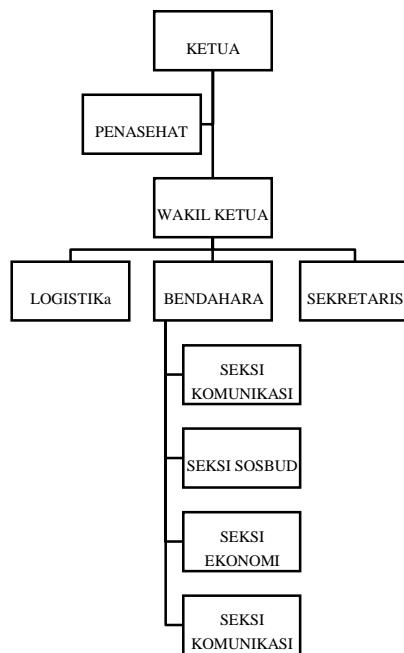
b. Misi

Untuk mewujudkan visi yang telah dirancang, adapun misi yang dilakukan sebagai proses atau tahapan untuk mencapai tujuan yang dijabarkan sebagai berikut :

1. Melakukan proses interpretasi, internalisasi, dan aktualisasi Pancasila melalui setiap kegiatan kemasyarakatan yang berlangsung.
2. Melakukan pengembangan budaya berbasis Pancasila untuk menghasilkan masyarakat yang mempunyai kecerdasan spiritual.
3. Melakukan pengembangan sosial melalui penanaman nilai-nilai Pancasila untuk menghasilkan masyarakat yang memiliki kecerdasan emosional.
4. Melakukan pengembangan ilmiah berbasis Pancasila untuk menghasilkan masyarakat yang memiliki kecerdasan intelektual.

3. Bagan dan Struktur Organisasi Kampung Pancasila

Bagan 2 Struktur Organisasi Kampung Pancasila

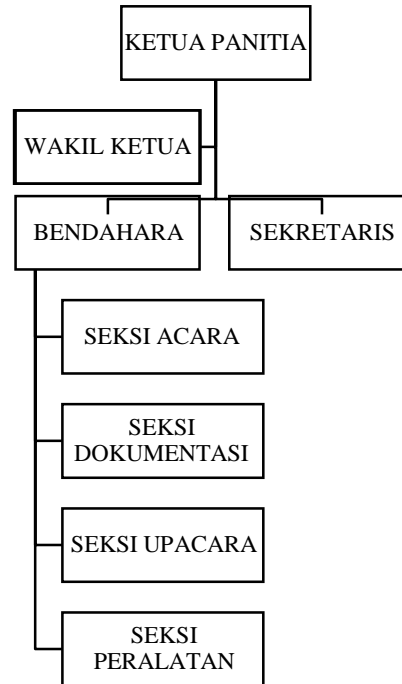


Sumber : Dokumen Kelurahan Pudakpayung tahun 2023

- a. Ketua : Agustinus Kristiawan, SH
- b. Penasehat : Maryono, SH
- c. Wakil Ketua : Marjuki Nurkholis, SH
- d. Sekretaris : Muhammad Yasin
- e. Bendahara : Iuminata
- f. Logistik : Rhoma
- g. Seksi Komunikasi : Pras dan Muhammad Khamdan
- h. Seksi Sosbud : Winarni dan Anzelia
- i. Seksi Ekonomi : Dwi Alex dan Wahid Utomo
- j. Seksi Komunikasi : Suparno dan Koesbiyantoro

4. Bagan dan Struktur Panitia Pelaksanaan Pencanangan Kampung Pancasila

Bagan 3
Struktur Panitia Pelaksanaan Pencanangan Kampung Pancasila



Sumber : Dokumen Kelurahan Pudukpayung tahun 2023

- a. Ketua Panitia : Alex Luqman Setio Wibowo ST, M.Si
- b. Wakil Ketua : Suwartono
- c. Sekretaris : Maryanto
- d. Bendahara : Shelly
- e. Seksi Acara : Winarni dan Dewi Rimayani
- f. Seksi Dokumentasi : Hery Suyanto dan Roma
- g. Seksi Upacara : Suparno (Babinsa) dan Nurcholis (Babhinkamtib)
- h. Seksi Peralatan : Wachid Sutomo dan Eko Saputra

BAB IV

KRITERIA PENETAPAN KAMPUNG PANCASILA DAN PROSES PENETAPAN KAMPUNG PANCASILA DI KELURAHAN PUDAKPAYUNG

A. Kriteria Penetapan Kampung Pancasila

Tujuan utama didirikannya Kampung Pancasila untuk memajukan dan merevitalisasi nilai-nilai Pancasila yang merupakan landasan filosofis resmi negara Indonesia.. Berdasarkan pada ketetapan MPR Nomor 11/MPR/1978 Pancasila merupakan kepribadian bangsa, pandangan bangsa, dasar negara, tujuan dan identitas bagi seluruh rakyat Indonesia. Pancasila juga mengajarkan tentang kehidupan bahwasannya manusia akan mencapai kebahagiaan apabila dapat dikembangkan keselarasan dan keseimbangan, baik sebagai individu, makhluk sosial dalam hubungan manusia dengan manusia lain, manusia dengan alam dan manusia dengan Tuhan (Sudarsana, 2020). Menurut Oktavian 2018, Pancasila memiliki dua fungsi pokok yaitu Pancasila sebagai dasar negara dan Pancasila sebagai ideologi negara yaitu :

- Pancasila sebagai dasar negara mengandung makna bahwa nilai-nilai Pancasila harus menjadi landasan dan pedoman dalam membentuk dan menyelenggarakan negara, termasuk menjadi sumber dan pedoman dalam pembentukan peraturan perundang-undangan. Pancasila memberikan pedoman hukum untuk mewujudkan negara yang lebih baik berdasarkan nilai-nilai ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan.
- Pancasila sebagai ideologi Indonesia menekankan pada pentingnya demokrasi, keadilan sosial, persatuan, serta nilai-nilai kebaikan lainnya. Pancasila memiliki peran dalam mempersatukan keberagaman masyarakat Indonesia dan sebagai alat memajukan persatuan bangsa, kerukunan sosial, dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Berdasarkan pada uraian fungsi Pancasila bagi negara Indonesia maka sebagai warga negara memiliki tanggung jawab untuk menjunjung tinggi dan menerapkan nilai-nilai Pancasila tersebut. Kampung Pancasila merupakan

salah satu wadah yang digunakan untuk mengembangkan nilai-nilai Pancasila. Kampung Pancasila adalah istilah yang digunakan di Indonesia untuk menyebut desa atau komunitas yang mewujudkan nilai-nilai Pancasila, ideologi resmi negara. Pembentukan Kampung Pancasila diprakarsai oleh pemerintah setempat atau tokoh masyarakat, yang kemudian mendeklarasikan desa atau masyarakat tersebut sebagai Kampung Pancasila. Kampung Pancasila diharapkan dapat menyebarkan nilai-nilai Pancasila melalui berbagai kegiatan, seperti pendidikan dan pelatihan, acara kebudayaan, dan pengabdian kepada masyarakat.

“Kampung Pancasila merupakan sebuah wilayah dengan batas teritorial tertentu (satu atau lebih RT/RW yang pemahaman dan perilaku masyarakat setempat mencerminkan nilai-nilai Pancasila, serta mempunyai sarana dan prasarana yang menunjang atau mumpuni untuk melakukan kegiatan edukasi dan implementasi nilai-nilai Pancasila.” .”(Wawancara dengan Bapak Joko Hartanto selaku sekretaris Kesbangpol Kota Semarang pada tanggal 18 Oktober 2023).

Berdasarkan kutipan wawancara di atas dapat diketahui bahwa Kampung Pancasila merupakan wilayah yang masyarakatnya dapat menerapkan nilai-nilai Pancasila baik itu dalam pemahaman dan perilaku. Wilayah yang dibentuk sebagai Kampung Pancasila juga harus memiliki sarana dan prasarana yang menunjang setiap program yang dirancang, agar program tersebut dapat terlaksana secara maksimal.

“sebenarnya penetapan tentang pembentuk Kampung Pancasila di Kota Semarang tidak tercantum undang-undang atau peraturan yang dibentuk khusus tentang Kampung Pancasila. Program Kampung Pancasila ini berdasarkan usul dari gabungan antara Kesbangpol yang bekerjasama dengan Kodim Kota Semarang dengan tujuan Kampung Pancasila ini sebagai alat branding kepada masyarakat agar mereka menerapkan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Program Kampung Pancasila di Kota Semarang dimulai pada tahun 2019. Diharapkan pembentuk Kampung Pancasila ini di setiap wilayah yang dibentuk memiliki kegiatan khusus dan rutin dilakukan sebagai upaya pengembangan pemahaman tentang nilai Pancasila tersebut.”(Wawancara dengan Bapak Joko Hartanto selaku sekretaris Kesbangpol Kota Semarang pada tanggal 18 Oktober 2023).

Berdasarkan hasil wawancara dengan Sekretaris Badan Kesbangpol Kota Semarang dapat diketahui bahwa program pembentukan Kampung Pancasila di Kota Semarang mulai digalakkan pertama kali pada tahun 2019, tujuannya adalah program Kampung Pancasila dijadikan sebagai alat branding kepada masyarakat agar terus menerapkan nilai-nilai Pancasila. Pembentukan Kampung Pancasila di Kota Semarang harus mempunyai kegiatan rutin yang dilakukan dengan tujuan sebagai pengembangan program Kampung Pancasila tersebut.

Proses pendirian Kampung Pancasila tidak sembarangan dan memerlukan beberapa pertimbangan yang matang terhadap karakteristik dan potensi yang ada pada masyarakat itu sendiri, dimana potensi tersebut dijadikan sebagai model penerapan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Berdasarkan hasil wawancara dengan sekretaris Badan Kesbangpol Kota Semarang terdapat indikator penetapan sebuah wilayah menjadi Kampung Pancasila sebagai berikut :

1. Masyarakat setempat memahami nilai-nilai Pancasila

Negara Indonesia berideologi Pancasila yang merupakan titik tengah atau keseimbangan antara ideologi liberalis dan ideologi sosialis, posisi tengah ini selain tujuannya menjaga keseimbangan tetapi juga mengambil nilai-nilai positif dari kedua ideologi tersebut (Octavian, 2018). Berdasarkan pernyataan Bapak Joko Hartanto selaku sekretaris Kesbangpol Kota Semarang, terdapat lima nilai Pancasila yang diadopsi melalui kearifan lokal :

1. Nilai Ketuhanan yang Maha Esa

Pada sila pertama mengajarkan tentang pentingnya percaya kepada Tuhan yang Maha Esa terdapat dua *point* yang disebutkan sebagai bentuk visualisasi: (1) Pada konteks kehidupan bermasyarakat pemahaman mengenai nilai ini membantu membangun kerukunan dan saling menghormati antar umat beragama seperti menerapkan sikap tepo seliro dan toleransi. (2) “*Aja sok rumangsa bisa, nanging sing bisa rumangsa*” pada peribahasa tersebut mengajarkan tentang bagaimana seharusnya manusia bersikap, tidak sepatutnya untuk menyombongkan dan melebih-lebihkan kemampuan

yang dimiliki.

2. Nilai Kemanusiaan yang Adil dan Beradab

Pada sila kedua, menekankan tentang pentingnya menghargai martabat dan hak asasi setiap individu, karena setiap manusia memiliki hak yang sama untuk mendapatkan perlindungan, kebebasan, dan kesempatan yang setara dalam kehidupan sosial, politik dan ekonomi. Terdapat dua *point* yang disebutkan sebagai bentuk visualisasi : (1) Menganggap bahwa tetangga adalah saudara, pada nilai Pancasila ini mengajarkan tentang pentingnya persaudaraan dan solidaritas antar sesama manusia. Sikap yang semestinya dikembangkan yaitu adil dan saling menghargai, untuk berusaha menciptakan hubungan dan lingkungan yang harmonis, (2) Menolong tanpa membedakan suku, agama, dan golongan. Pada prakteknya sikap tersebut mengajarkan agar selalu memberikan bantuan dan dukungan kepada sesama tanpa memandang perbedaan apapun.

3. Nilai Persatuan Indonesi

Pada sila ketiga mengandung nilai persatuan dan kesatuan Bangsa Indonesia dan berpegang teguh pada pengakuan “Bhineka Tunggal Ika”. Pengakuan tersebut melekat dengan karakteristik masyarakat Indonesia yang mempunyai keberagaman suku, agama, adat, dan bahasa. Terdapat dua *point* yang disebutkan sebagai bentuk visualisasi : (1) Seluruh masyarakat Indonesia adalah saudara. Nilai tersebut menggambarkan bahwa seluruh masyarakat Indonesia mempunyai ikatan yang kuat sebagai satu kesatuan bangsa. (2) Cinta negara bagian dari Iman, yang artinya bahwa sebagai warga negara Indonesia yang taat agama, maka diharapkan untuk mencintai negara sebagai bagian dari keyakinan.

4. Nilai Kerakyatan yang Dipimpin oleh Hikmat Kebijaksanaan dalam Permusyawaratan Perwakilan

Pada sila keempat, mengajarkan tentang prinsip demokrasi,

partisipasi aktif, dan musyawarah mufakat. Terdapat peribahasa yang menggambarkan praktek nilai Pancasila sila ketiga “ono rembug dirembug, ono pangan dipangan” dan “menang ora umuk, kalah ora amuk”. Pada kedua peribahasa tersebut mengandung makna bahwa pada pengambilan keputusan atau menyelesaikan perkara, penting untuk melibatkan banyak pihak untuk berdiskusi dan bermusyawarah. Tidak hanya itu, pada sila ketiga mengajarkan mengenai pentingnya sikap rendah hati dan bijaksana untuk menjaga hubungan yang harmonis dengan sesama.

5. Nilai Keadilan Bagi Seluruh Rakyat Indonesia

Sila kelima Pancasila mengandung nilai-nilai untuk menciptakan kondisi lingkungan yang adil dan setara. Kesetaraan yaitu pentingnya menghormati dan memperlakukan sesama manusia secara adil dan setara tanpa memandang latar belakang. Keadilan berarti setiap manusia mempunyai hak yang sama sebagai warga Negara Indonesia. Kedua nilai tersebut merupakan landasan dalam membangun masyarakat yang harmonis.

2. Masyarakat setempat berperilaku sesuai nilai-nilai Pancasila

Sebagai sebuah negara yang berlandaskan pada Pancasila, pengamalan nilai-nilai Pancasila mempunyai tujuan penting dalam kehidupan bermasyarakat, yaitu dengan mengamalkan nilai-nilai Pancasila, masyarakat setempat dapat menciptakan lingkungan yang harmonis, toleran dan berkeadilan. Sejalan dengan tujuan pembentukan Kampung Pancasila yaitu sebagai salah satu media untuk menciptakan pembelajaran Pancasila bagi masyarakat luas. Pengamalan nilai-nilai Pancasila yang dipraktekkan haruslah sesuai dengan kelima sila Pancasila untuk membangun masyarakat yang berketuhanan, berkeadilan, beradab, bersatu, demokratis dan bermartabat.

“seperti yang sudah saya sebutkan mba, Pancasila ini merupakan pedoman bagi masyarakat Indonesia dalam

berbangsa dan bernegara. Artinya bahwa Pancasila ini tidak hanya dihafalkan sebagai teori saja, Pancasila harus melekat dalam hati, diucapkan dan dicerminkan dalam perilaku. Tidak bisa hanya dimulut saja, tetapi tidak diimplementasikan.” (Wawancara dengan Bapak Joko Hartanto selaku sekretaris Kesbangpol Kota Semarang pada tanggal 18 Oktober 2023).

Berdasarkan wawancara diatas dapat diketahui bahwa pemaknaan mengenai fungsi Pancasila ini sebagai pedoman dalam berperilaku. Pemahaman mengenai Pancasila tidak hanya sebagai teori saja, tetapi harus dipahami dan diamalkan. Pancasila dipahami lewat hati, diucapkan lewat mulut, dan diimplementasikan dalam perbuatan. Dapat disimpulkan bahwa, salah satu syarat sebuah wilayah menjadi Kampung Pancasila adalah masyarakat setempat berperilaku sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. implementasi nilai-nilai Pancasila harus sesuai dengan sila pertama hingga kelima dan dipraktekkan oleh seluruh masyarakat di wilayah tersebut.

3. Sarana dan prasarana setempat menunjang edukasi dan implementasi nilai-nilai Pancasila bagi warganya dan pengunjung

Sarana dan prasarana secara umum dapat diartikan sebagai penunjang keberhasilan sebuah proses yang dilakukan dalam pelayanan publik, karena apabila sarana dan prasarana tersebut tidak tersedia dan memadai seluruh kegiatan yang dilakukan tidak akan dapat mencapai hasil yang maksimal, yang sesuai dengan rencana yang telah dibentuk (Nuraini, 2018). Program lanjutan Kampung Pancasila yaitu memberikan pemahaman kepada masyarakat wilayah yang dibentuk mengenai pengamalan nilai-nilai Pancasila, sehingga sarana dan prasarana yang ada harus menunjang kegiatan tersebut.

“salah satu indikator syarat dibentuknya Kampung Pancasila yaitu di wilayah tersebut itu terdapat sarana dan prasarana yang dapat membantu meningkatkan penanaman nilai Pancasila mba. Coba kalo di wilayah tersebut segala sarana tidak akan jalan itu program. Sarana dan prasarana tidak selalu dalam bentuk fisik, tetapi di wilayah yang akan dibentuk sebagai Kampung Pancasila ini terdapat SDM yang mumpuni untuk memberikan pengajaran kepada masyarakat luas tentang Pancasila. Kemudian ada salah satu tempat dimana sebagai pusat

dari proses edukasi berlangsung seperti balai atau posko dan terdapat kegiatan rutin disana.” (Wawancara dengan Bapak Joko Hartanto selaku sekretaris Kesbangpol Kota Semarang pada tanggal 18 Oktober 2023).

Berdasarkan wawancara diatas dapat diketahui bahwa wilayah yang dibentuk sebagai Kampung Pancasila harus memiliki sarana dan prasarana yang memadai, baik secara fisik maupun nonfisik. Seperti yang disebutkan yaitu kebutuhan akan tempat yang berfungsi sebagai pusat kegiatan rutin dan edukasi maka perlunya posko atau balai, kemudian untuk Sumber Daya Manusia (SDM) yang ada di kampung pancasila harus memiliki pemahaman yang luas mengenai Pancasila untuk kemudian dibagikan ilmu tersebut kepada masyarakat luas. Maka dapat disimpulkan bahwa dengan adanya SDM yang mumpuni dan ketersediaan tempat yang menjadi pusat kegiatan, diharapkan masyarakat dapat lebih mudah memperoleh pengetahuan dan pemahaman tentang nilai-nilai Pancasila.

4. Terdapat kegiatan rutin edukasi dan implementasi nilai-nilai Pancasila

Kegiatan rutin edukasi dan implementasi nilai-nilai Pancasila di Kampung Pancasila memiliki arti penting dalam memperkuat pemahaman dan pengamalan nilai-nilai Pancasila di tengah masyarakat. Melalui kegiatan ini, masyarakat diajak untuk memahami, menginternalisasi, dan menerapkan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari.

“kegiatan yang dimaksud itu mba contohnya kajian rutin fadilah Pancasila yang mengangkat tema tentang cinta tanah air dan bangsa. Nah kegiatan tersebut dilakukan minimal setiap satu minggu sekali, tujuannya agar masyarakat memahami nilai-nilai Pancasila dan dapat mengimplementasikan setiap ilmu yang disampaikan. Biasanya dipandu oleh tokoh agama, tokoh masyarakat atau tokoh budaya yang memiliki pengetahuan yang lebih mengenai Pancasila.” (Wawancara dengan Bapak Joko Hartanto selaku sekretaris Kesbangpol Kota Semarang pada tanggal 18 Oktober 2023).

Berdasarkan wawancara diatas dapat diketahui bahwa kegiatan rutin edukasi harus dijalankan rutin minimal satu minggu sekali, seperti kegiatan fadilah Pancasila. Tokoh-tokoh yang

memberikan pengajaran tentang Pancasila yaitu mereka yang memiliki pengetahuan yang mumpuni mengenai nilai-nilai Pancasila. Melalui kegiatan rutin edukasi dan implementasi nilai-nilai Pancasila, diharapkan masyarakat semakin memahami pentingnya nilai-nilai tersebut dalam menjaga persatuan, keadilan, dan harmoni sosial. Mereka juga diharapkan dapat mengamalkan nilai-nilai Pancasila dalam berbagai aspek kehidupan, mulai dari keluarga, masyarakat, hingga dalam berinteraksi dengan sesama.

B. Proses penetapan Kampung Pancasila di Kelurahan Pudukpayung

Secara umum pembentukan Kampung Pancasila mempunyai sejarah yang sangat panjang. Setelah era reformasi tahun 1998 gagasan mengenai Kampung Pancasila inilah baru tercetuskan. Istilah Kampung Pancasila digagas bukan karena masyarakatnya mampu menghafal setiap butir-butir sila Pancasila, melainkan di kampung tersebut ada sebagai wujud dari penerapan nilai Pancasila. Kampung Pancasila dapat dijadikan sebagai pusat dalam pemecahan berbagai permasalahan yang muncul dan berkaitan dengan banyaknya sikap intoleransi yang ada pada masyarakat di Indonesia. Maka lebih dari itu, Kampung Pancasila dijadikan sebagai kampung percontohan yang mampu merevitalisasi, membumikan, mengokohkan, dan mengaplikasikan nilai-nilai Pancasila secara nyata dalam kehidupan sehari-hari. Hal-hal yang harus ada dan tertanam dalam masyarakat sebagai perwujudan penerapan nilai Pancasila yaitu nilai gotong-royong, saling menghargai, toleransi, musyawarah mufakat, dan keadilan sosial dalam masyarakat (Rukmana, 2020).

Konsep pembentukan Kampung Pancasila ini merupakan salah satu bentuk implementasi dari konsep pemberdayaan masyarakat. Kampung Pancasila dapat dipandang menjadi salah satu bentuk implementasi dari konsep pemberdayaan masyarakat dengan membangun nilai-nilai Pancasila sebagai landasan yang utama. Salah satu tujuan dari Kampung Pancasila yaitu untuk memperkuat pemahaman dan implementasi nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari maka pemberdayaan menjadi penting karena melalui proses tersebut, masyarakat mulai diberdayakan untuk mengenali, memahami, serta menginternalisasi nilai-nilai Pancasila sebagai landasan moral yang kuat dan harus dipatuhi. Jim Ife dalam bukunya menyebutkan bahwa pemberdayaan tidak semata hanya tentang memberi, namun juga menyangkut tentang

bagaimana menjadikan masyarakat tersebut termotivasi untuk berkembang (Ife & Tesoriero, 2008).

Kota Semarang merupakan salah satu kota yang terus mencoba menggalakkan program Kampung Pancasila di beberapa wilayah. Hendrar Prihadi sebagai Walikota Semarang menginginkan adanya pembentukan Kampung Pancasila di beberapa titik wilayah yang ada, dengan tujuan agar masyarakat dapat menjadikan Pancasila sebagai pedoman dalam kehidupan sehari-hari. Sehingga, suasana keguyuban, kerukunan, gotong-royong dan kerukunan ini terbentuk di tengah kemajemukan yang ada (Humas, 2022). Pencanaan Kampung Pancasila di Kelurahan Pudukpayung Kota Semarang merupakan salah satu wilayah yang dicetuskan sebagai Kampung Pancasila. Pembentukan Kampung Pancasila di Kelurahan Pudukpayung ini juga menandakan upaya pemberdayaan masyarakat yang dilakukan sebagai upaya agar masyarakat lebih mengenali, memahami, serta menginternalisasi nilai-nilai Pancasila. Proses penetapan Kampung Pancasila di Kelurahan Pudukpayung yang dilakukan sebagai upaya pemberdayaan, dijabarkan sebagai berikut :

1. *Enabling*

Pemberdayaan dilakukan dengan membangun terciptanya suasana iklim yang membuat potensi masyarakat tersebut berkembang. Jadi, setiap individu maupun masyarakat pastinya telah memiliki potensi maka perlunya membangkitkan kesadaran tersebut. Potensi-potensi yang ada pada masyarakat itu kemudian dimanfaatkan untuk melaksanakan pemberdayaan yang telah dirancang sebagai pendukung (Ife & Tesoriero, 2008). *Enabling* mempunyai peranan penting dalam proses pemberdayaan, dimana dalam hal ini *enabling* dilakukan untuk mengidentifikasi lokasi atau sasaran yang berpotensi untuk dapat dikembangkan. Konsep *enabling* digunakan untuk menunjukkan bahwa pentingnya menyediakan lingkungan yang kondusif bagi individu atau kelompok, sehingga masyarakat mengetahui potensi yang dimiliki dan dapat berpartisipasi secara aktif dalam proses pemberdayaan. Proses *enabling* yang dilakukan di Kampung Pancasila Kelurahan Pudukpayung, sebagai berikut :

a. Identifikasi Lokasi dan Koordinasi dengan Pemerintah Daerah

Berdasarkan program pemerintah daerah, pembentukan Kampung Pancasila digalakkan untuk dikembangkan yaitu satu kecamatan terdapat satu kampung yang dibentuk sebagai kampung percontohan yaitu Kampung Pancasila. Wilayah di Kecamatan Banyumanik memiliki 11 kelurahan, salah satunya adalah Kelurahan Pudukpayung. Wilayah Pudukpayung dipilih dan ditunjuk secara langsung oleh Kecamatan Banyumanik sebagai perwakilan dari pembentukan Kampung Pancasila tersebut. Berdasarkan wawancara yang dilakukan oleh peneliti dengan perwakilan BABINSA di Kelurahan Pudukpayung yang menangani pencaangan Kampung Pancasila yaitu Bapak Suparno.

“Program Kampung Pancasila ini merupakan program dari Bapak Kasat melalui kodim 0733 Kota Semarang untuk setiap kecamatan terdapat satu kelurahan sebagai kelurahan percontohan yang dibentuk sebagai Kampung Pancasila, maka terbentuknya Kampung Pancasila ini karena adanya program dari TNI angkatan darat. Pemilihan kelurahan ditunjuk secara langsung dari Kecamatan Banyumanik dengan alasan wilayah Pudukpayung memiliki tempat ibadah agama beragam yang lengkap, masyarakatnya yang heterogen, toleransi yang tinggi, dan banyaknya pengembangan program masyarakat yang telah maju yang mencerminkan bahwa masyarakat di Pudukpayung ini secara tidak langsung mampu mengamalkan nilai-nilai Pancasila.” (Wawancara dengan Bapak Suparno selaku BABINSA di Kelurahan Pudukpayung, 15 Mei 2023).

Berdasarkan hasil wawancara tersebut dapat dilihat bahwasannya program Kampung Pancasila merupakan program dari TNI yang ingin mewujudkan sebuah kampung dimana masyarakatnya mampu menerapkan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Kerjasama yang dilakukan antara unsur pemerintahan, koramil, dan masyarakat menjadi penting untuk mewujudkan terbentuknya Kampung Pancasila tersebut. Dalam konteks pemberdayaan masyarakat, program ini memberikan peluang kepada warga untuk aktif berpartisipasi dalam pembangunan dan pengembangan kampung.

Proses pemberdayaan Kampung Pancasila di Pudukpayung menggunakan perspektif post-strukturalis, dimana pemberdayaan dilakukan dengan berusaha menguatkan relasi antara lembaga dengan masyarakat. Adanya peningkatan pemahaman subjektifitas akan berdampak pada pengembangan masyarakat yang lebih esensial. Menggunakan pemahaman perspektif post-strukturalis dikarenakan dalam pemberdayaan Kampung Pancasila ini dijalankan atas kerjasama dengan pemerintah dan lembaga penegak terkait seperti BABINSA untuk berusaha menjadikan masyarakat di Pudukpayung paham tentang nilai-nilai Pancasila dan dapat menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari. Maka, yang perlu diperhatikan adalah tentang mutu pendidikan masyarakat yang tidak hanya sekedar memahami Pancasila, tetapi juga harus ada pengakaran di masyarakat.

Fokus utama dalam pemberdayaan masyarakat adalah dengan mengembangkan potensi yang dimiliki oleh desa, dengan harapan melalui pembentukan Kampung Pancasila tersebut dapat berdampak positif bagi kemajuan wilayah dan masyarakatnya. Hal-hal yang ditonjolkan dalam pembentukan Kampung Pancasila di Kelurahan Pudukpayung sehingga dapat terpilih, dipaparkan oleh Bapak Marjuki selaku ketua BABINSA 03 Pudukpayung :

“Wilayah Pudukpayung ini terbilang istimewa dari kelurahan lainnya dimana wilayah ini memiliki tempat ibadah yang saling berdekatan, misalnya satu RT ada masjid dan gereja yang saling berdekatan, kemudian lengkapnya tempat ibadah di wilayah Pudukpayung mencerminkan bahwa beragamnya agama yang dianut oleh masyarakat. Ditambah dengan adanya aliran kepercayaan Sapto Darmo yang masih berkembang. Tidak hanya itu mba, disini kebudayaan seperti seni reog dan sanggar tari sri genuk masih aktif berjalan. Wilayah Pudukpayung juga pernah menjadi juara pertama pelaksana terbaik gotong-royong masyarakat tingkat provinsi Jawa Tengah pada tahun 2020. Kelurahan Pudukpayung juga berfokus pada pengembangan ekonomi yang aktif yaitu bank sampah dan kampung tematik.”(Wawancara dengan Bapak Marjuki selaku BABINSA dan wakil ketua organisasi Kampung Pancasila di Kelurahan Pudukpayung, 15 Mei 2023).

Melihat beberapa keunggulan yang dipaparkan mengenai

wilayah Pudukpayung, dapat dilihat bahwasannya beberapa keunggulan tersebut secara tidak langsung mencerminkan penerapan nilai-nilai Pancasila telah dijalankan sejak dulu. Kemudian, setelah mengidentifikasi lokasi dengan pertimbangan tersebut selanjutnya yaitu melakukan koordinasi dengan pemerintah setempat. Kerjasama antara pihak kelurahan atau desa dengan pemerintah daerah sangat penting dalam proses ini. Kerjasama dilakukan oleh pihak Kelurahan Pudukpayung, BABINSA dan seluruh elemen masyarakat untuk mengkoordinasikan langkah-langkah selanjutnya yang didiskusikan dan disepakati bersama.

Berdasarkan penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa proses pemberdayaan enabling dilakukan dengan menggali potensi dan memperkuat kapasitas masyarakat. Identifikasi lokasi yang tepat dan koordinasi dengan pemerintah daerah menjadi kunci dalam memastikan keberhasilan pemberdayaan. Hal ini sejalan dengan pemikiran Jim Ife (1997) yang menyebutkan bahwa pemberdayaan dilakukan dengan membangun kapasitas individu melalui penyediaan sumber daya, peluang, pengetahuan, dan keterampilan untuk meningkatkan kemampuan dan memfasilitasi kemajuan masyarakat. Seperti halnya dengan Kelurahan Pudukpayung yang terpilih menjadi Kampung Pancasila mewakili Kecamatan Banyumanik, hal tersebut dikarenakan potensi yang dimiliki oleh wilayah Pudukpayung dapat memberikan peluang yang besar untuk berkembang. Dengan menggandeng pemerintah daerah sebagai mitra, dapat menciptakan lingkungan yang mendukung, sumber daya yang tersedia, serta kebijakan yang inklusif untuk mewujudkan perubahan yang berkelanjutan.

b. Sosialisasi kepada Masyarakat

Tahap selanjutnya yaitu melakukan sosialisasi kepada masyarakat wilayah Pudukpayung. Hal tersebut bertujuan untuk memberikan pemahaman nilai-nilai Pancasila, membangun kesadaran bersama, membangun komunikasi dan kolaborasi, menghindari potensi ketidakpahaman, dan mendorong partisipasi aktif. Sosialisasi mengenai adanya program pembentukan Kampung Pancasila kepada

masyarakat dilakukan langsung oleh pihak kelurahan, BABINSA, dan Ketua LPMK (Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan) sekaligus ketua pelaksana pencaanangan Kampung Pancasila di Kelurahan Pudukpayung yaitu Bapak Alex Luqman Setio Wibowo.

“Setelah adanya pemberitahuan bahwa Kelurahan Pudukpayung akan dibentuk menjadi Kampung Pancasila, kami langsung mensosialisasikan kepada masyarakat tentang rencana tersebut. Pihak BABINSA yaitu Bapak Suparno dan Bapak Marjuki langsung terjun ke lapangan untuk mendorong masyarakat agar ikut terlibat dalam setiap kegiatan dan program-program yang akan dilaksanakan. Contohnya yaitu mempersiapkan masyarakat untuk dapat memahami makna-makna mengenai Pancasila, mewajibkan masyarakat untuk hafal sila-sila Pancasila baik anak muda maupun usia lanjut, rencana mempercantik wilayah yang akan dicanangkan.”(Wawancara dengan Bapak Alex Luqman Setio Wibowo selaku ketua pelaksana pencaanangan Kampung Pancasila, 8 April 2023)

Dalam konteks pemberdayaan, menekankan pada pentingnya partisipasi aktif dari masyarakat baik dalam proses pengambilan keputusan, pelaksanaan program lanjutan mengenai kegiatan yang akan direalisasikan. Hal tersebut sejalan dengan pemberdayaan berdasarkan perspektif post-strukturalis yang menekankan pada partisipasi dari masyarakat. Perspektif post-strukturalis memberikan akses akan setiap tindakan yang diambil oleh masyarakat Pudukpayung dengan memperhatikan masyarakat itu sendiri. Contohnya melibatkan masyarakat seperti tokoh agama, tokoh budaya, dan tokoh masyarakat untuk ikut berpartisipasi dalam penanaman nilai-nilai Pancasila. Keterlibatan masyarakat dan lembaga dalam pemberdayaan tersebut juga bertujuan untuk mencari alternatif-alternatif terbaik untuk mencapai tujuan. Mengubah pandangan atau asumsi-asumsi masyarakat yang menganggap bahwa Pancasila sekedar simbol, yang kemudian diubah menjadi lebih memaknai, memahami dan kemudian menerapkan.

Sosialisasi yang dilakukan oleh pihak-pihak pemerintah daerah kepada masyarakat juga bertujuan untuk membantu

membangun kesadaran bersama di antara masyarakat bahwa Kampung Pancasila merupakan upaya kolektif untuk menjaga kerukunan sosial dan keberagaman di lingkungan mereka. Hal ini melibatkan partisipasi aktif dari seluruh komponen masyarakat, sehingga tercipta rasa memiliki dan tanggung jawab bersama. Sejalan dengan pemikiran Jim Ife (1997) yang menjelaskan bahwa pemberdayaan adalah upaya untuk mengubah kebiasaan lama menuju kebiasaan baru yang baik untuk meningkatkan kualitas hidup dan kesejahteraan masyarakat. Sosialisasi kepada masyarakat merupakan langkah awal dalam proses pemberdayaan untuk membangun kesadaran, pemahaman dan partisipasi masyarakat di Kelurahan Pudukpayung yang dilakukan oleh para lembaga, agar program dapat terealisasi dengan baik kepada masyarakat, sehingga dapat menciptakan lingkungan yang lebih baik dalam penerapan nilai-nilai Pancasila.

Identifikasi lokasi dan sosialisasi kepada masyarakat merupakan dua aspek yang penting dalam proses *enabling*. Identifikasi lokasi yang dilakukan tersebut membantu memfokuskan upaya pemberdayaan di wilayah yang tepat sasaran, sehingga dapat memberikan dampak yang signifikan bagi masyarakat. Kemudian, untuk proses sosialisasi kepada masyarakat untuk menjelaskan tentang visi dan misi yang akan dijalankan dan untuk mendapatkan dukungan dari masyarakat berupa partisipasi aktif dalam melaksanakan setiap program atau kegiatan yang direncanakan.

2. *Empowering*

Pemberdayaan dilakukan dengan memperkuat potensi atau daya yang dimiliki oleh masyarakat melalui aksi-aksi nyata yaitu pemberian pendidikan, pelatihan, infrastruktur, finansial dan lain sebagainya. *Empowering* juga bertujuan dalam meningkatkan kapasitas dengan memperkuat potensi atau daya yang dimiliki masyarakat. Upaya memperkuat kapasitas dilakukan dengan melaksanakan langkah-langkah nyata, seperti membuka akses kepada setiap peluang dan penyediaan masukan-masukan yang dapat mendukung masyarakat menjadi lebih berdaya (Ife & Tesoriero, 2008). Pada Kampung Pancasila di Kelurahan

Pudakpayung, proses *empowering* sendiri dilakukan dengan membentuk tim pelaksana, penyediaan posko, dan implementasi kegiatan pencanangan, yang menandakan akan terealisasikannya program lanjutan yang akan dilaksanakan dalam jangka panjang. Proses *empowering* yang dilakukan Kampung Pancasila di Kelurahan Pudakpayung, dijabarkan sebagai berikut :

a. Pembentukan Tim Pelaksana

Dalam melakukan kegiatan-kegiatan terkait peningkatan pemahaman nilai-nilai Pancasila di lingkungan kampung tersebut, tim pelaksana biasanya dibentuk untuk merancang program-program edukatif dan kegiatan komunitas. Tim pelaksana memiliki fungsi untuk membantu mengkoordinasikan kegiatan Kampung Pancasila dengan lebih efektif, mensosialisasikan kepada masyarakat mengenai tujuan dan manfaat dari pembentukan Kampung Pancasila dengan tujuan masyarakat memiliki pemahaman yang jelas tentang inisiatif tersebut, membuat perencanaan kegiatan terkait dengan peningkatan pemahaman nilai-nilai Pancasila seperti program edukatif, dan melakukan proses evaluasi dan monitoring atas program-program yang dijalankan.

“Untuk program Kampung Pancasila ini mba kita sebenarnya melibatkan seluruh masyarakat yang ada di Kelurahan Pudakpayung baik itu remaja Karang Taruna, ibu-ibu PKK, RT, RW, tokoh agama, tokoh budaya, dan seluruh masyarakat. Tapi untuk tim inti pelaksana kita ambil dari tokoh-tokoh yang memang memiliki kapasitas untuk mengelola Kampung Pancasila.” (Wawancara dengan Bapak Suparno selaku BABINSA di Kelurahan Pudakpayung, 15 Mei 2023).

Berdasarkan hasil pernyataan informan diketahui bahwa pembentukan Kampung Pancasila di Kelurahan Pudakpayung tersebut melibatkan partisipasi seluruh masyarakat yang ada, seperti remaja Karang Taruna, ibu-ibu PKK, RT, RW, tokoh agama, tokoh budaya dan seluruh masyarakat Kelurahan Pudakpayung. Namun, untuk tim pelaksana Kampung Pancasila di Kelurahan Pudakpayung dibentuk menjadi dua struktur organisasi. Anggota tim pelaksana dipilih berdasarkan tokoh-tokoh yang ada memiliki kapasitas untuk

mengelola dan mengembangkan Kampung Pancasila tersebut.

Struktur organisasi adalah gambaran mengenai pembagian wewenang dan tanggung jawab yang telah ditetapkan, alokasi aktivitas untuk dikembangkan demi mencapai tujuan yang telah dirumuskan (Nurlia, 2019). Struktur organisasi Kampung Pancasila yang dibagi menjadi dua struktur yaitu struktur organisasi Kampung Pancasila dan struktur panitia pelaksanaan pencanangan Kampung Pancasila, yang dijabarkan sebagai berikut.

Tabel 11
Struktur organisasi dan panitia di Kampung Pancasila Kelurahan Pudukpayung

Struktur Organisasi Kampung Pancasila	Struktur Panitia Pelaksana Pencanangan Kampung Pancasila
Ketua : Agustinus Kristiawan, SH	Ketua Panitia : Alex Luqman Setio Wibowo ST, M.Si
Penasehat : Maryono, SH	Wakil Ketua : Suwartono
Wakil Ketua : Marjuki Nurkholis, SH	Sekretaris : Maryanto
Sekretaris: Muhammad Yasin	Bendahara : Shelly
Bendahara : Iluminata	Seksi Acara : Winarni dan Dewi Rimayani
Logistik : Rhoma	Seksi Dokumentasi : Hery Suyanto dan Roma
Seksi Komunikasi : Pras dan Muhammad Khamdan	Seksi Upacara : Suparno (Babinsa) dan Nurcholis (Babhinkamtibmas)
Seksi Sosbud : Winarni dan Anzelia	Seksi Peralatan : Wachid Sutomo dan Eko Saputro
Seksi Ekonomi : Dwi Alex dan Wahid Utomo	

Seksi Komunikasi : Suparno dan Koesbiyantoro	
--	--

Sumber : Dokumen Kelurahan Pudukpayung tahun 2023

Tim pelaksana Kampung Pancasila dibagi menjadi dua bagian, hal tersebut dilakukan agar kegiatan dan program yang akan dilaksanakan lebih terorganisir karena setiap struktur memiliki tugas dan tanggung jawab yang berbeda. Menurut pernyataan informan, kedua struktur organisasi tersebut memiliki fungsi, tugas dan tanggung jawab yang berbeda (1) Struktur organisasi Kampung Pancasila memiliki tujuan yaitu memberikan pemahaman, penerapan, dan pengamalan nilai-nilai Pancasila melalui program-program yang dirancang. Sedangkan struktur panitia pelaksana pencanangan Kampung Pancasila yaitu mengorganisir jalannya kegiatan mengenai peluncuran Kampung Pancasila, lebih tepatnya fokus pada perencanaan dan penyelenggaraan acara. (2) Struktur organisasi Kampung Pancasila mempunyai kewenangan yang luas yaitu melibatkan aktivitas sehari-hari di Kampung Pancasila tersebut, seperti memiliki kewenangan dalam mengembangkan program pendidikan, budaya, sosial dan ekonomi. Sedangkan, struktur panitia pelaksana Pencanangan Kampung Pancasila yaitu memiliki lingkup kewenangan yang terbatas, hanya fokus pada perencanaan dan penyelenggaraan acara pencanangan yang akan dilaksanakan. Memiliki tugas yaitu melakukan persiapan, pengorganisasian, dan pelaksanaan.

Berdasarkan pemaparan diatas dapat diketahui bahwa pembentukan tim pelaksana pada Kampung Pancasila sejalan dengan pemikiran Jim Ife (1997) yang menyebutkan bahwa pemberdayaan merupakan proses yang berkelanjutan dengan melibatkan partisipasi aktif dari masyarakat yang diberdayakan. Hal ini sejalan dengan pembentukan tim organisasi Kampung Pancasila yang melibatkan beberapa tokoh penting dan masyarakat untuk ikut dalam perencanaan, pengambilan keputusan, pelaksanaan program. Hal tersebut dilakukan karena dengan melibatkan tokoh dan masyarakat

untuk bergabung kedalam organisasi Kampung Pancasila tersebut, keberlanjutan program nantinya akan lebih bermanfaat sesuai dengan kebutuhan dan aspirasi dari masyarakat itu sendiri.

b. Penyediaan Posko Kampung Pancasila

Posko Kampung Pancasila merupakan sebuah tempat pusat koordinasi dan informasi yang dibentuk atau didirikan di dalam kampung tersebut, tujuannya untuk melindungi, mempromosikan dan mengembangkan nilai-nilai Pancasila serta berfungsi untuk memfasilitasi kegiatan-kegiatan yang berlangsung. Kelurahan Pudakpayung memiliki posko Kampung Pancasila, dibentuknya posko tersebut sebagai pusat perkumpulan anggota, pusat informasi bagi masyarakat tentang program dan kegiatan yang dilakukan dalam upaya peningkatan nilai-nilai Pancasila di kampung tersebut. Posko Kampung Pancasila juga digunakan sebagai pusat koordinasi kegiatan dan tempat penyaluran aspirasi masyarakat. Setiap rencana dan hasil kegiatan Kampung Pancasila akan dipaparkan di posko tersebut.

“ini mbak posko Kampung Pancasilanya, didalem ini ada jadwal kegiatan dan beberapa foto hasil kegiatan mba seperti apa saja yang sudah dilakukan. Kemudian terdapat data-data seperti tempat ibadah yang ada di Pudakpayung, kesenian yang masih dikembangkan dan jumlah penduduk Kelurahan Pudakpayung. Ya bisa dibilang ini titik kumpulnya mba kalo ada yang harus dirundingkan, memang sengaja posko letaknya bersebelahan dengan kantor kelurahan biar gampang kalo mau koordinasi dan mudah diakses masyarakat lainnya karena dekat dengan gerbang Kampung Pancasila.” (Wawancara dengan Bapak Marjuki selaku BABINSA dan wakil ketua organisasi Kampung Pancasila di Kelurahan Pudakpayung, 15 Mei 2023).

Berdasarkan wawancara di atas dapat diketahui bahwa posko Kampung Pancasila didirikan sebagai pusat koordinasi. Posko Kampung Pancasila di Kelurahan Pudakpayung didirikan bersebelahan dengan kantor kelurahan dan dekat dengan gerbang Kampung Pancasila, hal tersebut bertujuan agar memudahkan akses dengan masyarakat. Pada posko Kampung Pancasila terdapat data-data pendukung dan beberapa informasi terkait dengan jadwal kegiatan.

Gambar 3
Posko Kampung Pancasila di Kelurahan Pudakpayung



Sumber : Hasil dokumentasi peneliti

Posko Kampung Pancasila di Kelurahan Pudakpayung dijadikan sebagai titik fokus untuk warga masyarakat dan pemerintah setempat dalam mendukung upaya pemberdayaan masyarakat dan peningkatan kesadaran mengenai pentingnya menjaga persatuan, menerapkan toleransi, gotong-royong, dan semangat demokrasi. Posko tersebut memiliki peranan penting, baik dalam pemberian informasi, pusat koordinasi, pelaporan, dan pembinaan. Melalui posko Kampung Pancasila tersebut, diharapkan masyarakat ikut berpartisipasi aktif dalam upaya mengembangkan nilai-nilai Pancasila.

c. Implementasi Kegiatan

Setelah menyusun struktur organisasi dan penyediaan posko Kampung Pancasila tahap selanjutnya adalah melaksanakan kegiatan yang telah direncanakan. Implementasi kegiatan ini merujuk pada program-program dan kegiatan yang akan terlaksana di Kampung Pancasila di Kelurahan Pudakpayung dalam waktu dekat dan program jangka panjang. Kegiatan waktu dekat yang akan terlaksana pada saat itu yaitu kegiatan pencaanangan Kampung Pancasila yang akan disahkan dan dihadiri secara langsung oleh Bapak Hendrar Prihadi selaku Wali Kota Semarang. Pencaanangan Kampung Pancasila merupakan sebuah kegiatan yang dilakukan untuk menyatakan bahwa masyarakat wilayah tersebut berkomitmen untuk menerapkan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Kegiatan pencaanangan

Kampung Pancasila ini merupakan pertanda awal untuk memulai program-program pemberdayaan dan pendidikan selanjutnya yang berkaitan dengan memperkuat kesadaran manusia akan nilai-nilai Pancasila.

Persiapan dalam melaksanakan kegiatan pencaanangan Kampung Pancasila melibatkan partisipasi aktif dari warga Pudukpayung, pemerintah daerah, dan lembaga sosial yang saling bekerjasama. Melalui koordinasi dari panitia pelaksana pencaanangan Kampung Pancasila warga kampung diminta untuk ikut andil dalam mengimplementasikan ide-ide kreatifnya dalam kegiatan yang akan terlaksana. Tidak hanya itu, pencaanangan Kampung Pancasila di Pudukpayung juga melibatkan tokoh masyarakat, tokoh agama, dan tokoh budaya, kehadiran tokoh penting tersebut dapat menginspirasi masyarakat lain, memberikan pengajaran tentang upaya melestarikan budaya lokal dan legitimasi pada inisiatif tersebut. Bapak Trimakno selaku tokoh agama di Kelurahan Pudukpayung menyatakan.

“Saat pencaanangan Kampung Pancasila di bulan Juni 2022 kemarin mba, seluruh masyarakat sangat antusias mengikuti kegiatan. Ada ide dari masyarakat untuk menyambut kedatangan Bapak Walikota Hendrar Prihadi di gerbang masuk wilayah Pudukpayung dicat dan digambar, kemudian untuk pentas seni yang akan ditampilkan, kita mengkoordinir adek-adek yang ada di sanggar tari untuk ikut memeriahkan acara yang akan diselenggarakan. Kemudian masing-masing tokoh agama juga diberikan kesempatan untuk memberikan pesan-pesan melalui versi agamanya masing-masing. Pokoknya mba.. kegiatan pada saat itu dibuat untuk mencerminkan implementasi nilai-nilai Pancasila dan menunjukkan bahwa di wilayah Pudukpayung ini warganya sangat rukun dan harmonis di tengah keberagaman agama yang ada. Saat kegiatan berlangsung mba, masyarakat sangat antusias terbukti dari kehadiran masyarakat yang penuh mungkin puluhan ribu orang hadir karena full dari ujung sampai ujung.” (Wawancara dengan ibu Agustinus Kristiawan, SH selaku ketua organisasi Kampung Pancasila, 15 Mei 2023).

Agenda kegiatan saat pencaanangan Kampung Pancasila disebutkan juga oleh informan yaitu pertama pemotongan pita yang

dilakukan oleh Bapak Hendrar Prihadi memiliki makna bahwa telah disahkannya Kampung Pancasila di Pudukpayung sebagai kampung percontohan bagi wilayah lain dan kampung yang berkomitmen untuk terus berupaya meningkatkan pemahaman tentang Pancasila, mendorong adanya praktik-praktik yang sesuai dengan nilai-nilai Pancasila, dan melakukan pemberdayaan sesuai dengan sila-sila yang berlaku. Acara selanjutnya yaitu setiap RW dipersilahkan untuk memberikan persembahan seni budayanya masing-masing, sebagai simbol di Kelurahan Pudukpayung masih melestarikan kebudayaan-kebudayaan lokal. Pada kegiatan pencaangan Kampung Pancasila setiap perwakilan tokoh agama di Kelurahan Pudukpayung diberi kesempatan untuk menyampaikan pendapatnya mengenai bagaimana penerapan Pancasila menurut ajaran masing-masing agama. Hal tersebut dilakukan untuk memberikan pemahaman kepada masyarakat bahwasannya di tengah keberagaman agama, Pancasila mengajarkan tentang persatuan, toleransi, dan rasa saling menghargai

Gambar 4
Kegiatan Pencaangan Kampung Pancasila di Kelurahan Pudukpayung Kota Semarang



Sumber : Dokumentasi informan kegiatan pencaangan Kampung Pancasila

Kegiatan pencaangan Kampung Pancasila adalah awal dari terealisasinya berbagai program lanjutan yang akan dilaksanakan dalam jangka panjang. Pencaangan menjadi momen penting dalam memperkenalkan dan mengaktualisasikan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari tersebut. Melalui pencaangan Kampung Pancasila, masyarakat diharapkan dapat lebih menyadari dan

menghayati setiap butir-butir Pancasila sebagai landasan untuk bertindak dan berinteraksi. Secara tidak langsung, kegiatan pencaanangan ini memberikan kesempatan bagi pemangku kepentingan dan pemerintah untuk melibatkan masyarakat secara aktif dalam merancang, merumuskan, serta menjalankan program-program yang mendukung pembangunan kampung dengan semangat Pancasila.

Program-program lanjutan dari Kampung Pancasila di Pudukpayung yang akan dilaksanakan setelah pencaanangan yaitu dengan melakukan beberapa strategi pemberdayaan. Pemberdayaan yang dimaksud ialah menjadikan masyarakat yang kurang paham, acuh, dan tidak mengamalkan diubah menjadi paham, antusias dan selalu menerapkan dalam kehidupan sehari-hari. Proses pemberdayaan dilakukan dengan beberapa strategi yaitu perencanaan dan kebijakan, aksi sosial, peningkatan kesadaran dan pendidikan.

3. *Protecting*

Protecting dalam pemberdayaan berarti upaya melindungi masyarakat dari hal-hal yang dapat menyebabkan persaingan dan konflik. Maka perlu adanya aturan atau kesepakatan yang dibuat dengan jelas untuk mencegah terjadinya perpecahan. Pemberdayaan yang dilakukan dengan mengembangkan sistem perlindungan untuk masyarakat sebagai upaya melindungi kepentingan yang menjadi subjek dari pengembangan. Pada proses pengembangan harus dilakukan pencegahan, pencegahan yang dimaksud ialah memberikan perhatian khusus kepada masyarakat yang lemah agar tidak menjadi semakin lemah. Masyarakat yang lemah ini cenderung tidak memiliki daya untuk menghadapi yang kuat. Pencegahan dapat dilakukan dengan mencegah adanya persaingan yang tidak seimbang dan eksploitasi dari kaum yang kuat kepada yang lemah (Ife & Tesoriero, 2008).

“kami selalu melibatkan seluruh masyarakat dalam setiap pengambilan keputusan dan kegiatan yang akan dilaksanakan. Tujuannya agar masyarakat ini merasa memiliki peran atau selalu ikut andil dalam setiap program di Kampung Pancasila jadi masyarakat itu merasa dibutuhkan. Dari pelibatan masyarakat itu mba akan menciptakan kesetaraan dan kesempatan yang adil

bagi semua warga. Harapannya dengan melibatkan masyarakat akan menciptakan lingkungan yang saling mendukung, aman, adil, dan harmonis mba.” (Wawancara dengan ibu Agustinus Kristiawan, SH selaku ketua organisasi Kampung Pancasila, 15 Mei 2023).

Berdasarkan wawancara di atas dapat diketahui bahwa seluruh masyarakat ikut dilibatkan dalam setiap pengambilan keputusan dan program yang dirancang. Tujuannya agar masyarakat di Kampung Pancasila merasa dibutuhkan dan ikut berperan andil pada setiap keputusan, hal tersebut juga dilakukan sebagai upaya melindungi dan memperkuat hak-hak dasar. Dengan terciptanya lingkungan yang aman, adil, dan harmonis, masyarakat Kampung Pancasila di Kelurahan Pudukpayung merasakan dampak positifnya. Mereka merasakan keadilan, kesetaraan, dan keamanan dalam kehidupan sehari-hari. Semua orang merasa dihargai dan memiliki kesempatan yang sama untuk berkembang.

Pada Kampung Pancasila *protecting* mengarah pada perlindungan terhadap hak-hak masyarakat, perlindungan terhadap kekerasan atau diskriminasi. Kampung Pancasila di wilayah Pudukpayung *protecting* sendiri dilakukan untuk meminimalisir terjadinya gesekan antar masyarakat karena kondisi masyarakatnya yang majemuk. Pada proses *protecting* dilakukan dengan membuat kesepakatan terkait apa-apa yang harus dijalankan sebagai bentuk implementasi akan penerapan nilai Pancasila di kehidupan sehari-hari. Upaya tersebut dilakukan agar dapat meminimalisir adanya bentuk-bentuk perilaku menyimpang yang dapat menimbulkan perpecahan di masyarakat. Kemudian, bentuk *protection* lainnya yang dilakukan yaitu setiap masyarakat mempunyai hak dasar dalam hal dihormati dan dilindungi. Maka dari itu, pada setiap kegiatan yang ada di Kampung Pancasila berhak untuk ikut berpartisipasi dalam setiap kegiatan yang berjalan.

BAB V

PENGEMBANGAN PROGRAM KAMPUNG PANCASILA DI KELURAHAN PUDAKPAYUNG

Pengembangan program merupakan lanjutan aksi yang akan dilaksanakan pada kegiatan jangka panjang yang sesuai dengan visi dan misi Kampung Pancasila. Setelah kegiatan pencanangan Kampung Pancasila di Kelurahan Pudukpayung, langkah selanjutnya adalah mengembangkan program. Sesuai dengan konsep pembentukan Kampung Pancasila yaitu bentuk implementasi dari konsep pemberdayaan masyarakat, maka dalam proses pengembangan program Kampung Pancasila diperlukan strategi. Pemberdayaan tidak semata hanya tentang memberi, tetapi juga menyangkut bagaimana menjadikan masyarakat termotivasi untuk berkembang. Banyak strategi yang telah dikembangkan dan dijalankan untuk mencapai pemberdayaan masyarakat yang berhasil dilakukan oleh para tokoh, salah satunya adalah Jim Ife. Jim Ife memaparkan tiga strategi perencanaan dan kebijakan, aksi sosial, peningkatan kesadaran dan pendidikan (Ife & Tesoriero, 2008).

A. Perencanaan dan Kebijakan

Pemberdayaan melalui perencanaan dan kebijakan yang dilakukan dengan mengidentifikasi masalah atau kebutuhan masyarakat. Perencanaan dilakukan untuk menyusun rencana strategis yang berisi visi, misi, langkah-langkah, dan tujuan yang akan dicapai. Kemudian, pembentuk kebijakan inklusif yang bersifat membangun dengan memperhatikan kepentingan semua anggota masyarakat tanpa adanya diskriminasi. Kebijakan dibuat dengan mempertimbangkan aspirasi masyarakat dan harapan, pentingnya keterlibatan masyarakat untuk ikut berpartisipasi dalam setiap kegiatan agar hasil dari setiap kegiatan dapat terlaksana dengan maksimal. Tidak hanya itu, melibatkan masyarakat juga salah satu cara untuk memberikan ruang bagi mereka agar merasa memiliki peran dalam proses pengambilan keputusan.

Pada Kampung Pancasila di Kelurahan Puduk Payung visi dan misi dibuat sesuai dengan tujuan yang akan dicapai yaitu menjadikan masyarakat

di Kelurahan Pudukpayung lebih paham dan menerapkan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Visi dan misi Kampung Pancasila dijabarkan sebagai berikut :

a. Visi

“Menjadi sebuah kampung dengan masyarakat yang rukun, harmonis, saling menghormati perbedaan, saling mendukung, dan sejahtera dimana setiap anggota masyarakat paham serta menerapkan nilai-nilai Pancasila.”

b. Misi

1. Melakukan proses interpretasi, internalisasi, dan aktualisasi Pancasila melalui setiap kegiatan kemasyarakatan yang berlangsung.
2. Melakukan pengembangan budaya berbasis Pancasila untuk menghasilkan masyarakat yang mempunyai kecerdasan spiritual.
3. Melakukan pengembangan sosial melalui penanaman nilai-nilai Pancasila untuk menghasilkan masyarakat yang memiliki kecerdasan emosional.
4. Melakukan pengembangan ilmiah berbasis Pancasila untuk menghasilkan masyarakat yang memiliki kecerdasan intelektual.

Visi dan misi diciptakan dengan tujuan untuk membangun lingkungan kampung yang inklusif, harmonis dan sejahtera bagi masyarakat Kampung Pancasila tersebut. Guna mewujudkan tujuan yang telah dirancang tersebut, tentunya terdapat upaya-upaya yang dilakukan. Pada Kampung Pancasila di Kelurahan Pudukpayung upaya yang dilakukan sesuai dengan visi misi yang disusun adalah dengan cara sosialisasi mengenai nilai-nilai Pancasila, membuat jadwal kegiatan kemasyarakatan Kampung Pancasila, melakukan pengembangan budaya yang ada di wilayah Pudukpayung, dan pemberian buku edukasi mengenai Pancasila. Setiap kegiatan yang dibentuk tersebut melibatkan seluruh masyarakat baik itu tokoh agama, tokoh masyarakat, dan tokoh budaya.

“Iya, setiap kegiatan pastinya mengikutsertakan tokoh-tokoh masyarakat karena gimana ya mba, mereka lebih ahli dan lebih tau. Kemudian dengan mengikutsertakan tokoh-tokoh penting tersebut proses sosialisasi menjadi mudah dan luas jangkauannya. Misalnya program lanjutan dari Kampung Pancasila itu sosialisasi tentang Pancasila, nah tokoh agama nanti di setiap ceramahnya bisa diselipkan materi tentang Pancasila mbak seperti itu.” (Wawancara dengan Bapak Marjuki selaku BABINSA dan wakil ketua organisasi Kampung Pancasila di Kelurahan Pudukpayung, 15 Mei 2023).

Kutipan wawancara di atas menjelaskan bahwa setiap kegiatan yang berlangsung di Kampung Pancasila Kelurahan Pudukpayung melibatkan tokoh-tokoh penting. Keterlibatan tokoh-tokoh penting dalam pengembangan program lanjutan Kampung Pancasila ini dilakukan agar program tersebut dapat lebih komprehensif, holistik atau secara menyeluruh dengan mempertimbangkan keberagaman masyarakat, dan program dapat berjalan sesuai dengan realitas sosial serta budaya kampung yang berkembang. Melalui kolaborasi antara tokoh-tokoh penting dan masyarakat itu sendiri akan menciptakan sinergi yang kuat antara nilai-nilai Pancasila dan budaya lokal yang ada dalam pengembangan program lanjutan tersebut. Pada Kampung Pancasila perencanaan pengembangan program di Kampung Pancasila dirumuskan dalam bentuk fokus-fokus program yaitu dijabarkan sebagai berikut :

Tabel 12
Kegiatan Kampung Pancasila di Kelurahan Pudukpayung

No	Kebijakan	Deskripsi	Program
1.	Program Upaya Pengembangan Nilai-Nilai Pancasila	Sosialisasi pemahaman nilai-nilai Pancasila	<ol style="list-style-type: none"> 1. Sosialisasi dan diskusi nilai-nilai Pancasila di tempat-tempat ibadah dan sekolah 2. Pembagian buku literatur pengamalan nilai Pancasila

2.	Program Gotong-Royong Lingkungan	Program gotong royong bertujuan untuk membentuk solidaritas dan kerjasama yang kuat antar masyarakat	1. Kerja bakti anggota Koramil bersama dengan masyarakat di Kampung Pancasila
3.	Program Seni dan Budaya	Program dalam rangka melestarikan budaya di Wilayah Pudukpayung	1. Pagelaran Seni

Sumber : *Penjabaran wawancara informan*

Program lanjutan pembentukan Kampung Pancasila di Kelurahan Pudukpayung di atas dirancang dalam rangka penguatan nilai-nilai Pancasila. Setiap kegiatan yang direncanakan tersebut melibatkan tokoh-tokoh masyarakat, lembaga penegak seperti BABINSA, LPMK, dan masyarakat itu sendiri. Melalui program lanjutan yang terprogram tersebut diharapkan meningkatnya pemahaman dan pengamalan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari, sehingga dapat terimplementasikan melalui sikap, memperkuat persatuan dan kesatuan di tengah keberagaman, meningkatkan semangat gotong-royong dan menjaga ketertiban sosial.

B. Aksi Sosial dan Politik

Pemberdayaan melalui aksi sosial dan politik yaitu menekankan pada pentingnya perjuangan dan perubahan politik untuk meningkatkan kekuasaan yang lebih efektif. Aksi sosial dan politik diupayakan agar terbukanya akses politik, sehingga dengan terbukanya akses politik memungkinkan masyarakat untuk dapat berpartisipasi. Pada strategi ini menekankan pada pendekatan aktivis, dan berupaya agar masyarakat dapat meningkatkan kekuasaan dengan melakukan aksi langsung (Ife & Tesoriero, 2008). Pada aksi sosial dan politik ini dijadikan sebuah sarana untuk melibatkan masyarakat secara aktif dalam proses pembangunan dan pengambilan keputusan. Strategi ini menjadi salah satu alat yang efektif guna mendorong partisipasi aktif dari masyarakat dan pemerintah dalam bekerjasama menyukseskan kebijakan yang telah dirancang.

Adapun aksi sosial dan politik yang pertama kali dilakukan Kampung Pancasila di Kelurahan Pudakpayung yaitu diadakannya pencaangan atau peresmian Kampung Pancasila di Kelurahan Pudakpayung oleh Bapak Walikota Semarang secara langsung yaitu Hendrar Prihadi. Dalam kegiatan pencaangan Kampung Pancasila yang diikuti oleh pemerintah dan masyarakat ini membuka peluang-peluang baru dalam peningkatan kesadaran dan pemahaman, pengembangan potensi, peningkatan partisipasi, dan mempererat hubungan antarwarga. Maka, pembentukan dan peresmian Kampung Pancasila di Kelurahan Pudakpayung dilakukan untuk membuka peluang bagi masyarakat untuk ikut berpartisipasi dalam mengembangkan nilai-nilai Pancasila dan menyukseskan berbagai program yang dirancang.

Aksi sosial di Kampung Pancasila Kelurahan Pudakpayung, selanjutnya dilakukan melalui pagelaran seni dengan tujuan meningkatkan memberikan pemahaman bagi masyarakat tentang nilai-nilai Pancasila, mempromosikan dan melestarikan budaya lokal yang ada. Pagelaran seni di Pudakpayung yang diselenggarakan yaitu pagelaran wayang kulit apitan Dukuh Krajan dan pagelaran wayang kulit sedekah bumi.

Gambar 5
Kegiatan Pagelaran Seni Wayang Kulit Apitan Dukuh Krajan



Sumber : Data dokumentasi Kelurahan Pudakpayung

Melalui gambar di atas merupakan kegiatan pagelaran seni wayang kulit yang digelar di Kampung Pancasila Kelurahan Pudakpayung Kota Semarang tepatnya di Dukuh Krajan pada Mei 2023. Pagelaran seni wayang

kulit tersebut digelar dalam rangka sedekah bumi sebagai bentuk rasa syukur warga yang telah diberi keselamatan, kesehatan, keberkahan dari Tuhan Yang Maha Esa. Tidak hanya itu, pagelaran seni wayang kulit diselenggarakan sebagai upaya melestarikan kebudayaan bangsa dan sebagai ajang untuk menjalin kerukunan antar warga. Dalam acara pagelaran seni wayang kulit tidak hanya kalangan orang tua atau dewasa yang datang, bahkan anak-anak ikut menyaksikan dan memadati lokasi tersebut.

Gambar 6
Kegiatan Pagelaran Seni Wayang Kulit Sedekah Bumi



Sumber : dokumentasi informan kegiatan pagelaran wayang kulit sedekah bumi

Gambar di atas merupakan kegiatan pagelaran seni wayang kulit yang diadakan di Kampung Pancasila Kelurahan Pudakpayung Kota Semarang pada bulan September 2023. Acara pagelaran wayang kulit tersebut tepatnya diadakan di wilayah RW IV dan dalam rangka sedekah bumi. Pagelaran wayang kulit diselenggarakan selain untuk sedekah bumi, kegiatan tersebut sebagai upaya nguri-nguri budaya yang telah diwariskan oleh para leluhur untuk kemudian dilestarikan agar eksistensi wayang kulit tidak memudar di kalangan masyarakat.

Melalui pagelaran seni yang dilakukan di Kelurahan Pudakpayung mendorong kolaborasi antara seniman lokal dan masyarakat setempat dalam upaya pelestarian budaya lokal. Pada pagelaran seni wayang kulit yang diselenggarakan, cerita yang ditampilkan berkaitan dengan isu-isu sosial

yang relevan mengenai Pancasila, misalnya konflik antar umat beragama, konflik ras, lunturnya budaya lokal , dan lain sebagainya. Diadakannya pagelaran seni tersebut, tokoh budaya dapat menyampaikan pesan-pesan penting mengenai isu-isu tersebut kepada masyarakat. Pesan-pesan positif yang disampaikan berkaitan dengan nilai-nilai Pancasila seperti toleransi, keadilan, persatuan, dan kesetaraan. Penyampain pesan dengan media seni ini menjadi efektif karena lebih mudah diterima dan dihayati pesan-pesannya oleh masyarakat. Pagelaran seni juga menjadi media untuk menginspirasi dan memberdayakan masyarakat, dimana masyarakat dapat melihat contoh-contoh inspiratif dari anggota masyarakat mereka, sehingga mereka merasa termotivasi untuk ikut andil dalam melestarikan budaya lokal dan mengembangkan potensi diri.

Aksi sosial sebagai kegiatan rutin yang dilakukan di Kampung Pancasila lainnya diantaranya gotong-royong dan musyawarah masyarakat. Kegiatan gotong royong dilakukan oleh masyarakat dengan tujuan membersihkan wilayah Kampung Pancasila dan membantu masyarakat yang sedang mengalami kesulitan atau musibah. Menurut Hotmaida (2023) gotong royong adalah kegiatan yang dilakukan dengan tujuan untuk menolong dan membantu sesama secara sukarela tanpa mengharapkan adanya imbalan dalam menyelesaikan suatu pekerjaan tertentu. Dalam kegiatan gotong-royong menciptakan rasa kebersamaan, kekeluargaan dan tolong-menolong yang dapat membentuk rasa persatuan dan kesatuan nasional. Landasan adanya kegiatan gotong royong karena didalamnya terdapat nilai ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, musyawarah, dan keadilan.

Gambar 7
Penghargaan Pelaksana Gotong Royong



Sumber : Hasil dokumentasi peneliti

Gambar di atas merupakan piagam yang diberikan kepada wilayah Kelurahan Pudakpayung pada tahun 2020 atas pelaksana terbaik gotong-royong masyarakat terbaik pertama tingkat provinsi Jawa Tengah. Melalui piagam tersebut dapat diketahui bahwa di Kelurahan Pudakpayung tersebut telah melaksanakan kegiatan gotong-royong sejak dulu, dan telah menjadi sebuah kebiasaan yang dilakukan masyarakat Pudakpayung baik gotong-royong membersihkan lingkungan maupun membantu warga lain apabila mengalami musibah. Penerapan gotong-royong yang direalisasikan melalui kegiatan kerja bakti dapat menjadi sarana yang efektif untuk membangun kebersamaan, menjalin hubungan harmonis antar warga, dan solidaritas yang tinggi. Melalui kegiatan kerja bakti juga dapat memperkuat rasa memiliki terhadap lingkungan sekitar dan mendorong partisipasi aktif dari masyarakat dalam pembangunan dan perawatan lingkungan.

Gotong-royong adalah sebuah konsep yang mengajarkan tentang konsep etos kerja yang menjadi ciri khas warga negara Indonesia. Gotong-royong secara harfiah diartikan bersama-sama memikul beban, memiliki makna bekerjasama atau saling membantu. Nilai gotong-royong terkandung dalam nilai-nilai Pancasila yaitu (1) sila pertama yaitu gotong-royong mengajarkan untuk berbuat baik dengan sesama, (2) sila kedua yaitu melalui kegiatan gotong-royong akan menunjukkan nilai kemanusiaan, (3) sila ketiga

yaitu gotong-royong mempunyai nilai persatuan untuk mempersatukan keberagaman dan perbedaan yang ada, sehingga gotong-royong akan membentuk rasa kekeluargaan dan saling memiliki, (4) sila keempat yaitu gotong-royong mengandung nilai kerakyatan dan musyawarah, (5) sila kelima yaitu gotong-royong akan menciptakan hubungan timbal balik dalam tolong-menolong antar warga, sehingga terwujudlah suatu keadilan (Simanjuntak, 2023).

Kegiatan musyawarah masyarakat merupakan kegiatan rutin yang dilaksanakan di Kampung Pancasila Kelurahan Pudakpayung. Tujuan dari adanya kegiatan ini yaitu untuk membahas mengenai permasalahan yang ada di sekitar Kampung Pancasila dan membahas mengenai program-program, serta menjalin silaturahmi untuk mempererat persaudaraan antar masing-masing warga. Musyawarah dapat diartikan sebagai proses diskusi dan pengambilan keputusan bersama yang melibatkan seluruh anggota masyarakat.

Gambar 8
Potret Kegiatan Musyawarah di Kampung Pancasila



Sumber : Hasil dokumentasi peneliti

Gambar diatas memperlihatkan kegiatan musyawarah yang dilakukan oleh masyarakat di Kampung Pancasila Kelurahan Pudakpayung. Dalam konteks Pancasila, kegiatan musyawarah masyarakat mencerminkan nilai-nilai Pancasila seperti demokrasi, persatuan, dan keadilan sosial. Pada kegiatan musyawarah setiap pendapat dan suara anggota masyarakat

dihargai, dan setiap keputusan diambil berdasarkan pada kesepakatan bersama. Setiap warga dapat ikut berpartisipasi secara aktif, baik dalam pembuatan kebijakan dan pengambilan keputusan yang berkaitan dengan program-program yang ada di Kampung Pancasila tersebut. Musyawarah menjadi sarana untuk mengatasi perbedaan pendapat atau konflik yang ada, dimana saat proses musyawarah berlangsung anggota masyarakat dapat saling mendengarkan, berdialog, dan mencari solusi yang menguntungkan seluruh pihak. Maka dapat disimpulkan bahwa melalui kegiatan musyawarah masyarakat, nilai-nilai Pancasila terwujud secara konkret. Kegiatan musyawarah memperkuat inklusivitas, partisipasi aktif dan solidaritas di Kampung Pancasila.

Berdasarkan hasil pemaparan diatas menunjukkan bahwa program lanjutan yang dilakukan di Kampung Pancasila yaitu mengadakan pagelaran seni wayang kulit, kegiatan gotong-royong, dan mengadakan kegiatan musyawarah masyarakat. Kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan tersebut merupakan upaya memberdayakan masyarakat dalam menanamkan nilai-nilai Pancasila melalui aksi sosial. Hal ini sejalan dengan pandangan Jim Ife (1997) yang menjelaskan bahwa pemberdayaan merupakan proses yang melibatkan individu, kelompok dan komunitas dalam upaya pengembangan pengetahuan, keterampilan, kemampuan dan kesadaran sehingga mereka dapat menentukan masa depan dan situasi sosial. Pagelaran seni wayang kulit meningkatkan apresiasi dan pemahaman budaya, kegiatan gotong-royong membangun keterampilan kerjasama dan membangun solidaritas yang tinggi, kegiatan musyawarah masyarakat memperkuat nilai-nilai persatuan, demokrasi dan keadilan sosial. Kegiatan tersebut menjadikan masyarakat menjadi lebih aktif dalam menerapkan nilai-nilai Pancasila, mempunyai pengetahuan dan kesadaran dalam membangun lingkungan di Kampung Pancasila.

C. Pendidikan dan Penyadaran

Pemberdayaan dilakukan melalui pendidikan dan penyadaran yang mengacu pada pemberian akses dan kesempatan pendidikan untuk semua

anggota masyarakat, tanpa memandang adanya latar belakang ataupun status sosial tertentu. Fokus strategi ini yaitu pada pentingnya suatu proses edukatif sebagai upaya melengkapi masyarakat untuk meningkatkan keberdayaan mereka. Memberikan modal ilmu pengetahuan atau kemampuan yang terampil. Upaya meningkatkan kesadaran bertujuan untuk membantu masyarakat memahami struktur operasi, dan memberikan pendidikan atau proses edukatif bertujuan untuk bekal menuju perubahan yang efektif (Ife & Tesoriero, 2008). Pendidikan dan penyadaran merupakan strategi yang paling terkait dalam upaya pemberdayaan masyarakat, karena melalui pendidikan yang inklusif dengan berpusat pada kebutuhan individu dan penyadaran yang dilakukan untuk memperkuat kemampuan masyarakat, diharapkan masyarakat yang diberdayakan tersebut menjadi lebih berdaya dan mandiri.

Pada konteks pendidikan, pemberdayaan bertujuan untuk memberikan akses yang merata kepada seluruh masyarakat dengan adil dan merata terhadap pendidikan. Pemberdayaan melalui pendidikan ini dapat dilakukan secara formal maupun non-formal, yang disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat. Pemberian pendidikan bertujuan untuk memberikan keterampilan dan pengetahuan kepada masyarakat agar mereka dapat mandiri dan meningkatkan kualitas hidup mereka. Sedangkan dalam konteks penyadaran, memiliki tujuan untuk mengubah pola pikir dan sikap yang menyimpang atau menghambat potensi masyarakat itu sendiri. Proses penyadaran biasanya melalui edukasi mengenai hak-hak mereka, kesetaraan gender, pentingnya partisipasi aktif, isu-isu sosial dan lain sebagainya.

Pendidikan Pancasila menjadi penting sebagai upaya memperkuat identitas Pancasila, membangun kesadaran kebangsaan, membentuk warga negara yang bertanggung jawab, dan mendorong terciptanya toleransi dan persatuan. Pancasila merupakan seperangkat nilai yang bersumber dari nilai-nilai kebaikan dan budaya negara Indonesia. Pancasila mengandung nilai luhur budi yang didalamnya mengatur tentang nilai normatif dan etika. Nilai luhur budi yang terkandung pada Pancasila diharapkan dapat

membentuk sikap, perilaku, dan pola pikir yang sesuai dengan nilai-nilai Pancasila (Widodo, 2022). Proses pengembangan program Kampung Pancasila di Kelurahan Pudukpayung juga berfokus pada pemberian pendidikan dan penyadaran kepada masyarakat. Pendidikan dan penyadaran dilakukan meresh kembali nilai-nilai Pancasila sebagai ideologi nasional sehingga praktik nasionalisme dapat terlaksana pada masyarakat.

Pendidikan tidak hanya dilakukan secara formal saja, namun dapat dilakukan secara non-formal. Pendidikan non-formal adalah salah satu jenis pendidikan yang dilakukan oleh masyarakat, pendidikan dilaksanakan di luar kegiatan persekolahan dengan mengedepankan kondisi riil atau faktual yang ada di masyarakat, dengan mempertimbangkan kebutuhan yang tengah dihadapi masyarakat pada kondisi tertentu. Jenis pendidikan non-formal ini merupakan salah satu alternatif dalam proses pemberdayaan yang memungkinkan masyarakat dengan segala keberadaanya, situasi, dan kondisinya dapat memberdayakan dirinya melalui pendirian pusat belajar mandiri, dengan tujuan meningkatkan kapasitas sumber daya manusia (Mahardhani, 2018). Dapat disimpulkan bahwasannya pendidikan non-formal dilakukan dengan mengikuti perkembangan manusia, yang mana diwujudkan dalam berbagai kegiatan atau aktivitas manusia. Sebagai upaya mengaktifkan nilai-nilai Pancasila di semua lapisan masyarakat, maka proses penanaman nilai Pancasila dilakukan sesuai dengan metode dan media yang disesuaikan dengan kondisi yang ada.

Lanjutan program dari Kampung Pancasila di Kelurahan Pudukpayung dilaksanakan sesuai dengan perencanaan yaitu kegiatan yang berupaya menanamkan nilai-nilai Pancasila kepada masyarakat melalui metode ceramah, diskusi dan pembagian buku berisi pengamalan sila-sila Pancasila. Proses pendidikan dilakukan non-formal dengan media lokal masyarakat setempat. Kurikulum yang diterapkan dalam pendidikan Pancasila disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat setempat, dan materi yang disampaikan tidak menyinggung agama lain serta tidak bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila. Sasaran dalam program penanaman nilai-nilai

Pancasila yaitu seluruh masyarakat di Kelurahan Pudakpayung, baik anak-anak, dewasa, hingga usia tua. Dalam upaya pengembangan nilai-nilai Pancasila dibantu oleh beberapa tokoh yang ada di Kelurahan Pudakpayung, dimana mereka memiliki kapasitas dan pengetahuan lebih mengenai Pancasila.

“saya saat pencaanangan Kampung Pancasila kemarin diminta ikut mengurus kegiatan mba.. mulai dari rapat, sosialisasi, sampai pada mendiskusikan lanjutan program. Jadi kemarin mba saat musyawarah antara tokoh budaya, tokoh masyarakat, tokoh agama, dan lembaga lainnya tentang pembentukan Kampung Pancasila program kami berfokus pada penanaman nilai-nilai Pancasila kepada seluruh masyarakat Pudakpayung baik yang muda maupun yang tua. Nah adanya pencaanangan Kampung Pancasila ini ingin menghidupkan kembali atau merefresh kembali bahwa Pancasila merupakan dasar negara yang menjadi sendi-sendi kehidupan. Agar program terlaksana, kami melibatkan para tokoh agama agar di setiap dakwah-dakwah yang dilakukan di Kelurahan Pudak Payung disisipi materi mengenai nilai-nilai Pancasila seperti bagaimana masyarakat menumbuhkan sikap gotong-royong, bagaimana menumbuhkan sikap saling menghormati antar kepercayaan yang kemudian ditanamkan dan diajarkan kepada setiap umat beragama sesuai dengan agamanya masing-masing. Kemudian juga ada pembagian buku pengamalan nilai Pancasila kepada anak-anak setempat mba..”(Wawancara dengan Bapak Trimakno selaku tokoh masyarakat yang ikut terlibat dalam program Kampung Pancasila, 30 Januari 2023).

Berdasarkan wawancara di atas menunjukkan bahwa sebelum dibentuknya Kampung Pancasila, pengurus organisasi Kampung Pancasila dan masyarakat sering melakukan pertemuan untuk memusyawarahkan terkait dengan apa saja yang harus dipersiapkan termasuk juga program lanjutan Kampung Pancasila di Pudakpayung tersebut. Pada pertemuan musyawarah tersebut hadirnya tokoh agama, tokoh budaya, dan tokoh masyarakat bertujuan untuk mencari cara alternatif untuk menanamkan nilai-nilai Pancasila kepada masyarakat di Kelurahan Pudakpayung.

Menurut Rukmana (2020) pengembangan Pancasila di Kampung Pancasila bertujuan untuk membentuk masyarakat yang memiliki sikap Pancasila, dimana nantinya dapat membawa perubahan bagi kepribadian warga Indonesia, khususnya para generasi muda penerus bangsa.

Penanaman nilai-nilai Pancasila di Kampung Pancasila Kelurahan Pudukpayung yang dilakukan dengan metode dakwah dilaksanakan dengan dibantu oleh tokoh agama setempat. Para tokoh agama menggunakan pendekatan agama untuk mengajarkan nilai-nilai Pancasila kepada masyarakat, sehingga seluruh masyarakat dapat memahami bahwa Pancasila yang menjadi ideologi Bangsa Indonesia tidak bertentangan dengan ajaran agama yang dianut. Penggunaan metode dakwah dalam penanaman nilai-nilai Pancasila dirasa lebih efektif, karena mudah diterima dan dipraktekkan oleh masyarakat.

“Betul mba.. disetiap tempat-tempat ibadah kami selalu mencoba menyisipkan pengajaran tentang nilai-nilai Pancasila. Kemarin di Gereja mba.. khutbah yang disampaikan juga disisipi tentang nilai-nilai Pancasila, agar masyarakat di Pudukpayung ini lebih paham dan bisa dipraktekkan dalam kehidupan sehari-hari” (Wawancara dengan Bapak Trimakno selaku tokoh masyarakat yang ikut terlibat dalam program Kampung Pancasila, 30 Januari 2023).

Berdasarkan wawancara di atas dapat diketahui bahwa program penanaman nilai-nilai Pancasila di Kampung Pancasila Kelurahan Pudukpayung telah dilakukan di tempat ibadah yaitu gereja. Dakwah yang dilakukan disela-sela ibadah berlangsung, saat khutbah penyampaian pesan-pesan disisipi pendidikan tentang Pancasila dengan tujuan agar masyarakat lebih paham dan nilai-nilai Pancasila tersebut dapat dipraktekkan dalam kehidupan sehari-hari.

“Paling mba untuk pembelajaran tentang Pancasila itu dilakukan saat ceramah shalat Jumat, perayaan maulid nabi, saat sedekah bumi, dan perayaan hari besar islam lainnya mba.. Ya.. disetiap ceramah itu saya sedikit-sedikit memasukkan materi tentang Pancasila seperti persatuan dan kesatuan antar umat, gotong-

royong yang dikaitkan dengan ajaran islam, demokrasi, menjaga kehidupan antar warga yang harmonis dan banyak lagi. Jadi bisa dibilang cara penanaman nilai-nilai Pancasila saat dakwah ini relevan karena disanalah momen yang dihadiri oleh banyak orang baik kalangan muda hingga tua mba..”(Wawancara dengan Bapak Haji Surani selaku tokoh agama di Kampung Pancasila Kelurahan Pudukpayung, 30 Januari 2023).

Hasil wawancara di atas Bapak Haji Surani sebagai salah satu tokoh agama Islam menyatakan bahwa proses penanaman nilai-nilai Pancasila dilaksanakan saat ceramah shalat Jumat, perayaan maulid Nabi, dan perayaan hari besar lainnya. Materi yang disampaikan pun beragam yaitu tentang persatuan dan kesatuan antar umat, gotong-royong, demokrasi, menjaga kehidupan antar umat dengan rukun dan harmonis.

Menggunakan tempat ibadah sebagai salah satu platform dakwah untuk menyebarkan pemahaman dalam pengamalan nilai-nilai Pancasila kepada masyarakat menjadi lebih efektif karena disamping tempat ibadah merupakan tempat yang sakral, tokoh agama juga memiliki pengaruh yang kuat terhadap umatnya. Suasana tempat ibadah yang khuyuk dan tenang menjadikan pesan-pesan tentang nilai-nilai Pancasila ini dapat meninggalkan kesan yang kuat pada masyarakat. Pesan-pesan tentang persatuan, kemanusiaan, keadilan, gotong-royong dan nilai Pancasila lainnya dapat dihubungkan dengan ajaran agama yang dianut, sehingga membuat masyarakat lebih mudah menerima dan menginternalisasikan nilai-nilai Pancasila tersebut.

Gambar 9
Diskusi Lanjutan Program Penanaman Nilai-Nilai Pancasila di tempat Ibadah



Sumber : Data dokumentasi organisasi Kampung Pancasila

Dari gambar di atas merupakan salah satu potret adanya diskusi dengan tokoh agama yang ada di Kampung Pancasila Kelurahan Pudakpayung tentang merealisasikan program penanaman nilai-nilai Pancasila kepada masyarakat. Diskusi perlu dilakukan untuk membangun sinergi dan kolaborasi yang kuat dalam merealisasikan program penanaman nilai-nilai Pancasila tersebut, sehingga program dapat terimplementasikan secara lebih efektif.

Gambar 10
Kegiatan Pendidikan Pancasila ke Pondok Pesantren



Sumber : Data dokumentasi organisasi Kampung Pancasila

Gambar di atas menunjukkan adanya proses sosialisasi mengenai Pancasila kepada anak-anak di Pondok Pesantren Multazzam Kelurahan Pudukpayung. Proses sosialisasi nilai-nilai Pancasila dilakukan langsung oleh Kodam Banyumanik 05 Semarang. Keikutsertaan salah satu pihak Kodam Banyumanik dalam memberikan pendidikan non-formal melalui metode sosialisasi ini dengan tujuan untuk membentuk karakter anak-anak agar memiliki sikap yang positif, seperti gotong-royong, toleransi, persatuan dan keadilan yang mana, sikap-sikap tersebut bersumber dari Pancasila itu sendiri. Pemberian pendidikan nilai-nilai Pancasila tersebut membantu meningkatkan pemahaman dan apresiasi kepada keberagaman budaya, agama, suku dan ras yang ada di Kampung Pancasila Kelurahan Pudukpaung, dengan tujuan untuk membangun masyarakat yang dapat menghargai perbedaan terutama pada generasi muda.

Kegiatan selanjutnya yang dilakukan di Kampung Pancasila Kelurahan Pudukpayung sebagai lanjutan program penanaman nilai-nilai Pancasila adalah pembagian buku penerapan butir-butir Pancasila kepada masyarakat. Pembagian buku tersebut merupakan salah satu langkah pendukung yang dilakukan oleh organisasi Kampung Pancasila agar masyarakat lebih mudah untuk mengakses dan membaca materi tentang penerapan butir-butir Pancasila. Kelebihan program pembagian buku ini adalah memberikan pengalaman yang lebih nyata dan menarik bagi masyarakat.

“Ini mbak merupakan salah satu kegiatan kami lakukan agar masyarakat di Kelurahan Pudukpayung lebih mendalami setiap butir-butir Pancasila yaitu dengan pembagian buku ini mba. Didalamnya sudah dijelaskan di setiap sila-sila Pancasila dari sila satu sampai lima. Kadang setiap ada yang lewat depan rumah saya bagi buku ini mba. Kadang juga pas lagi ada acara kumpul-kumpul juga disempatkan buat bagiin buku ini”. (Wawancara dengan Bapak Trimakno selaku tokoh masyarakat yang ikut terlibat dalam program Kampung Pancasila, 30 Januari 2023).

Berdasarkan wawancara di atas dapat diketahui bahwa tujuan dari pembagian buku penerapan nilai-nilai Pancasila agar masyarakat lebih paham tentang apa saja yang dapat dilakukan. Target dari program lanjutan

yaitu seluruh masyarakat di Kampung Pancasila Kelurahan Pudukpayung, dengan membagikan buku secara acak kepada masyarakat yang ditemui atau membagikan buku di acara-acara tertentu yang sedang berlangsung.

Gambar 11
Buku Penerapan Butir-Butir Pancasila



Sumber :Hasil dokumentasi peneliti

Gambar di atas merupakan bentuk dari buku penerapan butir-butir Pancasila yang dibagikan di Kampung Pancasila Kelurahan Pudukpayung. Menurut pernyataan informan buku tersebut didapat langsung dari Komandan Kodim 0733 Semarang, yang mengamanahkan untuk dibagikan kepada masyarakat setempat. Pada buku butir-butir Pancasila di atas sesuai dengan peraturan Tap MPR No. 1/MPR/2003, buku tersebut berisi penjelasan mendalam tentang setiap butir Pancasila beserta contoh-contoh penerapannya dalam kehidupan sehari-hari seperti sikap yang harus dikembangkan. Hal ini akan membantu masyarakat untuk lebih memahami dan menginternalisasi nilai-nilai Pancasila.

Dari penjelasan di atas, dapat disimpulkan bahwa lanjutan program Kampung Pancasila di Kelurahan Pudukpayung yaitu dalam hal pendidikan dan penyadaran dilakukan melalui dakwah yang disisipi materi Pancasila,

sosialisasi materi Pancasila di sekolah atau pondok, dan pembagian buku penerapan butir-butir Pancasila. Tujuan dari program tersebut adalah masyarakat meningkatkan pemahaman dan kesadaran mereka mengenai pentingnya nilai-nilai Pancasila dalam membangun kehidupan yang adil, toleran, harmonis dan beradab. Hal ini sejalan dengan pandangan Jim Ife (1997) yang menjelaskan bahwa pemberdayaan ialah pemberian sumber daya, pengetahuan, kemampuan dan kesempatan untuk menambah ilmu dan keterampilan masyarakat agar mereka dapat menentukan masa depannya sendiri. Berangkat dari pandangan Jim Ife program lanjutan yang dilaksanakan di Kampung Pancasila tersebut dapat memberikan pengetahuan bagi seluruh masyarakat dalam penerapan nilai-nilai Pancasila secara lebih baik, sehingga dapat meningkatkan kualitas hidup mereka dan memberikan kontrol atas keputusan yang mempengaruhi kehidupan mereka.

BAB VI PENUTUP

A. KESIMPULAN

Berdasarkan tahap-tahap pembahasan di atas menggunakan analisis teori pemberdayaan Jim Ife pada Kampung Pancasila di Kelurahan Pudukpayung, maka penulis dapat menyimpulkan sebagai berikut:

1. Bahwa kriteria atau indikator penetapan sebuah wilayah menjadi Kampung Pancasila di wilayah Kota Semarang yaitu (1) Masyarakat setempat memahami nilai-nilai Pancasila, (2) Masyarakat setempat berperilaku sesuai nilai-nilai Pancasila, (3) Sarana dan prasarana setempat menunjang edukasi dan implementasi nilai-nilai Pancasila bagi warga dan pengunjung, (4) Terdapat kegiatan rutin edukasi dan implementasi nilai-nilai Pancasila. Maka berdasarkan kriteria tersebut, tujuan adanya program Kampung Pancasila yaitu sebagai salah satu alat branding yang dibuat oleh pemerintah Kota Semarang, agar masyarakatnya mengembangkan nilai-nilai Pancasila dan menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari.
2. Bahwa proses penetapan Kampung Pancasila di Kelurahan Pudukpayung dilakukan melalui tiga proses pemberdayaan yaitu (1) enabling yaitu membangun suasana iklim yang membuat potensi masyarakat sekitar berkembang. Kampung Pancasila di Kelurahan Pudukpayung proses enabling ini dilakukan dengan identifikasi lokasi, koordinasi dengan pemerintah daerah dan sosialisasi kepada masyarakat, (2) empowering merupakan proses pemberdayaan dengan memperkuat potensi atau daya yang dimiliki oleh masyarakat. Pada Kampung Pancasila di Kelurahan Pudukpayung proses empowering melalui pembentukan tim pelaksana, penyediaan posko Kampung Pancasila dan implementasi kegiatan, dan (3) protecting adalah upaya melindungi masyarakat dari hal-hal yang dapat menimbulkan konflik atau persaingan antar masyarakat. Proses protecting yang ada di Kampung Pancasila Kelurahan Pudukpayung dilakukan dengan melindungi setiap hak-hak masyarakat, perlindungan terhadap kekerasan dan diskriminasi.

Upaya tersebut yaitu dengan mengajak seluruh masyarakat Kelurahan Pudakpayung untuk ikut andil atau berpartisipasi pada setiap kegiatan, musyawarah dan lain sebagainya. Hal itu dilakukan agar antar masyarakat merasa saling dibutuhkan dan mengakrabkan antar warga sehingga terciptanya keharmonisan.

3. Bahwa pengembangan program Kampung Pancasila di Kelurahan Pudakpayung dilakukan dengan tiga strategi yaitu (1) Perencanaan dan kebijakan dilakukan untuk mengidentifikasi masalah atau kebutuhan masyarakat. Perencanaan dan kebijakan ini dilakukan melalui pembentukan visi dan misi Kampung Pancasila tujuannya sebagai acuan untuk tercapainya tujuan yang akan dicapai, merancang kegiatan Kampung Pancasila secara sistematis dengan tujuan program yang akan dijalankan dapat tepat sasaran dan bermanfaat. (2) Aksi sosial dan politik yaitu sarana untuk melibatkan masyarakat secara aktif dalam proses pembangunan dan pengambilan keputusan. Aksi sosial yang dilakukan
4. Kampung Pancasila di Kelurahan Pudakpayung sebagai upaya pengembangan program yaitu dengan mengadakan pagelaran seni sebagai upaya pelestarian kebudayaan, menggalakkan kegiatan gotong-royong, dan mengadakan kegiatan musyawarah masyarakat.
5. Pendidikan dan penyadaran yaitu pemberdayaan yang berfokus pada proses edukatif sebagai upaya meningkatkan keberdayaan. Strategi ini dilakukan Kampung Pancasila di Kelurahan Pudakpayung melalui kegiatan pendidikan non formal yaitu menggunakan metode ceramah, diskusi, dan pembagian buku berisi pengamalan nilai-nilai Pancasila.

B. SARAN

1. Bagi pengurus organisasi Kampung Pancasila, hendaknya lebih aktif merancang kegiatan rutin meskipun kegiatan tersebut terlihat sederhana. Kemudian program-program Kampung Pancasila hendaknya ditempel di mading-mading kelurahan, atau tempat-tempat yang memang dapat terlihat oleh banyak orang, sehingga masyarakat di Kelurahan Pudakpayung tidak tertinggal informasi kegiatan yang akan dilakukan selanjutnya.
2. Bagi peneliti selanjutnya yang tertarik untuk mengembangkan penelitian ini, hendaknya dapat berfokus hal-hal lain yang belum dibahas dalam penelitian ini. Peneliti berharap penelitian ini dapat menjadi inspirasi untuk peneliti di masa yang akan datang

DAFTAR PUSTAKA

- Achmad, S. (2020). Konsep Pemberdayaan Masyarakat Dalam Islam. *Junal Syar'ie*, 3(3), 1-17.
- Alfariz, F. (2021). Analisis Nilai Religiusitas sebagai Penguatan Toleransi di Desa Pancasila Lamongan Jawa Timur. *Jurnal Filsafat Indonesia*, 4(1), 118-123.
- Al-Quran. (n.d.). *Al-Quran dan Terjemahannya*. Bandung: Departemen Agama RI.
- BPS, S. (2021). *Statistik Daerah Kota Semarang*. From bps.go.id.
- Fajeri, D. B. (2017). Analisis Perkembangan Permukiman dan Perubahan Nilai Tanah (Studi Kasus: Kec. Banyumanik Kota Semarang Jawa Tengah. *Jurnal Geodesi Undip*, 6(1), 179-188.
- Hamid, H. (2018). *Manajemen Pemberdayaan Masyarakat*. Makassar: Dela Macca.
- Handayani, W. d. (2018). Kajian Potensi Pengembangan Pertanian Perkotaan di Kota Semarang. *Jurnal Riptek*, 12(2), 55-68.
- Handini, d. (2019). *Pemberdayaan Masyarakat Desa dalam Pengembangan UMKM Wilayah Pesisir*. Surabaya: Scopindo Media Pustaka.
- Hasanah, U. S. (2021). Pembentukan Desa Pancasila Sebagai Identitas Budaya di Desa Pasir Panjang Kecamatan Mempawah Timur Kabupaten Mempawah. *Prosiding Seminar Nasional Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat*, 1(1), 138-149.
- Hendrianto, S. (2019). Analisis Pengembangan Wilayah Kota Semarang Berbasis Potensi Unggulan Daerah. *Junal Iptek*, 3(1), 29-38.
- Humas. (2022, Juni 27). *Hendi Tegaskan Kampung Pancasila Sebagai Sarana Perkuat Persatuan*. Retrieved from Pemerintah Kota Semarang: . From Semarangkota.go.id: https://semarangkota.go.id/p/3645/hendi_tegaskan_kampung_pancasila_sebagai_sarana_perkuat_persatuan
- Ife, J., & Tesoriero. (2014). *Community Development (Alternatif Pengembangan Masyarakat di Era Globalisasi)*. Yogyakarta: Pustaka Belajar.
- Khadiyanto, P. (2018). *Kajian Kelayakan Pengembangan Permukiman di Kelurahan Pudakpayung Semarang Indonesia*. In *Prosiding Seminar Kota*. Jakarta: Penerbit Universitas Trisakti.
- Kusumastuti, A. (2019). *Metode Penelitian Kualitatif*. Semarang: Lembaga Pendidikan Sukarno Pressindo.
- Mahardhani, J. A. (2018). Pemberdayaan Masyarakat Melalui Pendidikan Non- Formal Berkarakter Cinta Tanah Air. *Jurnal Pancasila dan Kewarganegaraan*, 3(2), 56-63.

- Manik. (20221). Revitalisasi Pancasila Melalui Dusun Pancasila. *Jurnal Keindonesiaan*, 1(2), 225-234.
- Nugrahani, F. (2014). *Metode Penelitian Kualitatif*. Solo: Cakra Books.
- Nuraini, F. (2018). Pengaruh Sarana dan Prasarana Terhadap Semangat dan Hasil Belajar Mahasiswa IKIP Siliwangi. *Jurnal Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia*, 3(1), 303-314.
- Nurlia. (2019). Pengaruh Struktur Organisasi Terhadap Pengukuran Kualitas Pelayanan (Perbandingan Antara Ekspektasi/Harapan Dengan Hasil Kerja). *Jurnal Meraja*, 2(2), 51-66.
- Octabian, W. A. (2018). Urgensi Memahami dan Mengimplementasikan Nilai- Nilai Pancasila Dalam Kehidupan Sehari-hari Sebagai Sebuah Bangsa. *Jurnal Bhineka Tunggal Ika*, 5(2), 123-127.
- PERBUB. (2017, September Selasa). *Pedoman Tata Cara Pembentukan Desa Pancasila di Kabupaten Cilacap*. Retrieved from Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia. From bpk.go.id.
- Rukmana, I. S. (2020). Aktualisasi Nilai-Nilai Pancasila Sebagai Contoh Nyata Ketahanan Ideologi (Studi di Kampung Pancasila, Dusun Nogosari, Desa Trirenggo, Kabupaten Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta). *Jurnal Ketahanan Nasional*, 28(2), 182-230.
- Sany, U. P. (2019). Prinsip-Prinsip Pemberdayaan Masyarakat dalam Perspektif Al Qur'an. *Jurnal Ilmu Dakwah*, 39(1), 32-44.
- Semarang. (2023, Juli 23). *Kecamatan Banyumanik Dalam Angka 2018*. Retrieved from Badan Pusat Statistik Kota Semarang. From bps.go.id: <http://www.bps.go.id/>
- Simanjuntak, H. (2023). Peran Karang Taruna dalam Meningkatkan Nilai Gotong Royong di Kampung Pancasila Desa Sitanggor Kecamatan Muara Kabupaten Tapanuli Utara. *Journal Of Social Science Research*, 3(2), 32-44.
- Sudarsana, I. K. (2020). Overview of Education on The Philosophy of Pancasila and Indonesian Education System. *Journal Of Critical Rievew*, 5954-5960.
- Sugiyono. (2019). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, Dan R&D*. Bandung: ALFABETA.
- Sumastuti, E. (2021). Pengembangan Wisata Kota Semarang. *Jurnal Pariwisata dan Budaya*, 12(1), 30-38.
- Suprpto. (2019). *Pemberdayaan Masyarakat Informasi: Konsep dan Aplikasi* . Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

- Ulum, & Anggraini. (2020). *Community Development*. . Malang: UB Press.
- Wardani. (2019). Internalisasi Nilai dan Konsep Sosialisasi Budaya dalam Menjunjung Sikap Persatuan Masyarakat Desa Pancasila. *Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial*, 6(2), 164-174.
- Widiastuti. (2019). Inovasi Kampung Tematik di Kota Semarang, Pembangunan Kawasan Kumuh Berbasis Partisipasi dan Pemberdayaan Masyarakat (Studi Kasus: Kampung Sehat Ramah Anak). *Journal Of Politic and Government*, 351-360.
- Widodo, S. (2022). Pendidikan Nilai-Nilai Pancasila pada Pendidikan Luar sekolah Studi Kasus di Kampung Pancasila Kota Semarang. *Seminar Nasional Ke Indonesiaan VII*, 1177-1185.
- Yesiana. (2020)115-121). Program Pengelolaan Sampah Berbasis Masyarakat di Kanal Banjir Barat (KBB) Kota Semarang. *Jurnal Riptek*, 14(2), 115-121.
- Yunus, S. (2017). *Model Pemberdayaan Masyarakat Terpadu*. Banda Aceh: Bandar Publishing.
- Zubaedi. (2013). *Pengembangan Masyarakat Wacana dan Praktik*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

A. Identitas Diri

Nama Lengkap : Rizky Permatasari
Tempat, Tanggal Lahir : Semarang, 29 Maret 2001
Alamat : Jalan Karonsih Selatan VII/609 RT 04/RW 06 Semarang
No Hp (WA) : 089520180905
Email : rizkypermatasari13@gmail.com

B. Riwayat Pendidikan

1. Pendidikan Formal
 - a. SD Negeri Ngaliyan 05 Semarang
 - b. SMP Negeri 23 Semarang
 - c. SMA Negeri 08 Semarang
 - d. UIN Walisongo Semarang
2. Pengalaman Organisasi
 - a. Anggota organisasi Ikatan Mahasiswa Semarang IKANMAS (2019)
 - b. Anggota organisasi FORSHA (2019)
 - c. Relawan PILAR PKBI (2023)